



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH

MEI 2021



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya "Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2021" dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, Mei 2021
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

Pribadi Santoso
Direktur Eksekutif

Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	xii
Tabel Indikator	xiv
Ringkasan Eksekutif	xx

SUPLEMEN

Kebijakan Relaksasi Fiskal Mendorong Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga Pada Produk Otomotif dan Properti di Jawa Tengah	21
Kinerja Industri Alas Kaki Mendorong Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah	24

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1.1	Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan I 2021	2
1.1.1	Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	3
1.1.2	Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	13

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

2.1.	Gambaran Umum APBD 2021	30
2.2.	Realisasi APBD Tahun 2021	30
2.2.1.	Realisasi Pendapatan Triwulan I Tahun 2021	31
2.2.2.	Realisasi Belanja Triwulan I Tahun 2021	32
2.3.	APBD 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	33
2.4.	APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	34
2.4.1.	Anggaran APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	34
2.4.2.	Realisasi APBN di Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2021	34



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH MEI 2021

BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

3.1.	Inflasi Secara Umum	38
3.2.	Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2021	38
3.2.1.	Inflasi Berdasarkan Kelompok	39
3.3.	Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah	41
3.3.1.	Disagregasi Inflasi Kota Semarang	42
3.3.2.	Disagregasi Inflasi Kota Tegal	42
3.3.3.	Disagregasi Inflasi Kota Surakarta	43
3.4.	<i>Tracking</i> dan Proyeksi Inflasi	44
3.4.1.	Inflasi April 2021	44
3.4.2.	<i>Tracking</i> Inflasi Triwulan II 2021	44
3.5.	Program Pengendalian Inflasi Daerah	45

BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.1.	Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah	48
4.1.1.	Perkembangan Bank Umum	49
4.1.2.	Perkembangan Kinerja Perbankan secara Spasial	51
4.2.	Ketahanan Sistem Keuangan Daerah di Jawa Tengah	52
4.2.1.	Risiko Kredit Perbankan di Jawa Tengah	52
4.2.2.	Risiko Likuiditas Perbankan di Jawa Tengah	54
4.2.3.	Ketahanan Sektor Rumah Tangga	54

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

5.1.	Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Tengah	60
5.1.1.	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	60
5.1.2.	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	61
5.1.3.	Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	61
5.1.4.	Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	62
5.2.	Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	63
5.2.1.	Penyediaan Uang Rupiah	63
5.2.2.	Penanganan Uang Palsu	63
5.3.	Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing	64
5.4.	Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	65



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH **MEI 2021**



BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1. Ketenagakerjaan	70
6.2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	73
6.2.1. Nilai Tukar Petani	73
6.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah	73
6.3. Tingkat Kemiskinan	74
6.4. Pemerataan Kesejahteraan Penduduk	75

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

7.1. Kondisi Perekonomian Global	80
7.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	80
7.2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	81
7.2.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	82
7.3. Prospek Inflasi Tahun 2021	82

Grafik



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	2	Grafik 1.19 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi	7
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional	2	Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)	7
Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi	2	Grafik 1.21 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri	8
Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi	3	Grafik 1.22 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen	8
Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi	3	Grafik 1.23 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi	8
Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	4	Grafik 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri	9
Grafik 1.7 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	4	Grafik 1.25 Perumbuhan Ekspor Luar Negeri Jawa Tengah per Jenis Komoditas	9
Grafik 1.8 Pergerakan Masyarakat di Pusat Perbelanjaan	5	Grafik 1.26 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas	9
Grafik 1.9 Pergerakan Masyarakat di Perkantoran dan Rumah	5	Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT	9
Grafik 1.10 Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT	9
Grafik 1.11 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini	5	Grafik 1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu	10
Grafik 1.12 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	6	Grafik 1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu	10
Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi	6	Grafik 1.31 Pertumbuhan Nilai Ekspor Alas Kaki	10
Grafik 1.14 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT	6	Grafik 1.32 Pertumbuhan Volume Ekspor Alas Kaki	10
Grafik 1.15 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	6	Grafik 1.33 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	10
Grafik 1.16 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	7	Grafik 1.34 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	10
Grafik 1.17 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah	7	Grafik 1.35 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri	11
Grafik 1.18 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	7	Grafik 1.36 Perkembangan Impor Jawa Tengah	11
		Grafik 1.37 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah	11

Grafik



Grafik 1.38 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	11	Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	17
Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	11	Grafik 1.56 Pertumbuhan Kredit Industri Pengolahan	17
Grafik 1.40 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	12	Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)	17
Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas	12	Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor	18
Grafik 1.42 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	12	Grafik 1.59 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan	18
Grafik 1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah	12	Grafik 1.60 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan	18
Grafik 1.44 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	12	Grafik 1.61 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas	18
Grafik 1.45 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah	13	Grafik 1.62 Pertumbuhan PDRB Konstruksi	19
Grafik 1.46 Indeks Penjualan Riil	13	Grafik 1.63 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen	19
Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15	Grafik 1.64 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi	19
Grafik 1.48 Curah Hujan di Jawa Tengah	15	Grafik 1.65 Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konsumsi Pemerintah	19
Grafik 1.49 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah	16	Grafik 1.66 Pangsa Pertumbuhan Ekonomi	19
Grafik 1.50 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah	16	Grafik 1.67 Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	19
Grafik 1.51 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah	16	Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2020 dan T.A. 2021	31
Grafik 1.52 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian	16	Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2020 dan Triwulan I 2021	31
Grafik 1.53 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian	16		
Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	16		



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH MEI 2021

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I (2019-2021)	31	Grafik 4.4 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah	48
Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah Triwulan I	31	Grafik 4.5 Perkembangan DPK Perbankan Umum	49
Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2021	25	Grafik 4.6 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	49
Grafik 2.6 Perbandingan Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2020 dan Triwulan I 2021	25	Grafik 4.7 Andil Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	49
Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan I 2021	26	Grafik 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	49
Grafik 2.8 Perbandingan Pos Belanja Daerah Triwulan I 2020 dan Triwulan I 2021	26	Grafik 4.9 Andil Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	49
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional	38	Grafik 4.10 Perkembangan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	50
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa	38	Grafik 4.11 Andil Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	50
Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa	38	Grafik 4.12 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan	50
Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa	38	Grafik 4.13 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha	50
Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	40	Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan	51
Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	40	Grafik 4.15 Perkembangan Rasio NPL Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	51
Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Transportasi	41	Grafik 4.16 Pangsa Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	51
Grafik 3.8 Inflasi Tahunan Triwulan III 2020 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah	41	Grafik 4.17 Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	52
Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah	42	Grafik 4.18 Pangsa Penyaluran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	52
Grafik 4.1 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah	48		
Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa	48		
Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan	48		

Grafik



Grafik 4.19 Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	52	Grafik 4.32 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	56
Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53	Grafik 4.33 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	56
Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Industri Pengolahan	53	Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	56
Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Perdagangan Besar & Eceran	53	Grafik 4.35 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	56
Grafik 4.23 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Subsektor Konstruksi	53	Grafik 5.1 Perkembangan Kliring di Jawa Tengah	60
Grafik 4.24 Likuiditas Perbankan di Jawa Tengah	54	Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan SBT SKDU	60
Grafik 4.25 Dana Pihak Ketiga di Perbankan Berdasarkan Jangka Waktu	54	Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	60
Grafik 4.26 Indeks Penghasilan & Ketersediaan Tenaga Kerja Saat Ini	54	Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	60
Grafik 4.27 Ekspektasi Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan y.a.d.	54	Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah	61
Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	55	Grafik 5.6 Perkembangan Nominal RTGS di Jawa Tengah	61
Grafik 4.29 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Jawa Tengah Berdasarkan Komponennya	55	Grafik 5.7 Perkembangan Volume RTGS di Jawa Tengah	61
Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	56	Grafik 5.8 Perkembangan Volume Transaksi	62
Grafik 4.31 Perkembangan Andil Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	56	Grafik 5.9 Perkembangan Nominal Transaksi	62
		Grafik 5.10 Perkembangan Volume Transaksi	62
		Grafik 5.11 Perkembangan Nominal Transaksi	62
		Grafik 5.12 Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah	62



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH MEI 2021

Grafik 5.13 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah	62
Grafik 5.14 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	63
Grafik 5.15 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling	63
Grafik 5.16 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah	64
Grafik 5.17 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan	64
Grafik 5.18 Transaksi Penukaran Valuta Asing	64
Grafik 5.19 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA BB di Jateng	64
Grafik 5.20 Perkembangan QRIS di Jawa Tengah	65
Grafik 5.21 Perkembangan QRIS di Jawa Tengah Secara Spasial	65
Grafik 6.1 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat ini	72
Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha 6 bulan yang Akan Datang	72
Grafik 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dibandingkan Nasional	75
Grafik 6.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah	75
Grafik 6.5 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional	75
Grafik 6.6 Perbandingan Ketimpangan Jawa Tengah dan Nasional berdasarkan daerah	77
Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	80

Tabel



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% yoy)	2	Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan	39
Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	3	Tabel 3.3 Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah	39
Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	4	Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	39
Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% YOY)	4	Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Komoditas Utama – Kelompok Makanan, Minuan, dan Tembakau	40
Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	14	Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Tahunan Komoditas Utama – Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	41
Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	14	Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan Komoditas Utama – Kelompok Transportasi	41
Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (% YOY)	15	Tabel 3.8 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Semarang Berdasarkan Kelompok	42
Tabel 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	21	Tabel 3.9 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Tegal Berdasarkan Kelompok	43
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah 2021 (Rp Miliar)	21	Tabel 3.10 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Surakarta Berdasarkan Kelompok	43
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Triwulan I - 2020 dan Triwulan I - 2021	31	Tabel 3.11 Perkembangan Inflasi Tahunan Komoditas Utama – Kelompok Kesehatan di Kota Surakarta	44
Tabel 2.4 Realisasi Belanja Triwulan I 2020 dan Triwulan I 2021	32	Tabel 4.1 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai	51
Tabel 2.5 Pagu dan Realisasi APBD 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	33	Tabel 4.2 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya	55
Tabel 2.6 Pagu dan Realisasi Pendapatan 35 kabupaten/kota	34	Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)	70
Tabel 2.7 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2021	53	Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)	70
Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan	38		



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH MEI 2021

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Febrauri 2016 – Februari 2021 (juta orang)	71
Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)	71
Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	72
Tabel 6.6. NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya	73
Tabel 6.7. NTP Jawa Tengah per Subsektor	73
Tabel 6.8. Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor	74
Tabel 6.9. Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor	74
Tabel 6.10 Garis Kemiskinan Jawa Tengah	75
Tabel 6.11 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers	77
Tabel 7.1 Indikator Perekonomian Global	80
Tabel 7.2 Harga Perdagangan Dunia dalam US Dollars	80
Tabel 7.3 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	81
Tabel 7.4 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	81
Tabel 7.5 Proyeksi Inflasi	83

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PDRB & Infasi

INDIKATOR	2019				2019	2020				2020	2021
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Ekonomi Makro Regional *)											
Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)	5,12	5,52	5,63	5,33	5,40	2,65	-5,91	-3,79	-3,34	-2,65	-0,87
Berdasarkan Sektor											
-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,13	4,65	-1,58	1,54	1,35	-4,73	0,94	6,61	7,56	2,48	13,89
-Pertambangan dan Penggalian	5,94	3,14	2,46	2,04	3,36	4,99	-4,74	0,52	-3,79	-0,80	-4,19
-Industri Pengolahan	4,14	4,53	6,75	5,26	5,18	3,01	-4,41	-7,10	-6,10	-3,74	-4,19
-Pengadaan Listrik dan Gas	6,21	4,81	4,83	6,05	5,48	4,60	-1,29	3,88	0,10	1,79	4,71
-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,54	5,27	4,61	4,94	4,34	3,04	1,15	2,19	2,79	2,29	4,27
-Konstruksi	5,31	3,45	5,55	5,43	4,95	1,08	-5,85	-5,62	-4,40	-3,76	0,79
-Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor	6,78	6,53	6,56	4,05	5,97	3,28	-10,33	-5,59	-2,27	-3,80	-0,56
-Transportasi dan Pergudangan	9,92	8,32	8,27	7,56	8,49	3,03	-62,95	-37,68	-33,53	-33,15	-31,04
-Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,91	9,30	10,24	10,77	9,07	3,98	-19,52	-7,34	-8,62	-7,98	-4,57
-Informasi dan Komunikasi	12,15	12,41	11,52	10,49	11,62	11,27	18,79	17,65	14,82	15,65	9,87
-Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	0,18	4,47	6,70	3,51	8,93	1,50	0,32	-2,33	2,03	-3,68
-Real Estate	4,27	6,26	6,22	5,38	5,53	3,82	-2,85	-1,07	-0,90	-0,28	-0,05
-Jasa Perusahaan	8,76	9,66	13,53	10,24	10,54	5,35	-17,47	-10,66	-5,36	-7,19	-4,65
-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	4,68	4,16	3,07	3,71	1,56	-1,35	-0,58	-4,50	-1,31	-1,74
-Jasa Pendidikan	7,35	7,19	6,82	8,96	7,59	4,56	-0,76	-1,86	-2,48	-0,24	-1,32
-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,01	7,89	5,11	5,12	6,72	7,99	7,12	8,43	9,19	8,19	0,25
-Jasa lainnya	9,68	9,99	9,32	7,19	9,02	4,93	-18,70	-8,80	-8,81	-8,01	-9,88
Berdasarkan Permintaan											
-Konsumsi Rumah Tangga	4,79	5,16	4,18	4,36	4,62	3,46	-4,75	-1,89	-2,38	-1,42	-1,89
-Konsumsi LNPRT	13,85	13,64	8,23	8,15	10,90	-1,88	-5,41	-1,63	-2,88	-2,98	0,13
-Konsumsi Pemerintah	5,08	6,51	7,01	0,39	4,04	2,89	-7,14	-0,23	-8,41	-4,30	0,01
-PMTB	6,92	4,17	5,54	2,98	4,85	0,16	-11,94	-10,06	-5,64	-6,98	-0,77
-Ekspor Luar Negeri	3,74	-2,08	17,87	-0,04	5,10	5,02	-9,13	-16,68	-8,89	-7,90	8,07
-Impor Luar Negeri	6,62	-10,16	-16,60	-4,24	-6,70	1,16	-28,96	-16,61	-25,61	-17,65	-2,18
-Net Ekspor Antardaerah	6,82	-4,14	-33,70	13,82	-6,59	-0,93	-34,89	-15,00	-45,42	-23,13	7,38
-Perubahan Inventori	-6,58	-15,58	-15,40	-13,78	-11,21	13,89	75,43	89,62	-54,11	86,70	-60,92

*MULAI TAHUN 2020 PERHITUNGAN IHK MENGGUNAKAN SBH 2018
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

INDIKATOR	2019				2019	2020				2020	2021
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Ekspor											
-Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2.116	1.956	2.101	2.052	8.224	2.100	1.542	1.998	2.069	4.066	2.360
-Volume Ekspor Non Migas (Juta Ton)	767	762	850	834	3.212	908	735	1.026	812	1.838	873
Impor											
-Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	2.280	2.201	2.214	2.082	8.777	2.016	1.564	1.660	1.850	3.510	1.946
-Volume Impor Non Migas (Juta Ton)	1.357	1.336	1.331	1.352	5.376	1.320	1.376	1.140	1.190	2.330	1.366
Indeks Harga Konsumen											
Provinsi Jawa Tengah	133,32	135,16	135,81	136,71	136,71	104,47	104,74	104,66	105,51	105,51	106,01
Kota Purwokerto	131,99	133,63	134,10	134,88	134,88	103,88	104,42	104,40	104,86	104,86	105,45
Kota Surakarta	130,05	131,89	131,83	133,10	133,10	103,76	103,82	104,00	104,61	104,61	105,76
Kota Semarang	132,95	134,87	135,78	136,59	136,59	104,88	105,13	105,04	105,91	105,91	106,32
Kota Tegal	131,44	133,53	133,77	134,71	134,71	104,55	105,16	105,14	106,26	106,26	106,31
Kota Kudus	141,29	142,75	144,33	145,17	145,17	103,81	103,92	103,80	104,66	104,66	105,23
Kota Cilacap	138,27	139,93	139,93	140,75	140,75	103,03	103,67	103,37	104,25	104,25	104,69
Laju Inflasi Tahunan (% , yoy)											
Provinsi Jawa Tengah	1,82	2,52	3,13	2,81	2,81	3,25	2,48	1,46	1,56	1,56	1,47
Kota Purwokerto	2,17	2,37	2,92	2,28	2,28	2,81	2,55	1,80	1,90	1,90	1,51
Kota Surakarta	1,79	2,35	3,01	2,94	2,94	2,24	1,40	1,46	1,38	1,38	1,93
Kota Semarang	1,71	2,60	3,20	2,93	2,93	3,64	2,84	1,38	1,49	1,49	1,37
Kota Tegal	2,19	2,58	2,94	2,56	2,56	3,53	2,43	2,00	2,36	2,36	1,68
Kota Kudus	1,72	2,29	3,51	3,02	3,02	2,66	1,65	1,14	1,24	1,24	1,37
Kota Cilacap	1,98	2,63	2,80	2,19	2,19	2,15	2,04	1,75	1,71	1,71	1,61

*MULAI TAHUN 2020 PERHITUNGAN IHK MENGGUNAKAN SBH 2018
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

B. Perbankan dan Sistem Pembayaran

INDIKATOR	2019				2019	2020				2020	2021 I
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Perbankan **)											
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	288,89	305,82	309,81	305,63	305,63	310,74	324,09	343,89	341,04	341,04	345,44
-Giro	38,28	41,57	40,19	38,81	38,81	40,75	45,25	46,79	42,20	42,20	47,56
-Tabungan	148,23	154,72	159,31	168,29	168,29	166,91	172,11	180,39	188,90	188,90	185,60
-Deposito	102,37	109,54	110,30	98,53	98,53	103,08	106,72	116,71	109,93	109,93	112,28
Kredit (Rp Triliun)	282,12	287,54	293,08	299,05	299,05	300,57	295,46	301,06	304,35	304,35	307,07
-Modal Kerja	151,16	154,93	157,80	160,87	160,87	160,80	157,68	162,59	165,99	165,99	168,15
-Investasi	47,05	47,82	48,80	50,44	50,44	51,22	49,84	49,42	48,17	48,17	48,69
-Konsumsi	83,91	84,79	86,47	87,74	87,74	88,55	87,94	89,04	90,20	90,20	90,18
Loan to Deposit ratio (%)	97,66	94,02	94,60	97,85	97,85	96,73	91,17	87,54	89,24	89,24	88,88
NPL Gross (%)	2,48	2,38	2,88	4,17	4,17	4,80	5,20	4,97	4,63	4,63	4,96

**DATA PERBANKAN MERUPAKAN DATA BANK UMUM YANG ADA DI JAWA TENGAH (LOKASI BANK PELAPOR)

C. Sistem Pembayaran

SISTEM PEMBAYARAN	2019				2019	2020				2020	2021 I
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Transaksi Kliring											
- Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp Miliar)	574	621	594	621	2.410	636	568	579	683	616	639
- Rata-rata Harian Volume Transaksi (Lembar)	14.214	15.172	14.159	15.370	58.915	15.077	14.033	14.058	17.114	15.070	14.602
Transaksi Kas (Rp Triliun)											
-Inflow	21,90	28,54	21,02	17,62	89,08	24,38	23,60	19,76	17,13	60,50	50,73
-Outflow	11,04	18,61	14,63	19,86	64,14	12,44	21,01	17,10	21,79	59,91	12,33







RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus berlanjut pada triwulan I 2021. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2021 mencatat perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2021 tumbuh -0,87% (yoy), atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -3,34% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas pada seluruh komponen dengan sumbangan terbesar dari ekspor luar negeri dan investasi. Kinerja positif ekspor luar negeri terjadi pada ekspor non migas yang tumbuh 12,5% (yoy) pada triwulan I 2021, terutama didorong oleh komoditas ekspor unggulan tekstil dan produk tekstil (TPT), *furniture*, serta alas kaki. Peningkatan ekspor didorong oleh realisasi order yang tertunda selama tahun 2020 dan penambahan *order* baru di tahun 2021.

Perbaikan kinerja investasi ditopang oleh realisasi beberapa proyek infrastruktur yang sempat tertunda di tahun 2020, khususnya pembangunan proyek strategis nasional yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di awal tahun 2021. Pada sektor swasta, investasi dilakukan dengan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi untuk mengakomodir peningkatan order, terutama yang bersumber dari permintaan global. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kapasitas utilisasi pelaku usaha meningkat dari 70,42% pada triwulan IV 2020 menjadi 71,15% pada triwulan I 2021. Sementara itu, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor perekonomian yang terbesar masih berkontraksi meskipun sudah mulai membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Indeks Penjualan Riil (IPR) di Jawa Tengah masih menurun mengindikasikan masyarakat menunda pembelian kebutuhan barang sekunder terutama sandang. Meskipun demikian, keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian mulai meningkat. Indikator mobilitas dan aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan dan tempat umum lain cenderung meningkat, yang terindikasi dari menurunnya pertumbuhan DPK perseorangan yang diperkirakan digunakan untuk konsumsi.

Berdasarkan lapangan usaha utama, perbaikan ekonomi didorong oleh lapangan usaha pertanian dan infrastruktur. Sementara itu, industri pengolahan dan perdagangan yang merupakan kontributor perekonomian terbesar masih mengalami kontraksi meskipun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan permintaan ekspor Jawa Tengah dari negara mitra dagang mendorong perbaikan kinerja industri pengolahan, sebagaimana tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Jawa Tengah yang meningkat dari 43,20% pada triwulan IV 2020 menjadi 44,58% pada triwulan I 2021.



Sedangkan perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan didorong oleh berakhirnya penerapan PSBB menjadi PPKM mikro.

Ke depan, pemulihan perekonomian Jawa Tengah diperkirakan masih akan berlanjut didukung oleh implementasi vaksinasi yang terus meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan ditopang baik oleh permintaan global maupun domestik. *Order* produk ekspor Jawa Tengah terindikasi terus meningkat pada komoditas unggulan seperti alas kaki, kayu olahan, *furniture*, dan garmen. Selain itu, realisasi berbagai kebijakan pemerintah juga dapat semakin mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Adanya kebijakan relaksasi fiskal pemerintah melalui PMK No.20/PMK.010/2021 yang memberikan diskon PPnBM untuk pembelian kendaraan Roda 4 dan berlaku pada 1 Maret 2021, mulai mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor meskipun masih pada tingkat yang terbatas.

Keuangan Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 secara nominal mengalami peningkatan. Namun demikian, rasio realisasi pendapatan maupun belanja lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Rasio realisasi Pendapatan terhadap pagu tercatat sebesar 14,53% dan rasio realisasi belanja terhadap pagu tercatat sebesar 9,46%.

Realisasi pendapatan daerah pada triwulan I 2021 sebesar Rp3,9 triliun, menurun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,1 triliun. Sumber utama yang menahan realisasi pendapatan daerah adalah realisasi PAD yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -21,66% (yoy).

Realisasi belanja daerah pada triwulan I 2021 sebesar sebesar Rp2,57 triliun, lebih rendah daripada tahun triwulan I 2020 yang mencapai Rp2,71 triliun. Sumber yang menahan realisasi belanja belanja daerah adalah realisasi belanja modal yang terkontraksi -58,78% (yoy) dan belanja transfer yang terkontraksi sebesar -15,54% (yoy).

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah relatif menurun dibandingkan triwulan IV 2020, dari sebesar 1,55% (yoy) menjadi sebesar 1,48% (yoy). Penurunan tekanan inflasi pada triwulan I 2021 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa

lainnya. Tekanan harga pada komoditas bahan pangan utama yang sempat mengalami kelangkaan pada akhir tahun 2020, akhirnya mereda pada triwulan I 2021 seiring dengan masa panen yang berlangsung sejak Februari-Maret 2021. Selanjutnya, penurunan tekanan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya terutama disebabkan oleh penurunan inflasi komoditas emas perhiasan dari 26,47% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 9,97% (yoy) pada triwulan I 2021. Penurunan ini sejalan dengan perkembangan emas di pasar perdagangan dunia yang juga terus mencatatkan penurunan dari puncak harga pada Agustus 2020.

Inflasi Jawa Tengah pada triwulan II diperkirakan masih akan meningkat secara terbatas. Peningkatan laju inflasi tersebut diperkirakan bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya pada beberapa komoditas utama yang sangat bergantung pada perkembangan harga di pasar perdagangan internasional. Peningkatan harga crude palm oil (CPO), jagung, dan kedelai di pasar internasional masih terus berlanjut akibat gangguan produksi di negara produsennya. Risiko peningkatan yang moderat juga diperkirakan akan berlangsung pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya didorong oleh berkurangnya pasokan dalam negeri akibat gangguan produksi pada tahun 2020 lalu.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

Stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan I 2021 relatif membaik dibandingkan triwulan IV tahun 2020. Walaupun demikian, fungsi intermediasi perbankan masih mengalami penurunan. Penyaluran kredit perbankan masih menopang kinerja sektor utama perekonomian Jawa Tengah, yaitu pada Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian yang masih terus bertumbuh. Kualitas kredit perbankan terhadap lapangan usaha utama di Jawa Tengah juga relatif meningkat sehingga masih perlu diwaspadai.

Kontribusi permintaan rumah tangga (RT) yang belum pulih pada triwulan laporan turut menahan pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dari total kredit konsumsi perbankan, dengan pangsa sebesar 29,37% dari total kredit, disalurkan kepada RT untuk pembiayaan KPR, multiguna, dan KKB, dengan risiko masing-masing kredit masih terjaga di bawah batas yang dipersyaratkan oleh otoritas.

Secara umum, perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 menunjukkan perlambatan, baik pada transaksi tunai maupun non tunai. Penyelesaian transaksi ritel di Jawa Tengah yang diproses melalui SKNBI pada triwulan I 2021 mencapai Rp37 triliun, mengalami penurunan 7,47% (yoy). Penurunan transaksi SKNBI tersebut sejalan dengan masih rendahnya konsumsi masyarakat di Jawa Tengah yang masih mengalami kontraksi 1,89% (yoy) pada triwulan ini.

Transaksi sistem pembayaran menggunakan BI-RTGS juga masih terbatas yaitu sebesar Rp187 triliun, atau tumbuh -9,05% (yoy). Meskipun masih berkontraksi, namun mulai terdapat perbaikan kinerja BI-RTGS di Jawa Tengah (tumbuh 10,96%; qtq) didorong oleh mulai bergeraknya aktivitas ekonomi pada lapangan usaha industri pengolahan.

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 mencatatkan posisi net inlow sebesar Rp38,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp4,66 triliun. Tingginya aliran *inflow* pada triwulan I 2021, diindikasikan karena berakhirnya perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru. Akibatnya, aliran uang kartal yang sempat meningkat di masyarakat pada triwulan IV 2020, kembali masuk ke perbankan.

Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mencapai Rp367,62 miliar, atau berkontraksi -48,65% (yoy) dan -7,83% (qtq). Penurunan terjadi baik pada transaksi pembelian (-47,85%; yoy) maupun penjualan (-49,31%; yoy). Penurunan transaksi valuta asing seiring masih belum pulihnya kinerja sektor pariwisata, tercermin dari minimnya wisatawan asing ke Jawa Tengah dan aktivitas penerbangan ke luar negeri.

Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi meningkat, tercermin dari peningkatan *merchant* yang telah memiliki dan menggunakan QRIS. Pada akhir triwulan I 2021 terdapat 578.337 *merchant* di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki QRIS atau tumbuh 134,54% (yoy) dan 15,45% (qtq). Pertumbuhan signifikan tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mendorong elektronifikasi di masyarakat sehingga dapat tercipta transaksi ekonomi yang aman, cepat dan efisien. Penyaluran bansos secara non tunai dan Program Sembako juga telah dilakukan secara tepat waktu pada Januari dan Maret 2021 sesuai prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Merujuk rilis Badan Pusat Statistik yang memotret kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2021, jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Februari 2021 sebesar 27,13 juta orang, atau meningkat 1,42% (yoy). Namun, pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Terdapat 1,12 juta orang angkatan kerja atau 5,96% tenaga kerja tergolong dalam kategori pengangguran.

Pada triwulan I 2021 kondisi tenaga kerja di Jawa Tengah masih merasakan dampak wabah COVID-19. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 masih berada pada level pesimis, yang ditunjukkan indeks ketersediaan lapangan kerja yang berada pada 54,68. Hal serupa juga terjadi pada indeks penghasilan yang tercatat sebesar 85,99 pada triwulan II 2021. Penurunan permintaan di tingkat domestik dan global membuat aktivitas produksi melemah. Sehingga beberapa pelaku usaha terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2021 tercatat sebesar 99,30; atau mengalami penurunan dibandingkan Desember 2020, yang tercatat sebesar 101,49. Penurunan NTP disebabkan oleh akselerasi biaya yang harus dibayar petani lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diterima petani. Peningkatan biaya tercermin dari inflasi perdesaan terutama pada Penyediaan Makanan dan Minuman serta Kelompok pakaian dan alas kaki.

Prospek Perekonomian Daerah

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020.

Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Daya beli konsumen terjaga ditopang oleh bantuan sosial dan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Jawa Tengah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, furnitur, hingga makanan.

Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Transportasi, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya. Risiko dari eksternal akan semakin meningkat seiring dengan pulihnya sebagian kegiatan manufaktur global yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan komoditas bahan mentah dan barang baku. Ekspektasi masyarakat terhadap proses Pemulihan Ekonomi Nasional diperkirakan masih akan berlanjut meningkat, yang selanjutnya akan mendorong tingkat permintaan barang dan jasa. Meskipun tekanan risiko inflasi meningkat, namun inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 diperkirakan tetap dalam sasaran inflasi Nasional 3%+1%.





01

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

- 1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan I 2021
 - 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran
 - 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN I 2021

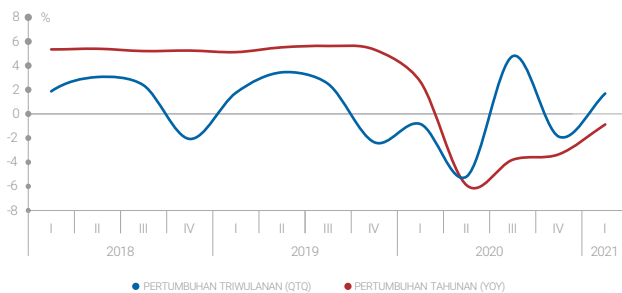
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus mengalami perbaikan pada triwulan I 2021. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2021 sebesar -0,87% (yoy), atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -3,34% (yoy). Meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah. Meskipun membaik, namun kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -0,74% (yoy) dan kawasan Jawa (-0,83%; yoy). Sementara itu, secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tumbuh 1,69% (qtq), meningkat dibandingkan -1,89% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Perbaikan pertumbuhan di Jawa Tengah sejalan dengan perekonomian nasional dan kawasan Jawa yang juga membaik. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) membaik seiring dengan vaksinasi yang telah berjalan intensif, menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami peningkatan di seluruh provinsi di Jawa. Pertumbuhan terendah terjadi pada DKI Jakarta (-1,65%; yoy), sedangkan provinsi lainnya tumbuh lebih baik dibandingkan Jawa

Tengah yaitu Jawa Barat (-0,83%; yoy), Jawa Timur (-0,44%; yoy), Banten (-0,39%; yoy), dan DI Yogyakarta (6,14%; yoy). Dengan perkembangan tersebut, Jawa Tengah menyumbang 8,50% terhadap perekonomian Nasional atau 16,94% terhadap perekonomian kawasan Jawa. Berdasarkan kontribusi tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

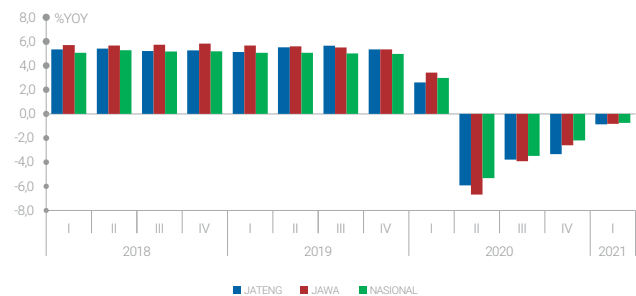
Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh perbaikan sisi lapangan usaha dan pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, perbaikan didorong utamanya oleh ekspor luar negeri dan investasi. Meskipun begitu, wabah COVID-19 masih menimbulkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal ini membuat ekspansi ekonomi masih tertahan, yang tercermin dari masih lemahnya pertumbuhan kredit perbankan. Pada triwulan I 2021, kredit yang disalurkan di Jawa Tengah hanya sebesar -0,02% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 1,68% (yoy)², yang disebabkan perlambatan pada kredit investasi dan konsumsi.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



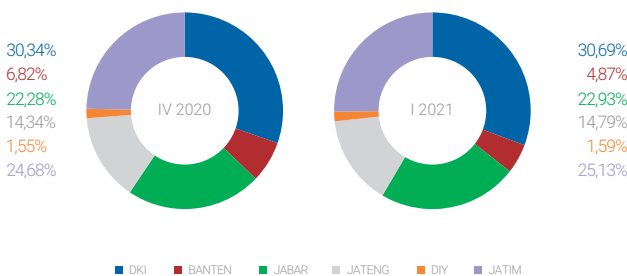
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional



SUMBER: BPS, DIOLAH

Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi



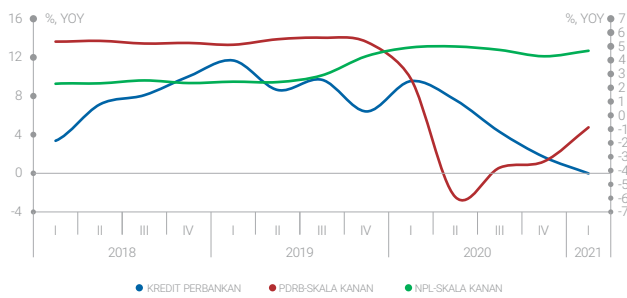
SUMBER: BPS, DIOLAH

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% yoy)

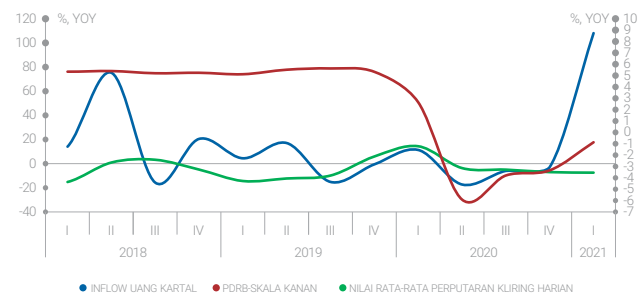
PROVINSI	IV 2020	I 2021
DKI JAKARTA	-2.14	-1.65
BANTEN	-3.92	-0.39
JABAR	-2.39	-0.83
JATENG	-3.34	-0.87
DIY	-0.68	6.14
JATIM	-2.64	-0.44
JAWA	-2.60	-0.83

SUMBER: BPS, DIOLAH

1. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik (BRS) Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan LPP adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode terkini. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2020 dan 2019 masih bersifat sementara.
2. Pertumbuhan kredit pada Bab I menggunakan lokasi proyek Jawa Tengah, yaitu kredit yang disalurkan oleh bank se-Indonesia ke debitur atau proyek di Jawa Tengah.

Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Dari sisi lapangan usaha, perbaikan perekonomian pada triwulan I 2021 terjadi pada hampir seluruh sektor. Lapangan usaha pertanian tumbuh signifikan didorong adanya panen raya pada tanaman pangan. Selain itu, sektor konstruksi juga membaik sejalan dengan meningkatnya pembangunan (investasi bangunan) proyek strategis nasional. Lebih lanjut, kinerja lapangan usaha utama provinsi Jawa Tengah yaitu industri pengolahan dan perdagangan masih mengalami kontraksi namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan permintaan ekspor Jawa Tengah dari negara mitra dagang mendorong perbaikan kinerja industri pengolahan, tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Jawa Tengah yang meningkat.

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi terjadi pada seluruh komponen dengan sumbangan terbesar dari ekspor luar negeri dan investasi. Peningkatan aktivitas perekonomian domestik dan global mendorong peningkatan kinerja kedua komponen tersebut. Sementara itu, perekonomian pada aspek

permintaan masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 61,08%³. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor perekonomian yang terbesar masih terkontraksi meskipun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Apabila dilihat dari indikator mobilitas masyarakat, aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan dan tempat umum lainnya cenderung meningkat. Tendensi masyarakat untuk berbelanja meningkat terindikasi pada melambatnya pertumbuhan DPK perseorangan dari 9,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,37% (yoy) pada triwulan I 2021.

1.1.1.1 Pengeluaran Konsumsi

Secara agregat, konsumsi domestik Jawa Tengah masih mengalami kontraksi pada triwulan IV 2020. Pelonggaran pembatasan sosial yang mulai diberlakukan sejak akhir triwulan II 2020, tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi pada berbagai jenis komoditas. Pelemahan juga terjadi pada konsumsi pemerintah sebagai dampak COVID-19, sehingga menahan kinerja pemerintah yang biasanya meningkat di akhir tahun.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019				2019*	2020*				2020*	2021**
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi Rumah Tangga	198.652	205.112	206.664	211.520	821.948	209.353	198.886	205.437	208.420	822.096	211.100
Konsumsi LNPR	3.990	4.207	4.050	4.196	16.443	4.020	4.046	4.007	4.152	16.225	4.049
Konsumsi Pemerintah	16.356	23.432	25.742	37.679	103.210	17.192	21.179	26.269	33.720	98.360	17.079
Investasi	105.188	109.880	118.134	115.150	448.352	105.421	96.784	106.451	109.158	417.815	105.132
Ekspor Luar Negeri	31.570	29.434	35.023	31.677	127.703	32.628	25.644	32.155	27.907	118.335	36.264
Impor Luar Negeri	51.454	49.719	49.370	53.403	203.947	46.149	31.283	39.251	40.474	157.157	45.064
Net Ekspor Antardaerah	14.938	12.297	6.046	3.215	36.497	10.908	4.104	3.391	1.727	20.130	14.845
Perubahan Inventori	8.490	5.243	4.539	-6.910	11.362	8.432	5.355	5.655	-6.645	12.797	2.211
P D R B	327.730	339.887	350.827	343.123	1.361.567	341.805	324.714	344.114	337.966	1.348.600	345.615

*ANGKA SEMENTARA **ANGKA SANGAT SEMENTARA
SUMBER : BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

3. Kontributor utama perekonomian Jawa Tengah dari sisi permintaan adalah konsumsi RT (pangsa 61,08%), PMTB atau investasi (pangsa 30,42%), impor luar negeri (pangsa 13,04%), ekspor luar negeri (pangsa 10,49%) dan net ekspor antar daerah (pangsa 4,30%).

Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019				2019*	2020*				2020*	2021**
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi Rumah Tangga	142.435	146.169	146.301	147.349	582.253	147.361	139.226	143.542	143.848	573.977	144.582
Konsumsi LNPRT	2.593	2.718	2.600	2.681	10.593	2.544	2.571	2.557	2.604	10.277	2.548
Konsumsi Pemerintah	10.292	14.046	15.582	23.711	63.631	10.589	13.044	15.546	21.717	60.896	10.589
Investasi	70.442	73.210	78.592	76.634	298.877	70.554	64.471	70.688	72.312	278.025	70.011
Ekspor Luar Negeri	21.329	19.822	26.226	21.532	88.909	22.399	18.011	21.853	19.617	81.881	24.207
Impor Luar Negeri	32.730	31.583	32.181	36.677	133.172	33.111	22.437	26.836	27.285	109.669	32.389
Net Ekspor Antardaerah	21.597	21.172	14.885	15.778	73.432	21.397	13.785	12.653	8.611	56.445	22.976
Perubahan Inventori	4.228	2.909	2.619	-2.365	7.390	4.815	5.103	4.966	-1.085	13.797	1.882
P D R B	240.185	248.463	254.623	248.642	991.913	246.548	233.773	244.969	240.339	965.629	244.406

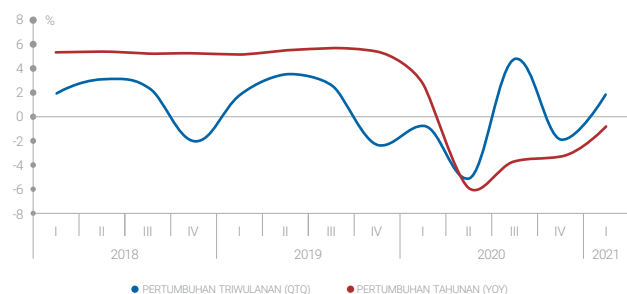
*ANGKA SEMENTARA **ANGKA SANGAT SEMENTARA
SUMBER : BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Pengeluaran (% YOY)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019				2019*	2020*				2020*	2021**
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi Rumah Tangga	4,79	5,16	4,18	4,36	4,62	3,46	-4,75	-1,89	-2,38	-1,42	-1,89
Konsumsi LNPRT	13,85	13,64	8,23	8,15	10,90	-1,88	-5,41	-1,63	-2,88	-2,98	0,13
Konsumsi Pemerintah	5,08	6,51	7,01	0,39	4,04	2,89	-7,14	-0,23	-8,41	-4,30	0,01
Investasi	6,92	4,17	5,54	2,98	4,85	0,16	-11,94	-10,06	-5,64	-6,98	-0,77
Ekspor Luar Negeri	3,74	-2,08	17,87	-0,04	5,10	5,02	-9,13	-16,68	-8,89	-7,90	8,07
Impor Luar Negeri	6,62	-10,16	-16,60	-4,24	-6,70	1,16	-28,96	-16,61	-25,61	-17,65	-2,18
Net Ekspor Antardaerah	6,82	-4,14	-33,70	13,82	-6,59	-0,93	-34,89	-15,00	-45,42	-23,13	7,38
Perubahan Inventori	-6,58	-15,58	-15,40	-13,78	-11,21	13,89	75,43	89,62	-54,11	86,70	-60,92
P D R B	5,12	5,52	5,63	5,33	5,40	2,65	-5,91	-3,79	-3,34	-2,65	-0,87

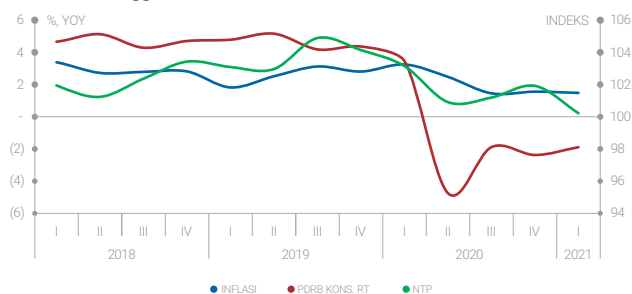
*ANGKA SEMENTARA **ANGKA SANGAT SEMENTARA
SUMBER : BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Grafik 1.7 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Konsumsi Rumah Tangga

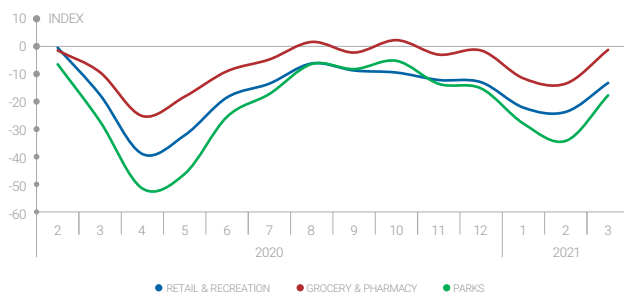
Konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar tumbuh **-1,89% (yoy)** pada triwulan I 2021, lebih baik dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar **-2,38% (yoy)**. Masih terkontraksinya konsumsi rumah tangga seiring kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) periode Januari dan Februari 2021. Namun, *google mobility index* masyarakat Jawa Tengah meningkat setelah dilakukannya pelonggaran PPKM (Maret 2021).

Peningkatan mobilitas pada Maret 2021 terjadi pada pusat perbelanjaan, taman kota, dan transportasi publik.

Peningkatan konsumsi rumah tangga juga dapat dilihat dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan **tingkat keyakinan konsumen berada pada level optimis**. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2021 mencapai 100,47, membaik dibandingkan IKK triwulan IV 2020 (94,66)⁴.

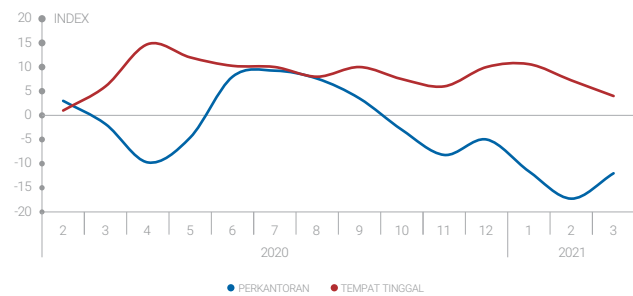
4. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Ekonomi dinyatakan pesimis jika nilainya <100.

Grafik 1.8 Pergerakan Masyarakat di Pusat Perbelanjaan



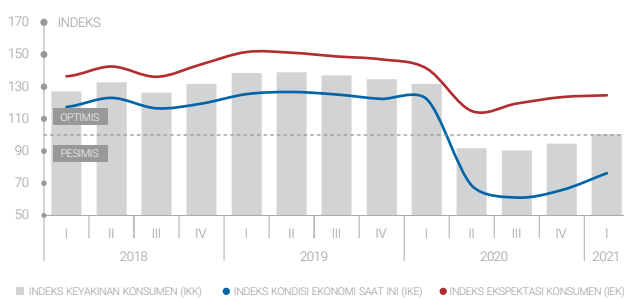
SUMBER: GOOGLE MOBILITY REPORT

Grafik 1.9 Pergerakan Masyarakat di Perkantoran dan Rumah



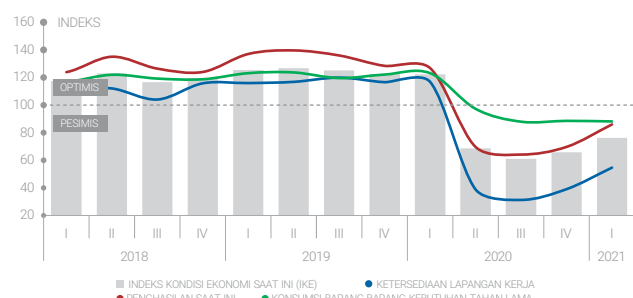
SUMBER: GOOGLE MOBILITY REPORT

Grafik 1.10 Indeks Keyakinan Konsumen



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 1.11 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

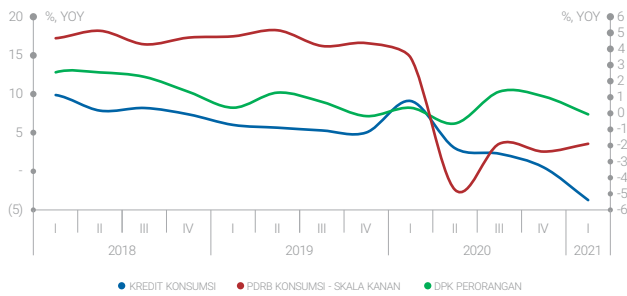
Perbaikan keyakinan terhadap ekonomi rumah tangga ini terjadi pada indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE), yaitu sebesar 76,3, lebih baik dibanding triwulan sebelumnya (65,79). Kondisi ini disebabkan prospek vaksinasi yang secara masif dilakukan diharapkan meredam ketidakpastian akibat COVID-19. Di sisi lain, indeks penghasilan pada triwulan I 2021 meningkat meski masih berada pada level pesimis sebesar 85,99 dari triwulan sebelumnya sebesar 69,71, mendorong sektor rumah tangga memiliki kecenderungan untuk berbelanja.

Lebih lanjut, stimulus fiskal pemerintah melalui bantuan sosial, mendorong konsumsi mengalami perbaikan. Besarnya Bantuan Sosial berupa kebutuhan pokok, bantuan tunai, maupun subsidi listrik, diperkirakan mampu menahan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah lebih dalam. Selain itu, adanya kebijakan relaksasi fiskal pemerintah melalui PMK No.20/PMK.010/2021 dengan memberikan diskon PPnBM untuk pembelian kendaraan Roda 4 yang berlaku pada 1 Maret 2021, mulai mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor meskipun masih pada tingkat yang terbatas.

Walaupun konsumsi rumah tangga mulai membaik, namun belum kembali kepada kondisi normal. Hal ini tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang menunjukkan Indeks Penjualan Riil (IPR) di Jawa Tengah masih mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari -30,72% (yoy) menjadi

-41,56% (yoy). Penurunan terjadi pada kelompok makanan dan minuman serta perlengkapan rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tertahan, menunggu hari besar keagamaan nasional. Hal ini masih sejalan dengan pola historis konsumsi domestik Jawa Tengah yang memang mengalami pelemahan pada satu periode sebelum hari raya Lebaran.

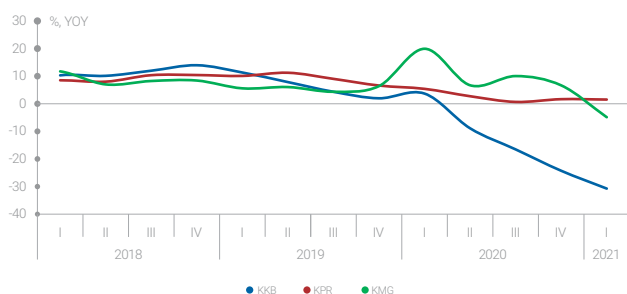
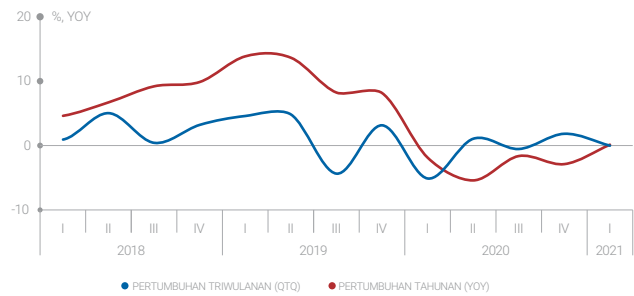
Selain itu, penghasilan masyarakat di sektor pertanian mengalami pelemahan. Kondisi penghasilan masyarakat pertanian yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2021 sebesar 100,22, menurun dari triwulan sebelumnya (100,92). Penurunan NTP disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami penurunan -0,47% lebih rendah dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 1,22% akibat merosotnya harga gabah di tingkat petani, dampak dari puncak panen raya khususnya tanaman pangan di Jawa Tengah. Sementara, golongan masyarakat Jawa Tengah lainnya belum sepenuhnya mengalami perbaikan penghasilan karena masih terkontraksinya konsumsi domestik. Masyarakat yang bekerja pada sektor industri dan perdagangan masih harus menahan konsumsi karena kondisi sektor yang belum tumbuh positif meski lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, konsumsi masyarakat yang bekerja di sektor konstruksi mulai meningkat karena kondisi sektor yang sudah tumbuh positif.

Grafik 1.12 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Pada indikator lainnya, terjadi perlambatan penyaluran kredit konsumsi di Jawa Tengah dari 0,50% (yoy) menjadi -3,73% (yoy). Kredit Multiguna (KMG) dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami pelemahan. Kinerja penyaluran KMG tumbuh negatif (-4,87%; yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 6,67% (yoy), sedangkan KKB melanjutkan tren pertumbuhan negatif triwulan sebelumnya dengan tumbuh -30,74% (yoy). Sementara itu, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tumbuh sebesar 1,52% (yoy) meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 1,66% (yoy). Selain disebabkan masih terbatasnya penghasilan dan lapangan kerja, rendahnya tendensi untuk melakukan konsumsi khususnya terhadap barang tahan lama sebagai dampak ketidakpastian ekonomi akibat COVID-19, diperkirakan menjadi pendorong masih rendahnya kinerja kredit konsumsi.

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada triwulan I 2021 tumbuh sebesar 0,13% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat -2,98% (yoy). Perbaikan tersebut didorong oleh percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah, khususnya belanja barang dan jasa.

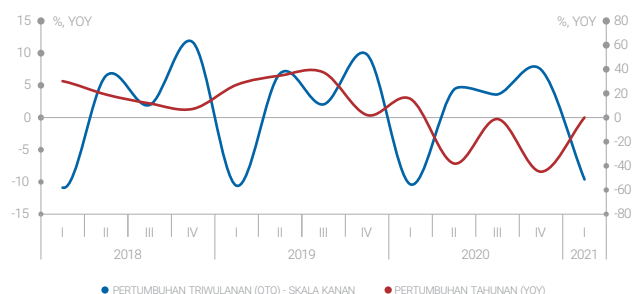
Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi**Grafik 1.14 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT**

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

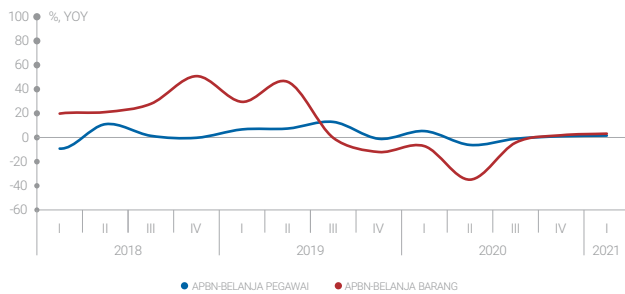
Konsumsi Pemerintah

Sejalan dengan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah mengalami peningkatan pada triwulan I 2021. Konsumsi pemerintah tumbuh 0,01% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh -8,41% (yoy). Secara triwulanan, konsumsi pemerintah berkontraksi -51,24% (qtq) pada triwulan ini, meningkat dibandingkan triwulan I 2020 (-55,34%; qtq).

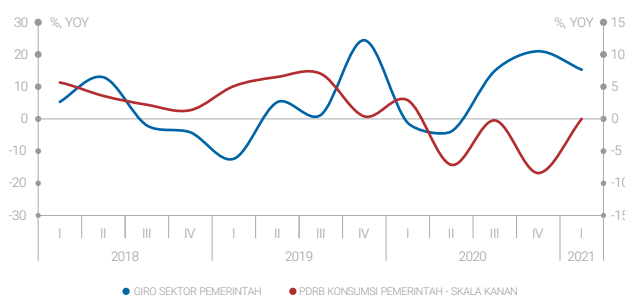
Realisasi belanja barang yang bersumber dari APBN mengalami perbaikan dari 1,83% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi 3,17% (yoy) pada triwulan laporan. Selain itu, realisasi belanja pegawai meningkat menjadi 1,59% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 1,03% (yoy). Sementara itu, belanja sosial tumbuh sebesar 11,57% (yoy). Realisasi terbesar komponen belanja ini terjadi pada belanja bantuan bahan pangan dan belanja langsung tunai. Di tengah pandemi yang terjadi, selain penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah menunjukkan komitmen dalam menjaga daya beli kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Di sisi lain, penurunan giro pemerintah di perbankan Jawa Tengah sebesar 15,26% (yoy) lebih disebabkan realisasi program kerja untuk penanggulangan penyebaran COVID-19.

Grafik 1.15 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

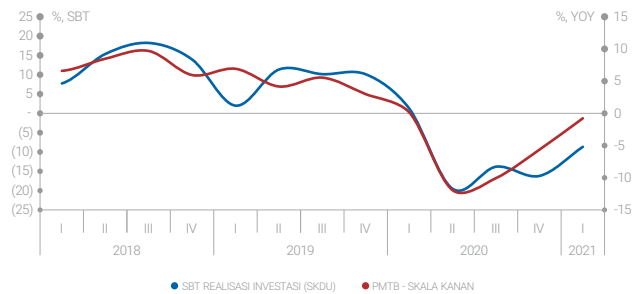
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.16 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

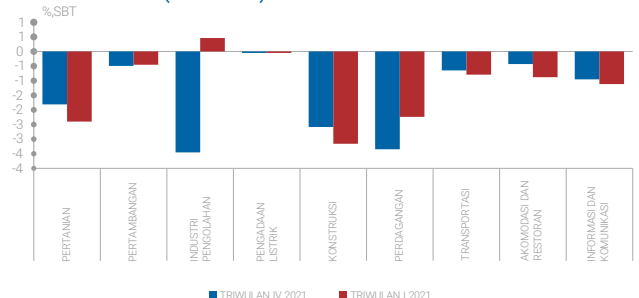
SUMBER: BIRO KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.17 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

SUMBER: LAPORAN BANK UMUM, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.19 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi

SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

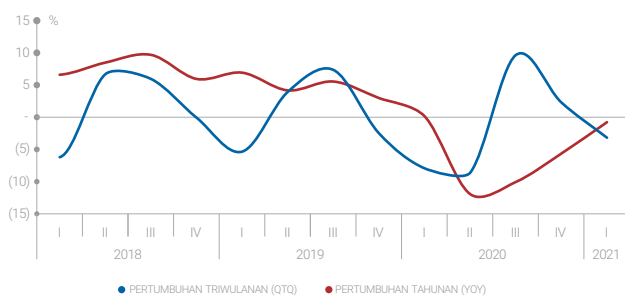
Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)

SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

1.1.1.2 Pengeluaran Investasi

Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian Jawa Tengah, kinerja investasi juga mulai menunjukkan perbaikan. Pada triwulan I 2021, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar -0,77% (yoy), walaupun masih berkontraksi namun membaik dibandingkan triwulan lalu (-5,64%; yoy). Secara triwulanan, investasi tumbuh -3,18% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan yang sama di 2020 yang berkontraksi -7,93% (qtq).

Perbaikan kinerja investasi diindikasikan terjadi baik pada investasi bangunan maupun nonbangunan. Pelonggaran pembatasan sosial menyebabkan aktivitas pembangunan mulai meningkat. Pembangunan proyek strategis nasional yang sempat

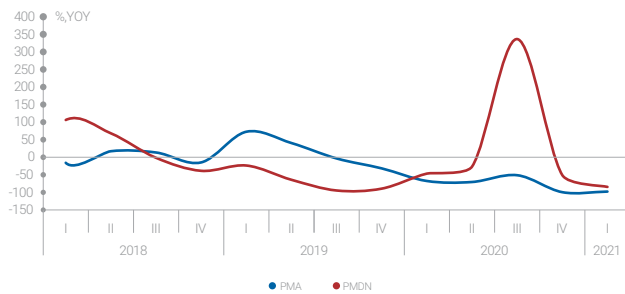
Grafik 1.18 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

tertunda, mulai digerakkan, seperti tol Semarang-Demak, tol Solo-Jogja, dan peningkatan kualitas destinasi Borobudur, serta infrastruktur kawasan industri terpadu (KIT) Batang mengalami perkembangan amenities yang cukup pesat di awal tahun 2021. Pada sektor swasta, rencana investasi besar mulai direalisasikan pada 2021 seperti pembangunan pabrik baru. Kondisi tersebut tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi investasi (dari -16,20 menjadi -8,67), khususnya pada sektor industri pengolahan. Dalam mengakomodir peningkatan *order* yang terjadi, pelaku usaha berinvestasi dengan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi. Hasil SKDU menunjukkan kapasitas utilisasi pelaku usaha meningkat dari 70,42% pada triwulan IV 2020 menjadi 71,15% pada triwulan I 2021. Adapun peningkatan *order* tersebut terutama bersumber dari permintaan luar negeri.

Selain itu, meningkatnya investasi besar pelaku usaha juga terlihat dari peningkatan realisasi penanaman modal pada triwulan I 2021. Nilai penanaman modal asing pada triwulan laporan meningkat dengan realisasi sebesar USD 55,31 juta; atau tumbuh menjadi sebesar -97,74% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar -99,45% (yoy). Hal tersebut menunjukkan kepercayaan dunia atas iklim investasi serta potensi investasi mulai kembali tumbuh di Indonesia. Seperti halnya investor asing, nilai

Grafik 1.21 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri



SUMBER: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, DIOLAH

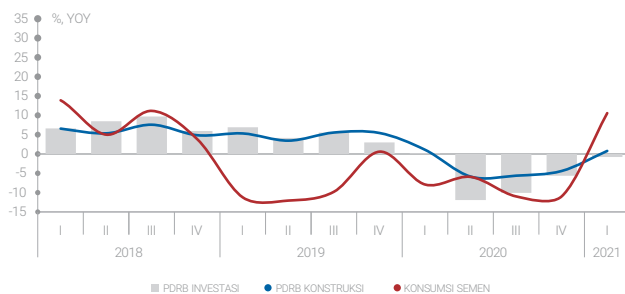
penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp651 miliar pada triwulan laporan dari triwulan sebelumnya sebesar Rp218 miliar, meski secara tahunan tercatat masih berkontraksi -84,46% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar -50,84% (yoy). Sektor tekstil, alas kaki, kayu, mineral nonlogam, makanan, dan perdagangan, menjadi favorit investor melihat prospek ke depan yang menjanjikan.

Dari sisi pembiayaan, mulai membaiknya kinerja investasi didukung dengan masih tingginya pertumbuhan kredit investasi perbankan. Kredit perbankan untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah tumbuh 12,15% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (15,94%; yoy) namun lebih tinggi dibanding kredit lainnya seperti konsumsi dan modal kerja. Masih tingginya pertumbuhan kredit investasi dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi Jawa Tengah ke depan. Investor pun terindikasi akan mulai bergerak melakukan investasi dengan melihat prospek pemulihan disertai tingkat suku bunga yang sedang dalam tren rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata tertimbang suku bunga kredit investasi saat ini sebesar 8,05%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,24%.

Sementara itu, kinerja investasi bangunan dan perkembangan proyek infrastruktur pemerintah mengalami perbaikan.

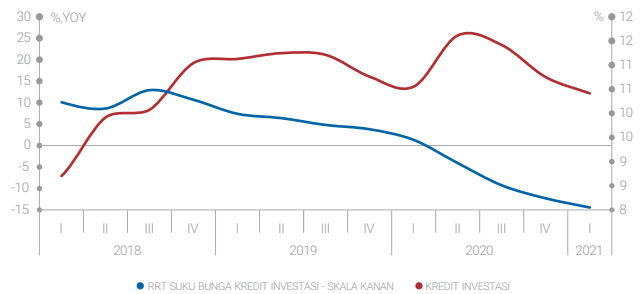
Perkembangan yang dilakukan lebih banyak untuk pembebasan lahan dan konstruksi beberapa proyek seperti tol Semarang-

Grafik 1.22 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen



SUMBER: ASI, BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Grafik 1.23 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi



SUMBER: LAPORAN BANK UMUM

Demak, Yogya-Bawen, Solo-Yogya, pengembangan kualitas Candi Borobudur, dan infrastruktur kawasan industri terpadu (KIT) Batang. Pelonggaran kegiatan masyarakat mendorong peningkatan aktivitas konstruksi dalam mengejar target percepatan pembangunan. Peningkatan investasi bangunan tercermin dari realisasi pengadaan semen yang membaik menjadi 10,57% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-10,97%; yoy). Relokasi pabrik dan pembangunan pabrik baru pada sektor tekstil dan alas kaki, yang direncanakan terjadi pada 2020, akan direalisasikan pada 2021.

1.1.1.3 Ekspor dan Impor Luar Negeri

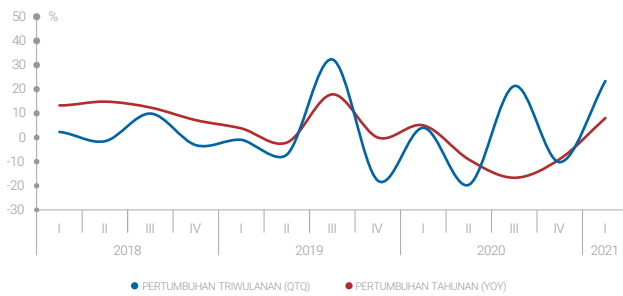
Perbaikan ekonomi Jawa Tengah di triwulan I 2021 tercermin dari aktivitas perdagangan luar negeri. Peningkatan kinerja terjadi baik pada sisi ekspor maupun impor. Defisit neraca perdagangan (harga berlaku) sebesar Rp8,8 triliun atau menurun dibanding defisit triwulan sebelumnya Rp12,6 triliun. Perbaikan perekonomian ditunjukkan dari membaiknya ekspor terutama didorong oleh komoditas ekspor unggulan tekstil dan produk tekstil (TPT), *furniture*, serta alas kaki.

1.1.1.3.1 Ekspor Luar Negeri

Ekspor luar negeri merupakan komponen yang turut mendorong perbaikan perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2021.

Ekspor luar negeri Jawa Tengah mengalami pertumbuhan positif pertama kalinya selama pandemi sebesar 8,07% (yoy) pada triwulan I 2021, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-8,89%; yoy). Perbaikan kinerja ekspor terjadi pada komponen migas dan nonmigas. Ekspor migas Jawa Tengah juga tumbuh 36,18% (yoy) pada triwulan I 2021, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 19,97% (yoy). Sementara itu, ekspor nonmigas yang tumbuh 12,31% (yoy) pada triwulan I 2021, terutama didorong oleh komoditas ekspor unggulan tekstil dan produk tekstil (TPT), *furniture*, serta alas kaki masing-masing sebesar 8,85% (yoy), 27,15% (yoy), dan 21,59% (yoy). Realisasi *order* yang tertunda selama tahun 2020 serta penambahan *order* baru di tahun 2021 menjadi pendorong peningkatan tersebut.

Grafik 1.24 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

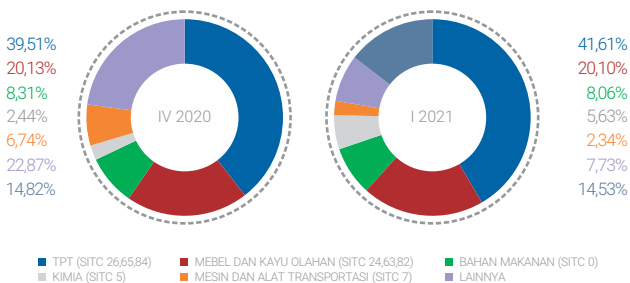


SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah didominasi oleh ekspor unggulan tekstil dan produk tekstil TPT⁵ dengan pangsa terhadap total ekspor 41,61%, kayu dan barang dari kayu⁶ dengan pangsa 20,10%, serta alas kaki⁷ dengan pangsa 8,06%. Peningkatan permintaan pada yarn, kain, dan pakaian membuat pangsa tekstil dan produk tekstil mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 41,61%. Pangsa alas kaki juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,04% seiring dengan peningkatan permintaan global yang didorong oleh peningkatan ekspor sepatu klasik⁸. Selain ketiga kelompok komoditas tersebut, ekspor bahan makanan (SITC 0), ekspor permesinan dan alat transportasi (SITC 7), serta ekspor kimia (SITC 5) juga turut berperan walaupun dengan pangsa masing-masing yang berada di bawah 8%.

Berdasarkan komoditas, pendorong utama perbaikan ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah adalah TPT. Pada triwulan I 2021, ekspor TPT tumbuh positif 2,17% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (-15,63%; yoy). Transformasi produksi tekstil ke arah yang mendukung kesehatan menjadi tumpuan ekspor Jawa Tengah. Order dari brand besar mulai mengalami peningkatan (Eco Smart Garment). Selain dari pembeli yang lama, berbagai pelaku usaha juga melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor dan mencatat adanya penambahan pangsa ekspor baru dari kawasan Bangladesh dan Honduras.

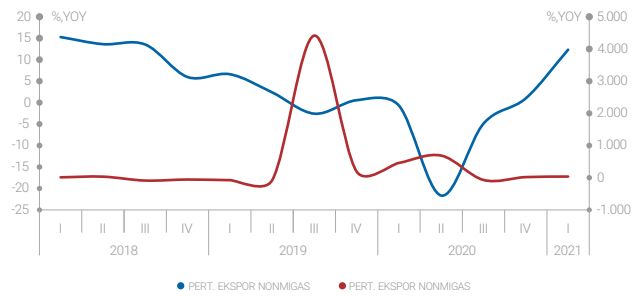
Grafik 1.26 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas



SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

5. Standard International Trade Classification kode 26,65 dan 84
6. Standard International Trade Classification kode 24,63 dan 82
7. Standard International Trade Classification kode 85

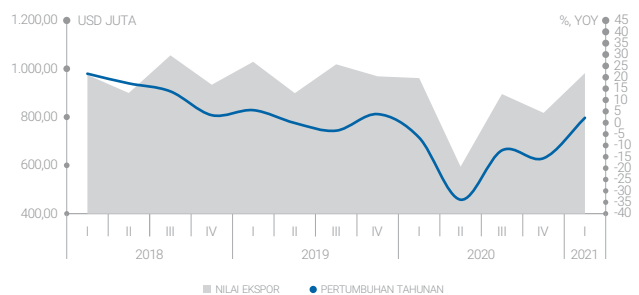
Grafik 1.25 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri Jawa Tengah per Jenis Komoditas



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

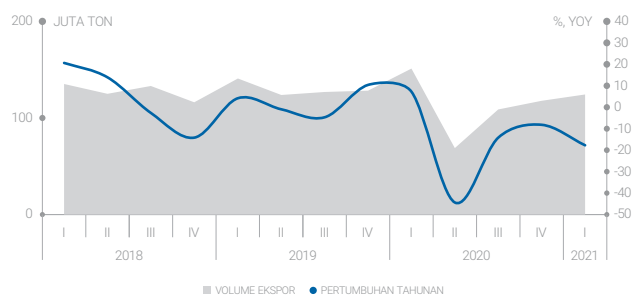
Selain ekspor TPT, perbaikan ekspor luar negeri nonmigas juga didorong oleh ekspor kayu dan barang dari kayu. Pada triwulan I 2021, ekspor kayu dan barang dari kayu tumbuh positif 19,17% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (6,14%; yoy). Peningkatan kinerja tersebut terutama terjadi pada komoditas kayu, *lumber*, dan *cork* yang tumbuh 28,53%, serta komoditas furnitur yang tumbuh 27,15% (yoy). Meski pandemi COVID-19 masih melanda secara global, permintaan kedua komoditas dari Jawa Tengah tersebut justru mengalami peningkatan. Selain dari pembeli yang lama, terdapat penambahan negara tujuan ekspor dari berbagai negara kawasan Eropa, Timur Tengah, hingga Australia.

Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT



SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

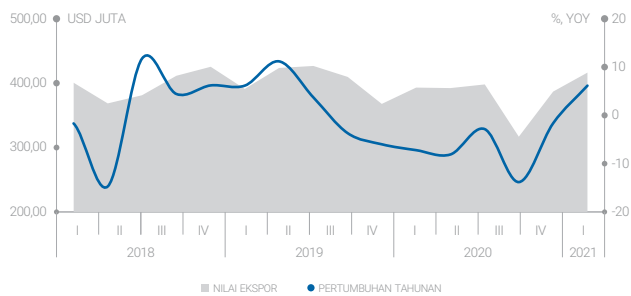
Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT



SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

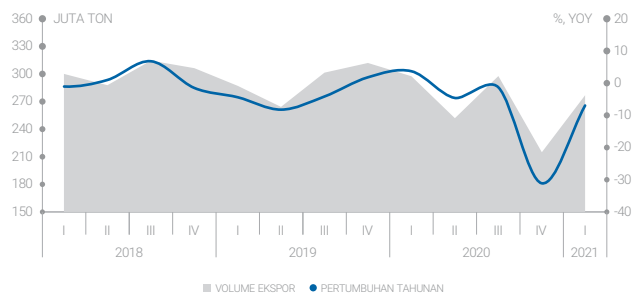
8. Sepatu klasik merupakan sepatu casual dengan model standart yang dijual dengan harga dibawah Free on Board (FOB) 20 USD dollar

Grafik 1.29 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu



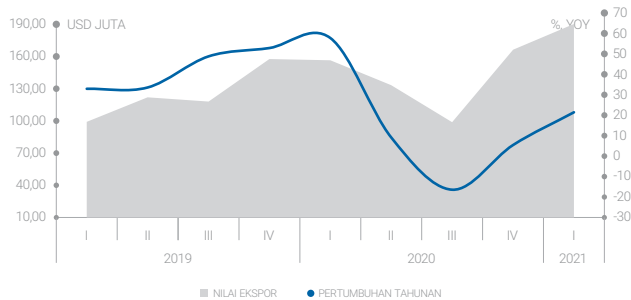
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

Grafik 1.30 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu



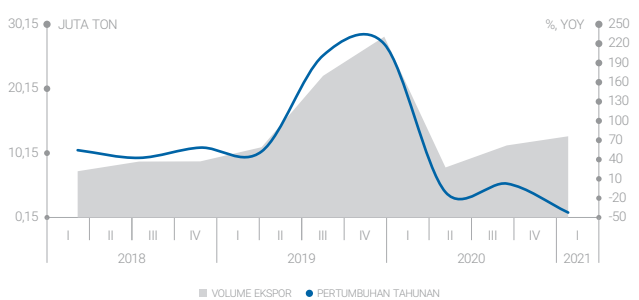
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

Grafik 1.31 Pertumbuhan Nilai Ekspor Alas Kaki



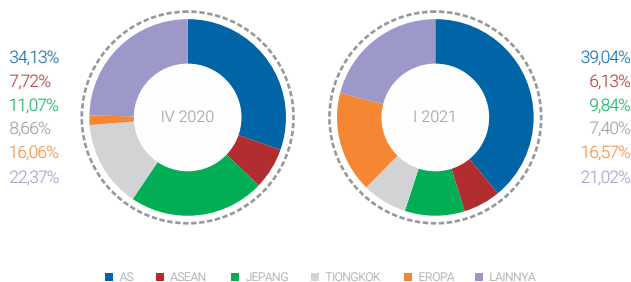
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

Grafik 1.32 Pertumbuhan Volume Ekspor Alas Kaki



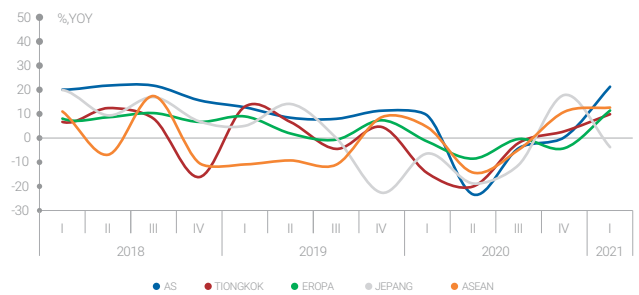
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

Grafik 1.33 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan



SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

Grafik 1.34 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan



SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIOLAH

Selain dua komoditas ekspor tersebut, perbaikan ekspor luar negeri nonmigas juga didorong oleh ekspor alas kaki. Pada triwulan I 2021, ekspor alas kaki tumbuh positif 21,59% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya (5,53%; yoy). Kinerja ekspor luar negeri terus membaik seiring meningkatnya permintaan global yang didorong oleh peningkatan ekspor sepatu klasik⁹. Permintaan alas kaki Amerika Serikat, Euro, dan Asia terus tumbuh. Peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan produk alas kaki dari beberapa daerah lain. Saat ini, pasar ekspor Jawa Tengah bisa mencapai 30%-40% dari nasional (hasil FGD dengan Aprisindo Jateng, 2021).

Berdasarkan mitra dagang utama, negara tujuan ekspor Jawa Tengah untuk ekspor nonmigas masih didominasi oleh Amerika Serikat, Eropa dan Jepang dengan pangsa masing-masing sebesar 39,04%, 16,57% dan 9,84%. Berdasarkan pertumbuhannya, perbaikan kinerja terjadi pada ekspor ke Amerika Serikat (dari 0,36%; yoy menjadi 21,26%; yoy) dan Eropa (dari -4,19%; yoy menjadi 111,41%; yoy). Pertumbuhan ekspor nonmigas pada kedua negara tersebut didorong peningkatan permintaan pada komoditas TPT dan alas kaki.

9. Sepatu klasik merupakan sepatu casual dengan model standart yang dijual dengan harga dibawah Free on Board (FOB) 20 USD dollar

1.1.1.3.2 Impor Luar Negeri

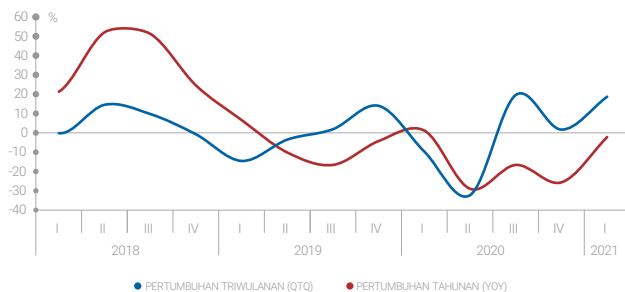
Kinerja impor luar negeri didorong oleh perbaikan impor migas dan nonmigas Jawa Tengah yang mengalami kenaikan pada triwulan I 2021. Impor migas Jawa Tengah tumbuh -7,7% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang sebesar -60,8% (yoy). Konsumsi bahan bakar masyarakat Jawa Tengah meningkat seiring dengan berangsur pulihnya aktivitas industri dan mobilitas masyarakat pada triwulan I 2021. Hal tersebut mendorong peningkatan impor migas di Jawa Tengah. Peningkatan impor migas dapat dilihat dari kenaikan harga minyak dunia. Rata-rata harga minyak WTI menjadi USD58,142 per barel, meningkat sebesar 26,95% (yoy) pada triwulan I 2021. Meningkatnya level harga minyak mengindikasikan konsumsi

global mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan konsumsi bahan bakar domestik seiring dengan berangsur pulihnya aktivitas industri dan pelonggaran pembatasan sosial.

Selain itu, kinerja impor luar negeri nonmigas Jawa Tengah juga mengalami kenaikan pada triwulan I 2021 sejalan dengan kenaikan ekspor nonmigas. Impor Jawa Tengah nonmigas masih terkontraksi 5,67% (yoy), namun lebih baik dari kontraksi triwulan IV 2020 yang sebesar -19,30% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, secara agregat impor luar negeri meningkat dari -25,61% (yoy) menjadi -2,18% (yoy) pada triwulan laporan. Sejalan dengan pertumbuhan tahunan, pertumbuhan triwulanan impor luar negeri tumbuh positif 18,71% (qtq) sehingga menguatkan perbaikan ekonomi Jawa Tengah yang masih terus berlangsung.

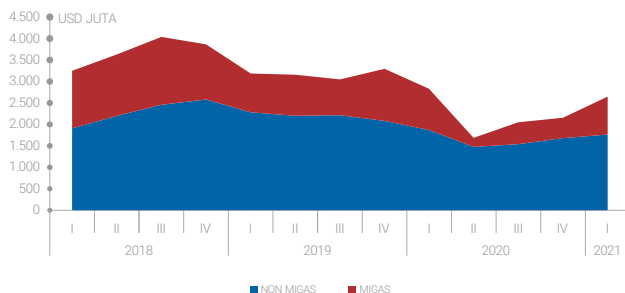
Berdasarkan penggunaannya, peningkatan impor nonmigas utamanya didorong pertumbuhan positif impor bahan baku. Pada triwulan I 2021, impor nonmigas Jawa Tengah tumbuh -5,67% (yoy), lebih baik dibanding triwulan sebelumnya (-19,30%; yoy). Perbaikan impor nonmigas disebabkan oleh impor barang bahan baku yang tumbuh 10,46% (yoy), dari triwulan sebelumnya -12,85% (yoy). Impor barang konsumsi tumbuh 16,50% (yoy) meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya (28,24%; yoy). Sementara,

Grafik 1.35 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri



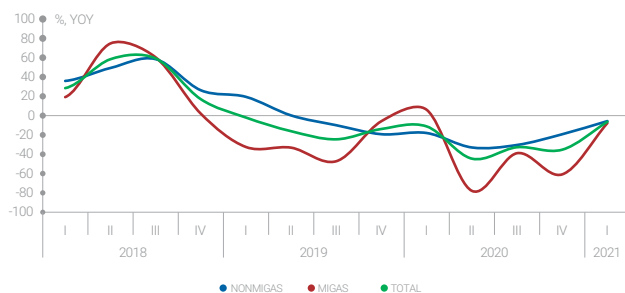
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Grafik 1.36 Perkembangan Impor Jawa Tengah



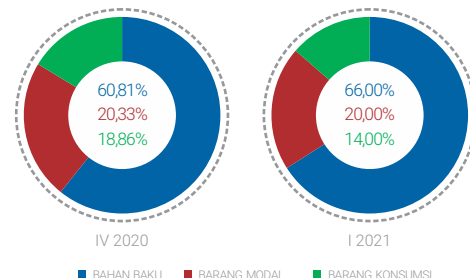
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.37 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah



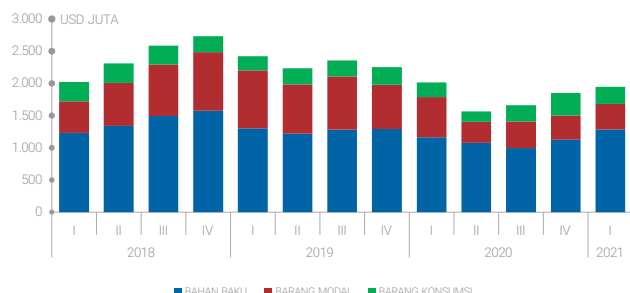
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.38 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran



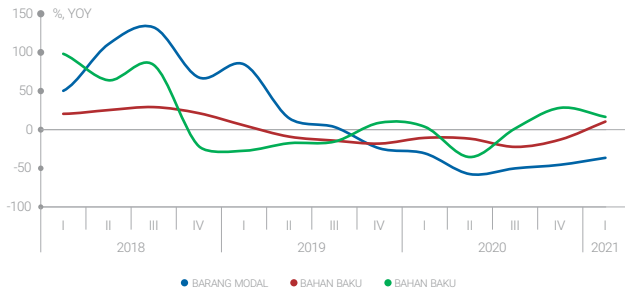
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DIOLAH

Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran



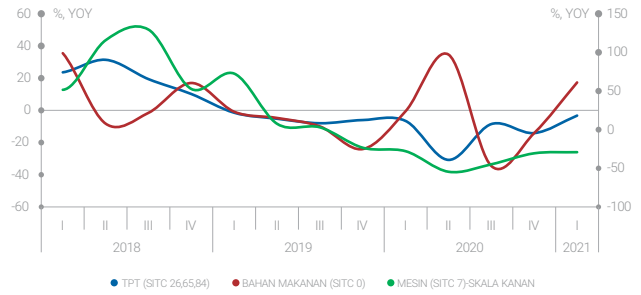
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DIOLAH

Grafik 1.40 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan



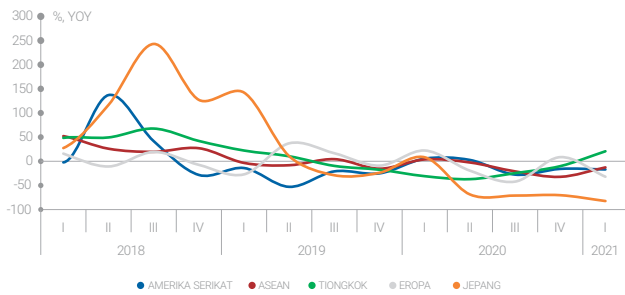
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DIOLAH

Grafik 1.41 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas



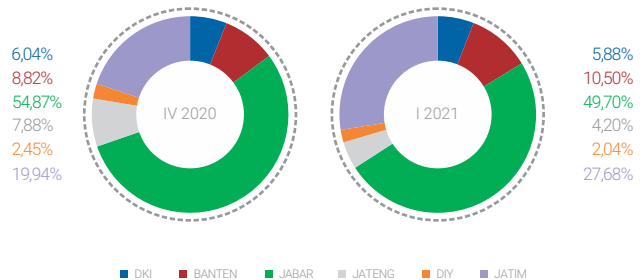
SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DIOLAH

Grafik 1.42 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal



SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DIOLAH

Grafik 1.43 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah



SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DIOLAH

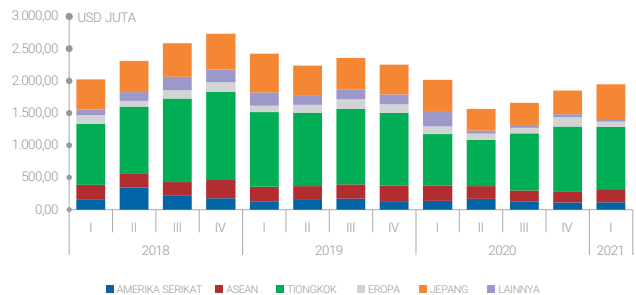
impor barang modal membaik dari -45,42% (yoy) menjadi -36,26% (yoy). Perbaikan impor bahan baku untuk mengakomodir peningkatan permintaan yang mulai terjadi pada akhir 2020, sehingga mendorong kebutuhan bahan baku industri. Sementara, impor barang konsumsi didorong komoditas kendaraan impor beserta suku cadangnya yang diindikasikan untuk masyarakat golongan menengah atas. Pembangunan infrastruktur juga terpantau mulai menggeliat seperti impor kebutuhan infrastruktur listrik di Jawa Tengah sehingga mendorong perbaikan impor barang modal.

Berdasarkan lapangan usaha, perbaikan pertumbuhan impor bahan baku pada triwulan laporan disebabkan oleh impor kebutuhan produksi TPT dan bahan makanan. Impor benang tekstil mengalami peningkatan karena kualitas bahan baku yang diinginkan pembeli belum tersedia di industri dalam negeri. Kebutuhan produksi pakaian rajutan membutuhkan benang khusus yang banyak didatangkan dari luar negeri. Meskipun begitu, beberapa kebutuhan bahan baku produksi lainnya mulai disediakan dari dalam negeri sehingga peningkatan impor bahan baku masih terbatas.

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Jawa Tengah terutama berasal dari Tiongkok (pangsa 49,70%), ASEAN (10,50%), Amerika Serikat (5,88%), dan Eropa (4,20%). Pada

periode laporan, perbaikan pertumbuhan impor luar negeri terutama bersumber dari Tiongkok yang tumbuh 20,71% (yoy), membaik dari -10,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pembukaan kebijakan *lockdown* pemerintah Tiongkok lebih awal dibanding negara lainnya mendorong impor dari Tiongkok kembali meningkat. Sementara, impor dari negara lainnya selain negara utama juga mengalami peningkatan seiring upaya pelaku usaha mencari alternatif negara asal bahan baku karena adanya kenaikan *shipping cost* di Tiongkok. Sementara impor dari negara Eropa menurun akibat adanya kebijakan *lockdown* akibat varian baru COVID-19 membayangi berbagai negara di kawasan Eropa.

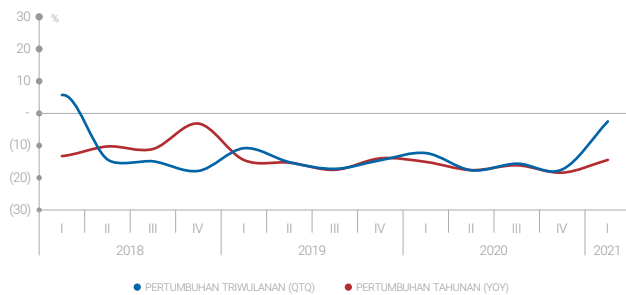
Grafik 1.44 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal



SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DIOLAH

1.1.1.4 Net Ekspor Antardaerah

Grafik 1.45 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Pada triwulan laporan, pertumbuhan net ekspor antardaerah meningkat dengan tumbuh sebesar 7,38% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2020 (-45,42%; yoy). Peningkatan tersebut diindikasikan berasal dari peningkatan ekspor antar daerah yang lebih tinggi dibanding impor antardaerah. Sebagai salah satu daerah dengan produksi pertanian dan industri yang tinggi, Jawa Tengah menjadi sumber kebutuhan konsumsi maupun produksi di daerah lain. Pada triwulan I 2021, produksi pertanian meningkat cukup tinggi bersumber dari panen komoditas tanaman pangan terutama padi.

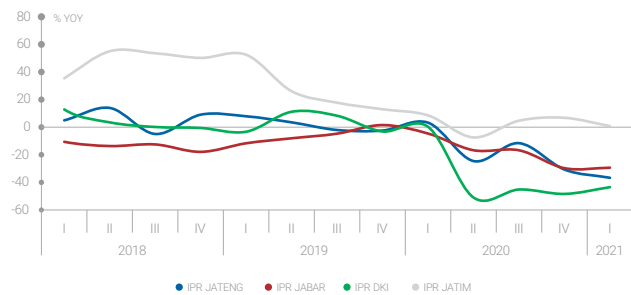
Perbaikan net ekspor antar daerah dapat juga dilihat dari perbaikan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada daerah mitra dagang daerah utama Jawa Tengah yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. IPR DKI Jakarta tumbuh menjadi -43,48% (yoy) dari -48,37% (yoy) sedangkan IPR Jawa Barat tumbuh menjadi -29,37% (yoy) dari -29,71% (yoy) pada triwulan IV 2020. Meskipun di triwulan I 2021 terdapat pembatasan PSBB/PPKM, tetapi tidak mengganggu aktivitas pemenuhan permintaan akibat adanya pengecualian untuk kendaraan logistik pangan, dll.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2021 didominasi dari tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (pangsa 34,05%); pertanian, kehutanan dan perikanan (pangsa 14,78%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (pangsa 13,79%). Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

Perbaikan perekonomian pada triwulan I 2021 terjadi pada hampir seluruh sektor. Lapangan usaha pertanian tumbuh signifikan sebesar 13,89% (yoy) dari sebelumnya 7,56% (yoy), didorong peningkatan panen pada tanaman pangan. Selain itu, sektor konstruksi juga membaik sejalan dengan meningkatnya

Grafik 1.46 Indeks Penjualan Riil



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

pembangunan (investasi bangunan) proyek strategis nasional yang tercermin dari peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor ini menjadi 0,29% (yoy). Kredit konstruksi menurun 6,25% (yoy) dari sebelumnya 8,25% (yoy) mencerminkan aktivitas konstruksi tersebut masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur publik.

Beberapa sektor yang tumbuh melambat selama triwulan I 2021 diantaranya LU informasi dan Komunikasi serta jasa kesehatan. Meskipun LU Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,87% (yoy), namun tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya (14,82% ; yoy). Sementara itu, LU Jasa Kesehatan tumbuh 0,25% (yoy), lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 9,19% (yoy).

Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2019			2019	2020*				2020*	2021**
	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47.509	50.951	39.864	184.225	44.703	49.778	54.985	43.422	192.889	51.076
Pertambangan dan Penggalian	8.548	8.352	8.557	33.728	8.627	7.914	8.335	8.207	33.083	8.592
Industri Pengolahan	116.595	119.483	120.329	468.885	118.444	114.147	115.739	117.164	465.494	117.695
Pengadaan Listrik dan Gas	313	325	345	1.294	323	307	335	345	1.310	338
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	196	195	210	790	210	213	215	218	855	221
Konstruksi	35.463	38.331	38.472	147.206	35.452	33.487	36.327	36.940	142.206	36.594
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.076	47.853	47.228	187.064	47.402	42.440	45.422	46.588	181.853	47.653
Transportasi dan Pergudangan	11.024	11.031	11.368	43.834	10.896	4.088	7.000	7.848	29.832	7.774
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.840	11.009	11.379	43.635	10.985	8.658	10.263	10.455	40.360	10.567
Informasi dan Komunikasi	12.293	12.470	12.827	49.587	13.412	14.631	14.658	14.727	57.429	14.731
Jasa Keuangan dan Asuransi	9.542	9.898	10.331	39.406	10.593	9.606	9.891	10.130	40.219	10.403
Real Estate	5.721	5.789	5.829	22.920	5.825	5.594	5.768	5.823	23.011	5.879
Jasa Perusahaan	1.439	1.458	1.461	5.712	1.471	1.215	1.322	1.409	5.418	1.422
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.320	9.041	9.557	36.431	8.790	9.103	9.132	9.433	36.457	8.628
Jasa Pendidikan	15.369	15.944	16.512	62.397	15.746	15.616	16.075	16.426	63.862	15.612
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.043	3.062	3.229	12.275	3.313	3.343	3.411	3.591	13.658	3.323
Jasa lainnya	5.596	5.635	5.627	22.177	5.613	4.575	5.236	5.240	20.665	5.109
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	339.887	350.827	343.123	1.361.567	341.805	324.714	344.114	337.966	1.348.600	345.615

*ANGKA SEMENTARA **ANGKA SANGAT SEMENTARA
SUMBER : BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2019			2019	2020*				2020*	2021**
	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.448	33.766	26.221	123.196	29.304	32.752	35.997	28.204	126.256	33.373
Pertambangan dan Penggalian	5.457	5.343	5.440	21.557	5.583	5.199	5.370	5.233	21.385	5.349
Industri Pengolahan	84.646	86.238	86.161	338.820	84.237	80.912	80.114	80.902	326.165	80.921
Pengadaan Listrik dan Gas	265	272	287	1.085	274	262	282	287	1.105	287
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	173	173	174	688	173	175	176	179	703	180
Konstruksi	24.899	26.864	26.906	103.262	24.860	23.442	25.355	25.723	99.381	25.056
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	36.457	36.905	36.308	144.730	36.210	32.691	34.841	35.484	139.227	36.008
Transportasi dan Pergudangan	8.719	8.748	9.011	34.848	8.624	3.231	5.451	5.990	23.296	5.948
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.305	8.429	8.677	33.442	8.352	6.684	7.810	7.929	30.774	7.970
Informasi dan Komunikasi	12.601	12.745	13.120	50.789	13.713	14.968	14.995	15.064	58.739	15.067
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.422	6.670	6.933	26.535	7.092	6.518	6.691	6.771	27.072	6.831
Real Estate	4.692	4.741	4.765	18.782	4.759	4.558	4.690	4.723	18.730	4.757
Jasa Perusahaan	1.009	1.010	1.011	3.990	1.011	833	902	957	3.703	964
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.204	6.163	6.691	25.034	6.068	6.120	6.127	6.390	24.706	5.963
Jasa Pendidikan	9.618	9.971	10.249	39.041	9.623	9.544	9.785	9.995	38.948	9.496
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.167	2.175	2.274	8.738	2.291	2.321	2.359	2.483	9.454	2.297
Jasa lainnya	4.383	4.411	4.414	17.376	4.373	3.563	4.023	4.025	15.984	3.941
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	248.463	254.623	248.642	991.913	246.548	233.773	244.969	240.339	965.629	244.406

*ANGKA SEMENTARA **ANGKA SANGAT SEMENTARA
SUMBER : BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha (% YOY)

LAPANGAN USAHA	2019			2019	2020*				2020*	2021**
	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,65	-1,55	1,56	1,36	-4,73	0,94	6,61	7,56	2,48	13,89
Pertambangan dan Penggalian	3,14	2,46	2,04	3,36	4,99	-4,74	0,52	-3,79	-0,80	-4,19
Industri Pengolahan	4,53	6,78	5,28	5,19	3,01	-4,41	-7,10	-6,10	-3,74	-3,94
Pengadaan Listrik dan Gas	4,81	4,83	6,05	5,48	4,60	-1,29	3,88	0,10	1,79	4,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,35	4,68	5,01	4,42	3,04	1,15	2,19	2,79	2,29	4,27
Konstruksi	3,45	5,55	5,43	4,95	1,08	-5,85	-5,62	-4,40	-3,76	0,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,55	6,59	4,05	5,98	3,28	-10,33	-5,59	-2,27	-3,80	-0,56
Transportasi dan Pergudangan	8,32	8,27	7,56	8,49	3,03	-62,95	-37,68	-33,53	-33,15	-31,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,39	10,33	10,78	9,14	3,98	-19,52	-7,34	-8,62	-7,98	-4,57
Informasi dan Komunikasi	12,41	11,52	10,49	11,62	11,27	18,79	17,65	14,82	15,65	9,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,18	4,47	6,70	3,51	8,93	1,50	0,32	-2,33	2,03	-3,68
Real Estate	6,26	6,22	5,38	5,53	3,82	-2,85	-1,07	-0,90	-0,28	-0,05
Jasa Perusahaan	9,66	13,53	10,24	10,54	5,35	-17,47	-10,66	-5,36	-7,19	-4,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,68	4,16	3,07	3,71	1,56	-1,35	-0,58	-4,50	-1,31	-1,74
Jasa Pendidikan	7,19	6,82	8,96	7,59	4,56	-0,76	-1,86	-2,48	-0,24	-1,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,89	5,11	5,12	6,72	7,99	7,12	8,43	9,19	8,19	0,25
Jasa lainnya	9,99	9,32	7,19	9,02	4,93	-18,70	-8,80	-8,81	-8,01	-9,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,52	5,64	5,34	5,41	2,65	-5,91	-3,79	-3,34	-2,65	-0,87

*ANGKA SEMENTARA **ANGKA SANGAT SEMENTARA
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

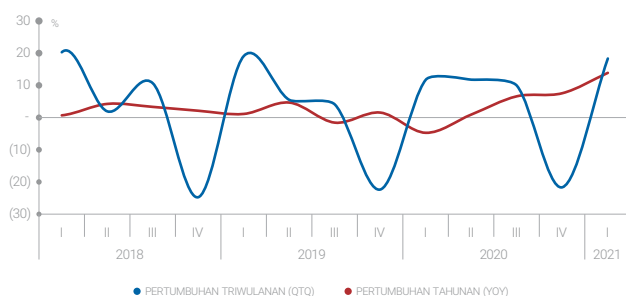
1.1.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh **13,89% (yoy)**, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh **7,56% (yoy)**. Secara triwulanan, lapangan usaha ini tumbuh positif 18,33% (qtq), lebih baik dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar -21,65% (qtq).

Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan laporan didorong oleh produksi pada subsektor tanaman pangan terutama padi. Berdasarkan hasil FGD, peningkatan pertumbuhan di triwulan I 2021 disebabkan oleh luas panen yang mengalami peningkatan di triwulan I 2021. Pertumbuhan sektor pertanian terutama didorong oleh kondisi iklim yang mendukung panen secara optimal. Berdasarkan *monitoring* BMKG selama

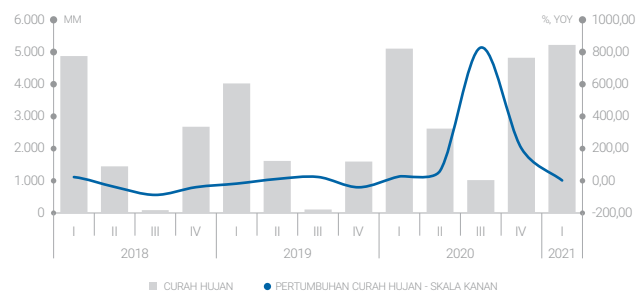
triwulan I 2021, curah hujan di Jawa Tengah cukup baik dalam mendukung panen komoditas pertanian padi dengan tumbuh 2,23% (yoy). Pada triwulan laporan, hasil panen komoditas padi yang merupakan komoditas pertanian utama Jawa Tengah mengalami peningkatan. Data perkiraan Dinas Pertanian menunjukkan peningkatan luas panen komoditas padi sebesar 81,10% (yoy). Luas panen padi pada triwulan I 2021 diperkirakan 644,02 ribu hektar, meningkat dari perkiraan luas panen triwulan yang sama tahun sebelumnya seluas 355,6 ribu hektar. Peningkatan luas panen tersebut menyebabkan produksi padi selama triwulan I 2021 diperkirakan meningkat 78,45% (yoy). Angka produksi padi diperkirakan meningkat menjadi ±3,9 juta ton GKG, lebih tinggi dari triwulan I 2020 yang sekitar 2,2 juta ton GKG.

Grafik 1.47 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



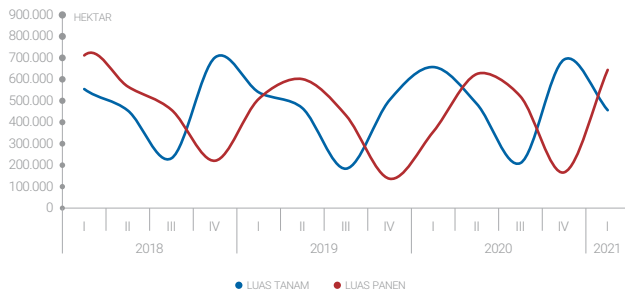
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Grafik 1.48 Curah Hujan di Jawa Tengah



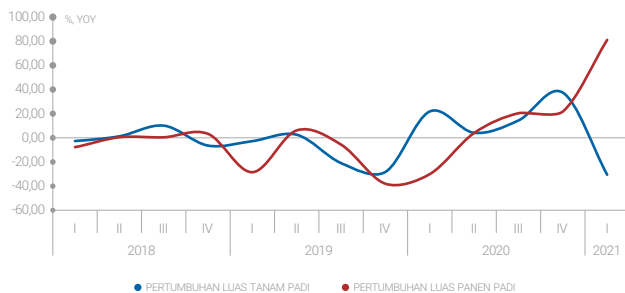
SUMBER: BMKG, DIOLAH

Grafik 1.49 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah



SUMBER: DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI JAWA TENGAH

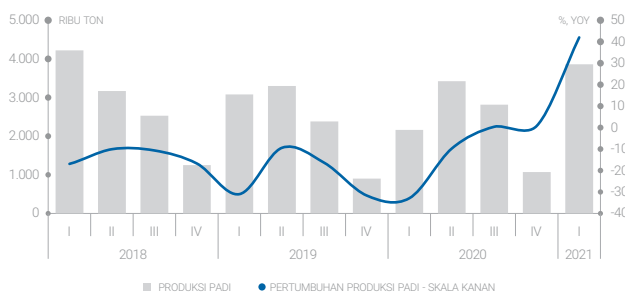
Grafik 1.50 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah



SUMBER: DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI JAWA TENGAH

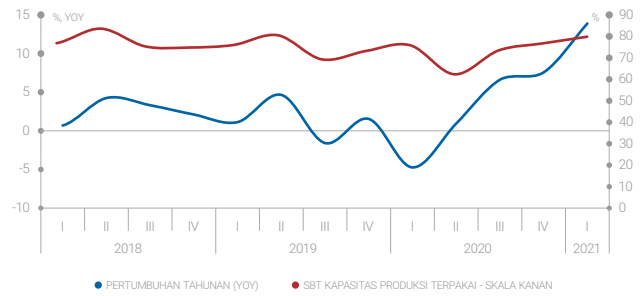
Sejalan dengan produksi yang meningkat, aktivitas kegiatan usaha di lapangan usaha ini mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, utilisasi kapasitas produksi di sektor pertanian tercatat naik dari 76,74% pada triwulan IV 2020 menjadi 79,84% pada periode laporan. Kondisi pembiayaan pada sektor ini juga masih baik dimana kredit ke sektor pertanian Jawa Tengah tumbuh 21,41% (yoy) seiring peningkatan luas tanam pada triwulan I 2021, meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya (28,30%; yoy).

Grafik 1.51 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah



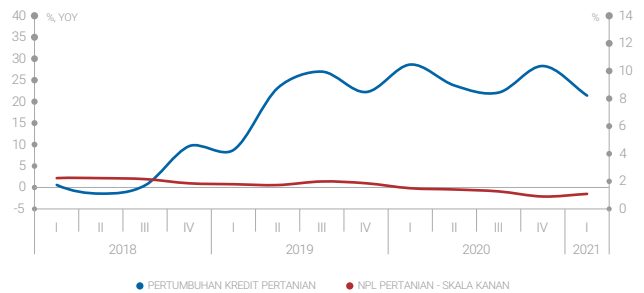
SUMBER: DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.52 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Pertanian



SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.53 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian

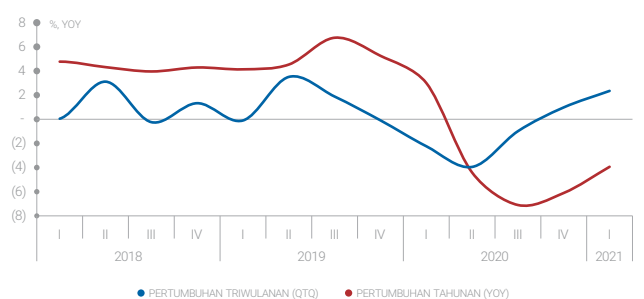


SUMBER: LAPORAN BANK UMUM, DIOLAH

1.1.2.2 Industri Pengolahan

Kinerja industri pengolahan Jawa Tengah yang membaik menjadi salah satu pendorong perbaikan ekonomi secara umum. Pertumbuhan sektor industri pengolahan membaik meskipun masih mengalami kontraksi dari -6,10% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi -3,94% (yoy) pada triwulan I 2021. Secara triwulanan, lapangan usaha ini tercatat mengalami pertumbuhan positif 2,35% (qtq), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode triwulan I 2020 sebesar -2,23% (qtq).

Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan



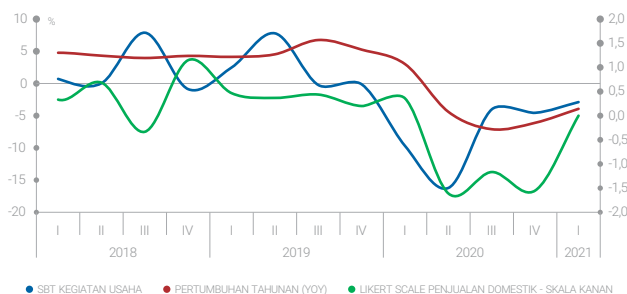
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Kinerja industri pengolahan nonmigas secara umum membaik seiring pemulihan permintaan domestik dan global. Laju konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar -1,89% (yoy) pada triwulan I 2021, lebih baik dibanding triwulan IV 2020 (-2,38%, yoy). Meskipun permintaan domestik relatif terbatas, perbaikan produksi industri pengolahan ditopang dari permintaan global. Ekspor luar negeri komoditas nonmigas mencatat pertumbuhan positif 12,31% (yoy) sehingga menguatkan perbaikan ekonomi Jawa Tengah yang terus berlanjut.

Perkembangan industri pengolahan nonmigas sejalan dengan hasil kegiatan *liaison* yang dilakukan Bank Indonesia, yang juga menunjukkan perbaikan penjualan ekspor. Likert scale penjualan ekspor industri pengolahan membaik dari 0,00 pada triwulan IV 2020 menjadi 0,53 pada triwulan laporan. Sebagian besar kontak dari sektor garmen, kayu olahan, furnitur, dan produk kimia, menyatakan perbaikan penjualan.

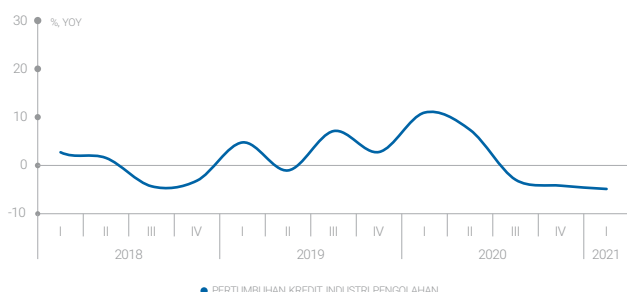
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha meningkat dari -4,55% menjadi -2,89% pada triwulan I 2021. Selain itu, utilisasi kapasitas produksi industri pengolahan juga cukup baik pada level 63,76% meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya 67,72%. Peningkatan kapasitas produksi terpakai yang paling besar terjadi pada subsektor pengolahan tekstil dan pakaian jadi, produk kulit, kayu olahan dan furnitur, serta produk

Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

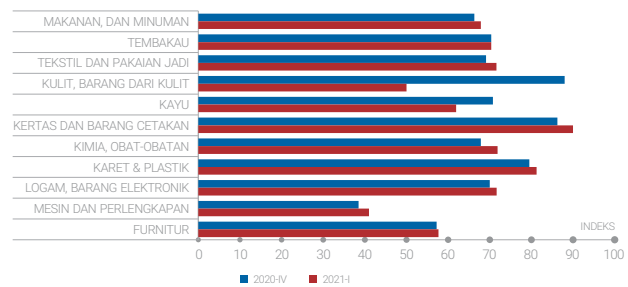


SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.56 Pertumbuhan Kredit Industri Pengolahan



Grafik 1.57 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)

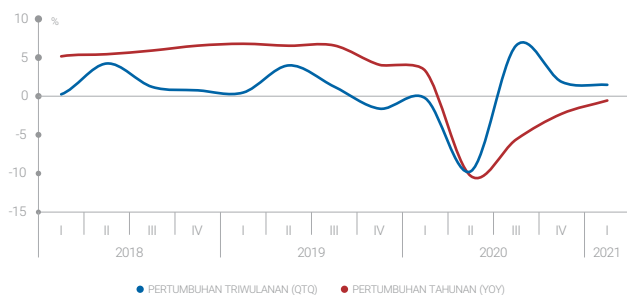


kimia, sejalan dengan perkembangan ekspor industri. Lebih lanjut, indikator industri pengolahan nonmigas lainnya yaitu *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yang dihasilkan dari SKDU menunjukkan perbaikan menjadi 44,58%, dari triwulan IV 2020 sebesar 43,20%. Meskipun begitu, indikator PMI masih berada pada level kontraksi. Perbaikan PMI terjadi pada seluruh komponen industri termasuk peningkatan volume persediaan barang jadi dan volume produksi.

Kondisi belum optimalnya industri pengolahan juga disebabkan ketidakpastian COVID-19 yang masih relatif tinggi. Sejumlah pelaku usaha masih menahan untuk melakukan ekspansi usaha pada skala yang besar. Penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan pada triwulan I 2021 tumbuh -4,87% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan IV 2020 yang sebesar -4,20% (yoy). Pelaku usaha melihat kondisi ekonomi triwulan I 2021 belum sepenuhnya kondusif untuk mengembangkan usaha lebih lanjut dan menunggu hingga COVID-19 mereda.

1.1.2.3 Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Sejalan dengan sektor industri pengolahan yang membaik, lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mencatatkan perbaikan pertumbuhan menjadi -0,56% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan IV 2020 yang tumbuh -2,27% (yoy). Secara triwulanan, lapangan usaha ini tumbuh 1,47% (qtq), meningkat dibanding pertumbuhan triwulan I 2020 yang sebesar -0,27% (qtq). Meskipun sejumlah peritel melakukan penutupan toko fisik, sebagian besar peritel beralih ke penjualan secara daring. Penjualan secara daring memang belum mengalami peningkatan yang pesat, tetapi dapat memenuhi peningkatan permintaan di triwulan I 2021 dimana aktivitas di dalam rumah masih relatif tinggi dibanding pusat perbelanjaan. Selain itu, konsumen perlahan-lahan telah meningkatkan konsumsi pada barang tahan lama seperti perlengkapan rumah tangga.

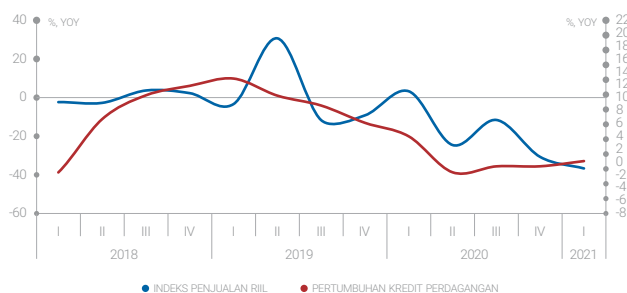
Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

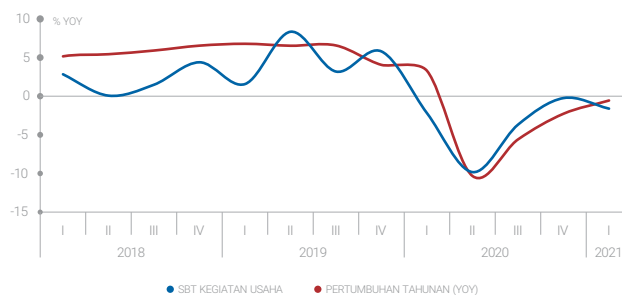
Kinerja lapangan usaha perdagangan yang membaik sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit di lapangan usaha ini.

Pada triwulan I 2021, penyaluran kredit perdagangan tumbuh 0,14% (yoy), lebih baik dari pertumbuhan triwulan IV 2020 sebesar -0,67% (yoy). Sejumlah pelaku usaha berupaya meningkatkan kapasitas penjualan dengan memanfaatkan aktivitas perekonomian yang mulai meningkat sejak akhir 2020.

Seiring peningkatan permintaan ekspor, peningkatan sektor perdagangan juga terjadi pada aktivitas perdagangan internasional. Aktivitas muat barang untuk perdagangan internasional di pelabuhan Jawa Tengah tumbuh positif 25,06% (yoy) pada triwulan I 2021. Selain perdagangan internasional mengalami perbaikan, perdagangan dalam negeri juga mulai membaik meski masih dalam fase kontraksi. Hasil SKDU Bank Indonesia juga mengindikasikan perbaikan kinerja perdagangan domestik. SBT kegiatan usaha sektor perdagangan meningkat dari -1,67% pada triwulan IV 2020 menjadi -0,78% pada triwulan I 2021. Meskipun kinerja perdagangan domestik mulai membaik, namun belum sepenuhnya kembali kepada pola normal. Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia menunjukkan masih terbatasnya peningkatan penjualan domestik khususnya pada kelompok barang budaya rekreasi, bahan bakar kendaraan bermotor, dan suku cadang.

Grafik 1.60 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

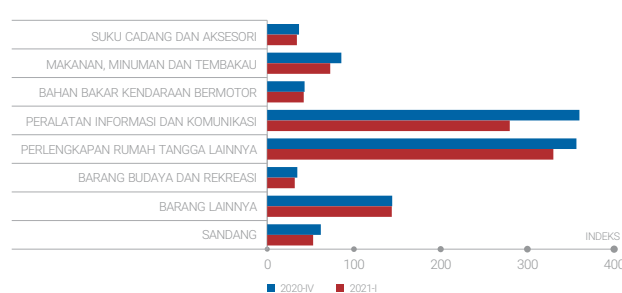
Grafik 1.59 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan

SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

1.1.2.4 Lapangan Usaha Lainnya

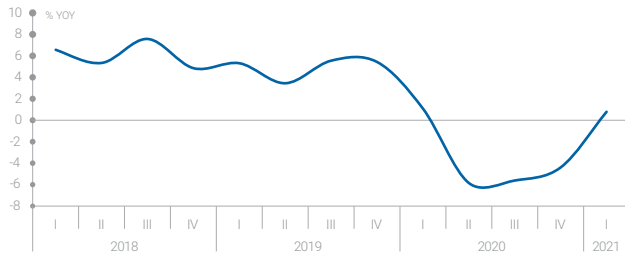
Lapangan usaha lainnya yang turut mengalami perbaikan kinerja pada triwulan laporan yaitu **konstruksi**. Pada triwulan I 2021, lapangan usaha konstruksi tumbuh 0,79% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 4,40% (yoy). Perbaikan kinerja tersebut sejalan dengan meningkatnya pembangunan (investasi bangunan) proyek strategis nasional yang tercermin dari peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor ini menjadi 0,29% (yoy). Namun demikian, kredit konstruksi menurun 6,25% (yoy) dari sebelumnya 8,25% (yoy) mencerminkan aktivitas konstruksi tersebut masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur publik.

Lapangan usaha lainnya yang turut juga mengalami perbaikan kinerja pada triwulan laporan yaitu **transportasi dan pergudangan**. Pada triwulan I 2021, sektor tersebut tumbuh -31,04% (yoy), atau lebih baik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -33,53% (yoy). Perbaikan kinerja pertumbuhan lapangan usaha ini sejalan dengan mobilitas di tempat retail dan rekreasi yang meningkat kembali setelah kegiatan pembatasan berakhir, serta permintaan domestik yang mulai membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 1.61 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas

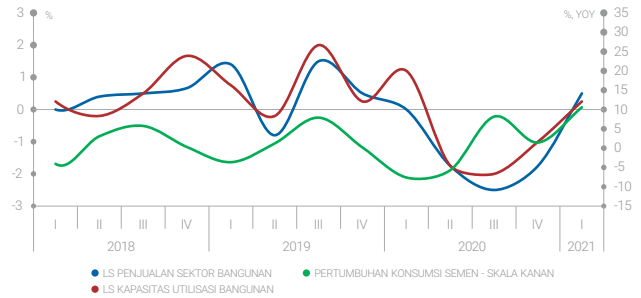
SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.62 Pertumbuhan PDRB Konstruksi



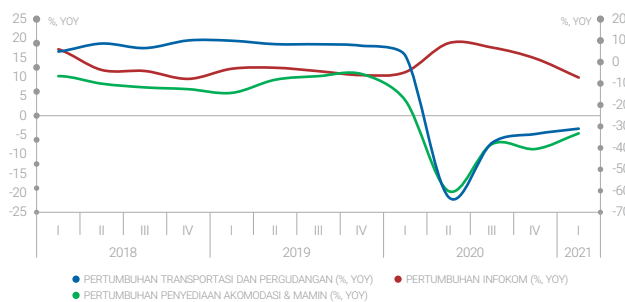
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.63 SBT Kegiatan Usaha, SBT Kegiatan Investasi Bangunan dan Pertumbuhan Konsumsi Semen



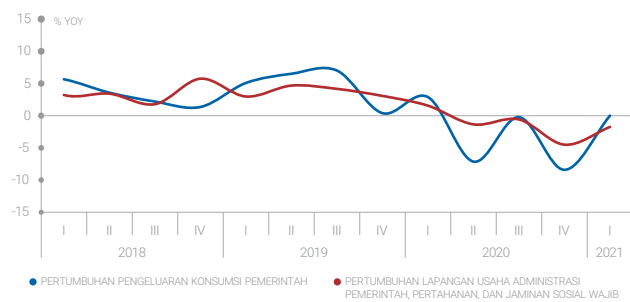
SUMBER: BANK INDONESIA, BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 1.64 Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Grafik 1.65 Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konsumsi Pemerintah



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

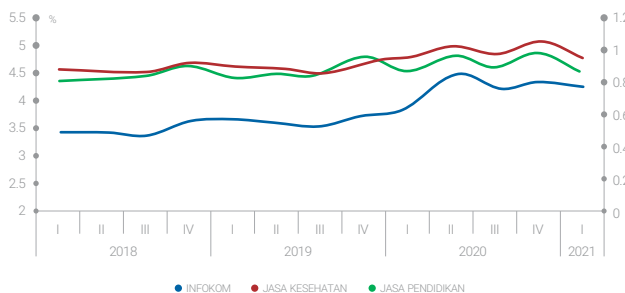
Lapangan usaha penyediaan **akomodasi dan makanan minuman** juga mengalami peningkatan pada triwulan I 2021 seiring masih mulai meningkatnya konsumsi domestik. Lapangan usaha tersebut tumbuh -4,57% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2020 yang tumbuh -8,62% (yoy). Tingkat hunian hotel berbintang di Jawa Tengah meningkat pada level 28,21% meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya (36,21%).

Sektor lainnya yaitu **administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib** turut mengalami perbaikan. Pada triwulan I 2021 lapangan usaha ini tumbuh -1,74% (yoy), meningkat dibanding triwulan IV 2020 yang tumbuh -4,50% (yoy). Peningkatan kinerja lapangan usaha ini akibat adanya program vaksinasi mulai Januari 2021 serta mulai meningkatnya

kepercayaan masyarakat pada hasil vaksin sehingga menurunkan kekhawatiran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi pemerintahan.

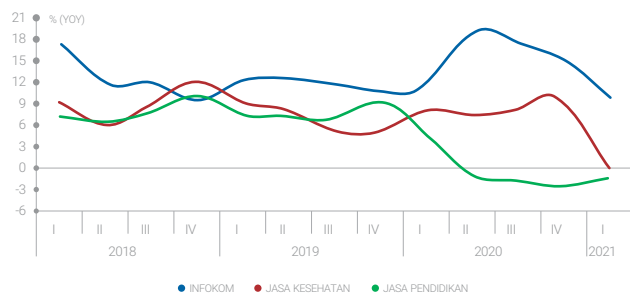
Lebih lanjut, lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi pada triwulan I 2021, meski melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2021, sektor ini mengalami pertumbuhan 9,87% (yoy). Angka tersebut melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 14,82% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas penduduk di bulan Februari dan Maret 2021, sehingga kebutuhan informasi dan komunikasi (jaringan, *bandwidth*) sedikit melambat.

Grafik 1.66 Pangsa Pertumbuhan Ekonomi



SUMBER: SURVEI KEGIATAN USAHA, DIOLAH

Grafik 1.67 Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)



SUMBER: SURVEI KEGIATAN USAHA, DIOLAH

Kinerja lapangan usaha jasa kesehatan juga melambat, hanya tumbuh 0,25% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 9,19% (yoy). Beberapa faktor utama penyebab menurunnya pertumbuhan tersebut diindikasikan karena implementasi vaksin yang meluas serta masih berlanjutnya berbagai kebijakan pembatasan mobilitas sehingga aktivitas pengetesan COVID-19 juga melambat. Sementara, sektor jasa pendidikan masih mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -1,32% (yoy). Hal ini didorong masih terbatasnya pembelajaran tatap muka karena potensi penyebaran COVID-19 yang tinggi di sekolah.

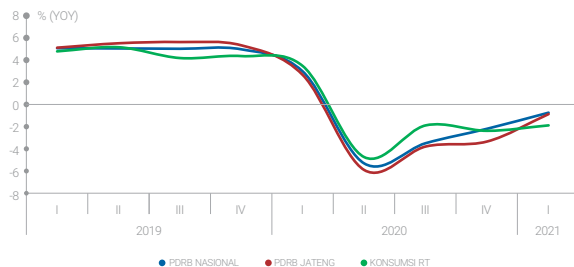
BOKS 1 : Kebijakan Relaksasi Fiskal Mendorong Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga Pada Produk Otomotif dan Properti di Jawa Tengah

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Nasional dan juga Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,74% (yoy). Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam empat triwulan terakhir juga tercatat mengalami kontraksi. Pada triwulan I 2021 perekonomian Jawa Tengah terkontraksi 0,87% (yoy), lebih baik dibandingkan titik terendahnya pada triwulan II-2020 yang mencapai -5,91% (yoy). Kontraksi pertumbuhan di nasional maupun Jawa Tengah, pada sisi permintaan utamanya bersumber dari kontraksi konsumsi rumah tangga¹⁰. Kontraksi konsumsi rumah tangga merupakan implikasi dari menurunnya tingkat pendapatan masyarakat karena pembatasan kegiatan ekonomi yang kemudian berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat.

Menyikapi rendahnya daya beli masyarakat dan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi fiskal.

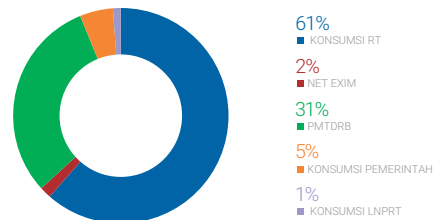
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20/PMK.010/2021 tentang “Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021” dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2021 tentang “Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021”. Kedua ketentuan tersebut memberikan insentif kepada masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor roda empat jenis tertentu yang PPnBM-nya akan ditanggung oleh pemerintah dan kepada masyarakat yang akan membeli properti dengan harga maksimal sampai dengan Rp5 Miliar yang PPN-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Relaksasi fiskal berupa insentif pajak pada sektor otomotif tersebut akan berlaku selama 9 bulan mulai dari Bulan Maret hingga November 2021. Sementara itu, insentif pajak pada sektor properti akan berlaku selama 6 bulan mulai dari Bulan Maret hingga Agustus 2021.

Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan PDRB dan Konsumsi RT di Jawa Tengah



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH (DIOLAH)

Grafik 2. Struktur PDRB Jateng Berdasarkan Pengeluaran



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH (DIOLAH)

Gambar 1. Pokok-Pokok Relaksasi Kebijakan Fiskal Pada Pembelian Kendaraan Bermotor

Mobi Baru 1.50Tcc - 2.500cc	Tarif PPnBM Seharusnya	Diskon PPnBM		Tarif PPnBM Tahap I (April - Ags)	Tarif PPnBM Tahap II (Sep - Des)
		Tahap I Diskon 50%	Tahap II Diskon 25%		
4x2	20%	10%	15%	10%	15%
4x2	40%	30%	35%	30%	35%

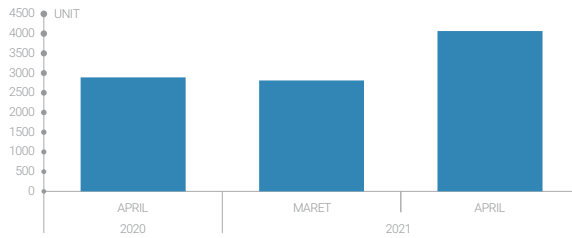
SUMBER: PMK NO. 20/PMK.010/2021

Gambar 2. Pokok-Pokok Relaksasi Kebijakan Fiskal Pada Pembelian Properti

- Pemberian Insentif PPN atas penyerahan Rumah:
 - Rumah Tapak; dan
 - Rumah Susun
 Ditanggung oleh pemerintah selama 6 bulan untuk masa pajak Maret - Agustus 2021.
- Mekanisme pemberian insentif (PPN) menggunakan yang Ditanggung pemerintah (DTP), dengan besaran;
 - 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan Harga Jual paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga Jual di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berlaku selama 6 bulan, mulai 1 Maret - 31 Agustus 2021

SUMBER: PMK NO. 21/PMK.010/2021

10. Sama halnya dengan perekonomian nasional, bobot konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Jawa Tengah merupakan yang terbesar dengan pangsa mencapai 61%.

BOKS 1 : Kebijakan Relaksasi Fiskal Mendorong Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga Pada Produk Otomotif dan Properti di Jawa Tengah**Grafik 3. Jumlah BBn-KB Kendaraan Roda 4**

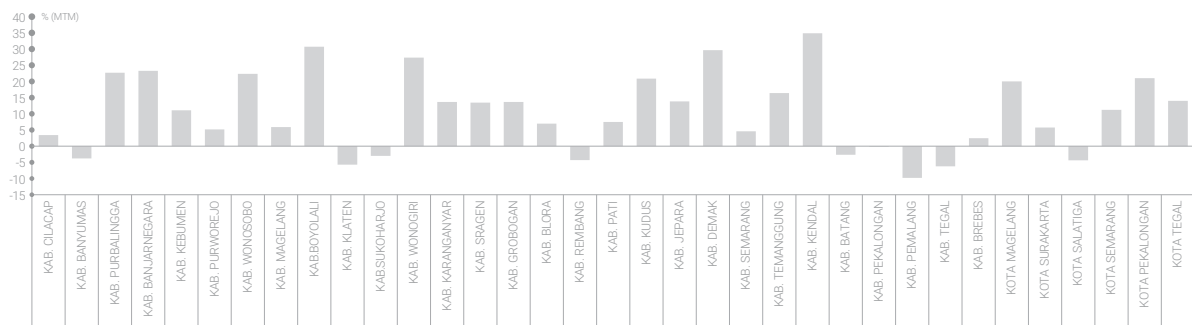
SUMBER: BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang kemudian akan berdampak positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi.

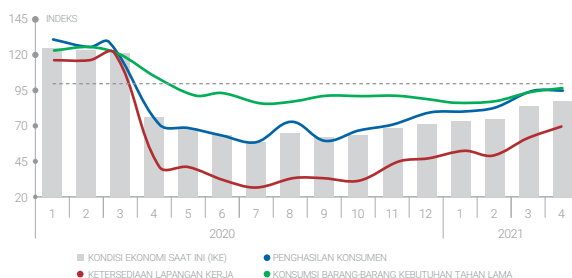
Hingga saat ini relaksasi kebijakan fiskal tersebut sudah berjalan hampir dua bulan dan mulai berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga pada produk otomotif dan properti. Dari sektor otomotif, kebijakan ini cukup memberikan daya dorong yang signifikan terhadap animo masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor roda 4. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah kendaraan baru yang

melakukan bea balik nama kendaraan bermotor (BBn-KB) di Provinsi Jawa Tengah setelah dikeluarkannya kebijakan insentif pajak oleh pemerintah. Pada Bulan April 2021 BBn-KB kendaraan penumpang roda 4 di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4.064 unit, sementara pada Bulan Maret hanya sebesar 2.813 unit saja, atau tumbuh 44,47% (mtm). Lebih lanjut apabila dicermati secara spasial, peningkatan pembelian kendaraan oleh masyarakat paling tinggi terjadi di Kabupaten Kendal (34,86%;mtm), Kabupaten Boyolali (30,71%;mtm), dan Kabupaten Demak (29,66%;mtm).

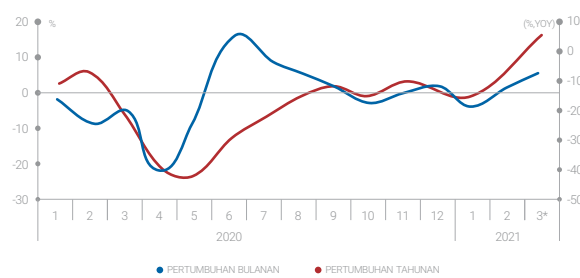
Indikator lain juga mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga pada pembelian kendaraan bermotor. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada komponen Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) mengkonfirmasi bahwa konsumsi barang tahan lama mengalami peningkatan pada bulan April 2021. Sejalan dengan itu, hasil survei penjualan eceran pada indeks penjualan ritel (IPR) bahan bakar, suku cadang, serta accessories kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan yang positif mulai Bulan Maret 2021. Demikian pula dengan salah satu kontak liaison Bank Indonesia yang merupakan dealer otomotif dengan pangsa terbesar di Jawa Tengah juga mengkonfirmasi

Grafik 4. BBn-KB di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah

SUMBER: BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

Grafik 5. Perkembangan Komponen IKE Jawa Tengah

SUMBER: SURVEI KONSUMEN BANK INDONESIA

Grafik 6. Indeks Penjualan Ritel (IPR) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

SUMBER: SURVEI PENJUALAN ECERAN BANK INDONESIA

BOKS 1 : Kebijakan Relaksasi Fiskal Mendorong Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga Pada Produk Otomotif dan Properti di Jawa Tengah

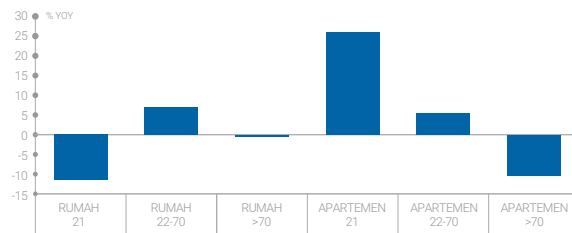
bahwa terjadi lonjakan pemesanan mobil baru hampir mencapai 200% setelah berlakunya kebijakan insentif PPnBM.

Berikutnya relaksasi kebijakan fiskal di sektor properti juga mulai berdampak positif. Beberapa indikator mengindikasikan perkembangan yang lebih baik. Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/A) tumbuh positif sebesar 2,58% (yoy) pada bulan April 2021, lebih baik daripada pertumbuhan pada akhir triwulan I 2021 yang hanya sebesar 1,52% (yoy). Meningkatnya permintaan KPR didorong oleh properti tipe kecil dan menengah, yaitu rumah tipe 22-70, apartemen tipe 21, dan apartemen tipe 22-70. Hal ini sejalan dengan objek properti yang menjadi sasaran insentif PPN dari kebijakan relaksasi fiskal pemerintah. Meningkatnya KPR juga didorong oleh faktor suku bunga yang terus menurun. Pada Bulan April 2021 penurunan suku bunga tertinggi terjadi pada kredit KPA sampai dengan tipe

21 yang sebesar 7,20%, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2020 yang mencapai 8,23% dan triwulan I 2021 yang sebesar 7,24%.

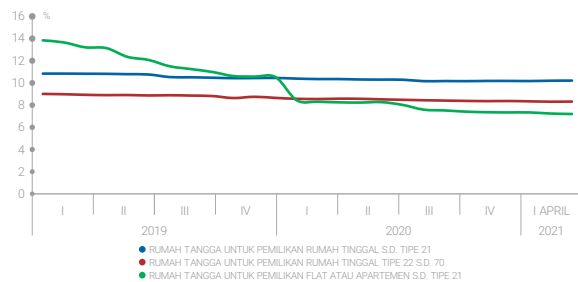
Lebih lanjut, berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) dengan DPD REI Jawa Tengah diketahui bahwa 50,9% pelaku usaha properti menyatakan kebijakan insentif PPN memberikan dampak positif terhadap penjualannya. Selanjutnya dari sumber yang sama diketahui bahwa terjadi peningkatan kunjungan ke lokasi sebesar 50% dibandingkan dengan kondisi sebelum berlakunya insentif PPN. Sejalan dengan itu, saat ini mulai terjadi peningkatan penjualan sebesar 30%-40% dibandingkan dengan sebelum dikeluarkannya kebijakan insentif PPN oleh Pemerintah. Dengan mulai meningkatnya konsumsi di sektor otomotif dan properti tersebut, diharapkan dapat mendorong kinerja konsumsi rumah tangga sehingga mempercepat pemulihan ekonomi Jawa Tengah.

Grafik 7. Perkembangan KPR/A di Jawa Tengah per April 2021



SUMBER: LAPORAN BANK UMUM (DIOLAH)

Grafik 8. Perkembangan Suku Bunga KPR/A di Jawa Tengah



SUMBER: LAPORAN BANK UMUM (DIOLAH)

BOKS 2 : Kinerja Industri Alas Kaki Mendorong Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah

Lapangan usaha (LU) industri pengolahan merupakan sektor ekonomi utama penopang perekonomian Jawa Tengah, yaitu berkontribusi sebesar 34,60% dari total PDRB Jawa Tengah. Pada awal masa pandemi COVID-19, kinerja LU ini mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan terganggunya produksi, serta dampak penurunan permintaan global dan domestik akibat berbagai pembatasan aktivitas ekonomi. Pada akhir tahun 2020, seiring dengan mulai meningkatnya permintaan global, industri alas kaki merupakan salah satu subsektor industri di Jawa Tengah yang mampu merespon peluang dan menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi.

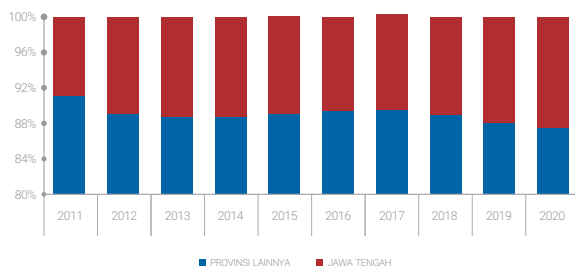
Profil Industri Alas Kaki di Jawa Tengah

Industri alas kaki di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Pada tahun 2011, industri alas kaki Jawa Tengah hanya berkontribusi sebesar 8,9% terhadap Indonesia. Pada akhir tahun 2020, kontribusi tersebut meningkat menjadi 12,4%. Terhadap perekonomian

Jawa Tengah, industri alas kaki juga menyumbang peningkatan kontribusi dari 0,28% pada tahun 2011 menjadi 0,36% pada tahun 2020. Pertumbuhan PDRB industri alas kaki di Jawa Tengah sebelum pandemi juga meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2018 yaitu sebesar 15,26% (yoy).

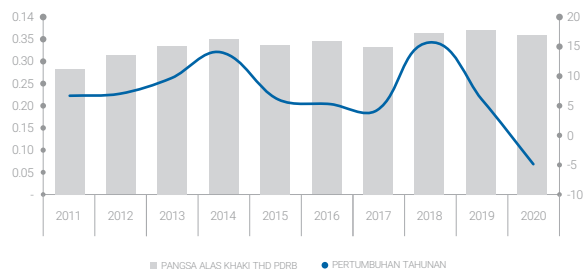
Berdasarkan pangsa terhadap ekspor alas kaki Indonesia, ekspor alas kaki Jawa Tengah juga mengalami peningkatan signifikan dari berkontribusi 1,3% (tahun 2011) menjadi 12,0% (tahun 2020). Sementara dari sisi total ekspor Jawa Tengah, ekspor alas kaki menyumbang 7,20% total ekspor, meningkat signifikan dari pangsa 0,84% di tahun 2020. Ekspor alas kaki Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2017, seiring dengan adanya relokasi dan investasi beberapa industri alas kaki ke Jawa Tengah. Peningkatan kinerja ekspor alas kaki Jawa Tengah tersebut terus berlanjut sampai tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 meluas.

Grafik 1. Pangsa Industri Alas Kaki Jawa Tengah terhadap Indonesia



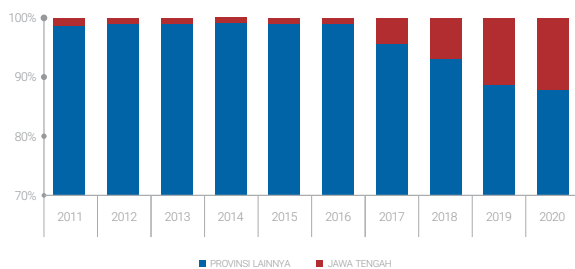
SUMBER : BPS (DIOLAH)

Grafik 2. Pangsa dan Pertumbuhan Industri Alas Kaki terhadap PDRB Jawa Tengah



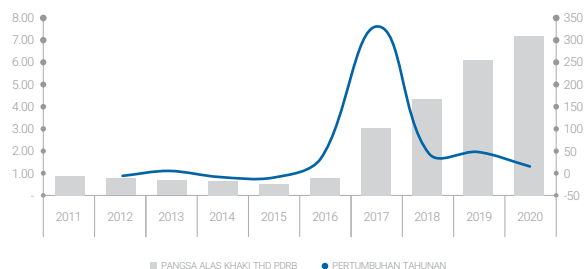
SUMBER : BPS (DIOLAH)

Grafik 3. Pangsa Ekspor Industri Alas Kaki Jawa Tengah terhadap Total Ekspor Indonesia



SUMBER : BPS (DIOLAH)

Grafik 4. Pangsa dan Pertumbuhan Ekspor Industri Alas Jawa Tengah



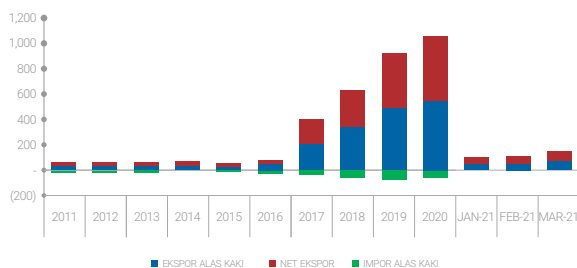
SUMBER : BPS (DIOLAH)

BOKS 2 : Kinerja Industri Alas Kaki Mendorong Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah**Daya Saing Industri Alas Kaki Jawa Tengah selama Pandemi COVID-19**

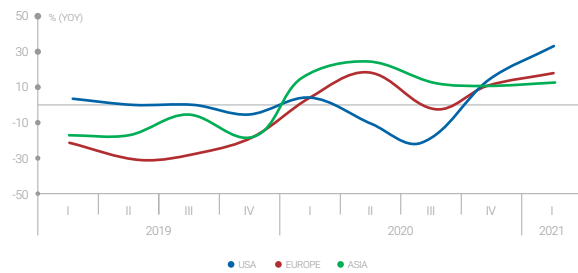
Industri alas kaki Jawa Tengah menyumbang surplus neraca perdagangan internasional. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, ekspor industri alas kaki selalu dalam kondisi net ekspor, dengan tren yang meningkat sejak tahun 2017, sehingga dapat berkontribusi terhadap penurunan *Current Account Deficit*. Bahkan pada masa pandemi, industri alas kaki tetap mampu meningkatkan kinerja ekspornya dan menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi.

Kinerja positif ekspor alas kaki di Jawa Tengah pada masa pandemi tersebut, didorong oleh beberapa faktor. Dari sisi eksternal, mulai membaiknya permintaan global terhadap produk alas kaki, khususnya dari negara Amerika Serikat dan Eropa yang merupakan pasar utama produk alas kaki Jawa Tengah, menjadi pendorong utama. Peningkatan permintaan global tersebut juga dipengaruhi oleh harga produk alas kaki Jawa Tengah yang lebih kompetitif dibandingkan produk alas kaki dari beberapa daerah lain. Dari sisi domestik, adanya berbagai fasilitas antara lain Kawasan Berikat bagi pelaku usaha yang produksinya berorientasi ekspor juga semakin mendorong peningkatan kinerja ekspor.

Peningkatan kinerja ekspor industri alas kaki di Jawa Tengah juga tercermin dari posisi strategis Jawa Tengah pada perdagangan internasional. Berdasarkan kuadran *revealed symmetric comparative advantage* (RSCA) dan *trade balance index* (TBI), terjadi pergeseran daya saing ekspor industri alas kaki dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, khususnya bagi negara-negara produsen alas kaki.

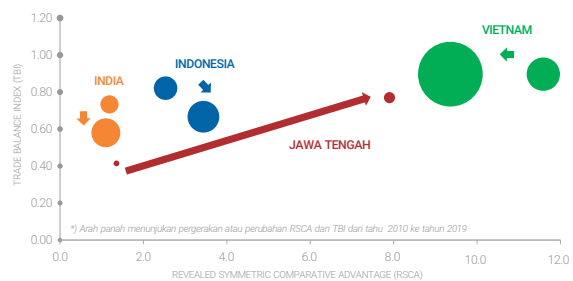
Grafik 5. Neraca Perdagangan Industri Alas Kaki Jawa Tengah

SUMBER : BPS (DIOLAH)

Grafik 6. Perkembangan Ekspor Jawa Tengah berdasarkan Negara Mitra Dagang Utama

SUMBER : BPS (DIOLAH)

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen alas kaki dunia, bersama dengan China, India dan Vietnam. Dibandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu (tahun 2010), terdapat pergeseran daya saing industri alas kaki beberapa negara tersebut. Vietnam mengalami penurunan RSCA karena peningkatan pangsa ekspor alas kaki Vietnam yang lebih rendah dibandingkan dunia. Namun, volume ekspor alas kaki mengalami kenaikan signifikan dalam waktu 10 tahun terakhir (tumbuh 263%). India juga mengalami penurunan TBI dan RSCA, disebabkan oleh penambahan nominal ekspor yang relatif terbatas (hanya tumbuh 71%). Indonesia mengalami penurunan TBI, sedangkan RSCA meningkat seiring peningkatan pangsa alas kaki terhadap ekspor Indonesia. Jawa Tengah dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan daya saing industri alas kaki yang signifikan. Pangsa ekspor alas kaki meningkat dari 0,38% menjadi 0,71%, dengan nominal ekspor yang tumbuh 1.100%.

Grafik 6. Perkembangan Posisi Jawa Tengah terhadap Pasar Perdagangan Internasional Alas Kaki

SUMBER : UNCOMTRADE (DIOLAH)

BOKS 2 : Kinerja Industri Alas Kaki Mendorong Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah**Tantangan Industri Alas Kaki dan Kebijakan Mendorong Percepatan Pemulihan**

Industri alas kaki Jawa Tengah masih memiliki prospek yang cukup baik ke depan. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor antara lain: (i) permintaan ekspor alas kaki dari Jawa Tengah yang masih tinggi terutama Amerika Serikat, (ii) Jawa Tengah memiliki kualitas produk alas kaki yang bagus dengan harga jual serta FOB lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, (iii) finalisasi perjanjian Indonesia – EU CEPA akan mendorong pertumbuhan ekspor alas kaki ke pasar EU, (iv) pertumbuhan ekspor juga akan mendorong pertumbuhan investasi alas kaki di Jawa Tengah, (v) ketersediaan tenaga kerja dengan tingkat upah yang lebih kompetitif dibandingkan wilayah lain di Indonesia, dan (vi) pemulihan aktivitas masyarakat pasca vaksinasi akan mendorong konsumsi alas kaki.

Meskipun memiliki prospek ke depan yang cukup baik, industri alas kaki juga menghadapi beberapa tantangan. Saat ini, relokasi dan investasi industri alas kaki yang dilakukan di Jawa Tengah hanya untuk industri hilir, sementara industri hulu tetap berada di wilayah barat. Hal ini menyebabkan *value chain* industri alas kaki di Jawa Tengah belum optimal dan ketersediaan bahan baku juga terbatas. Lebih lanjut, peningkatan prospek investasi menyebabkan harga tanah juga meningkat sehingga berpotensi menahan realisasi investasi. Selain itu, seiring dengan meningkatnya ekspansi industri diperlukan pula tenaga kerja yang berkualitas dari berbagai segmen. Akibatnya, ketersediaan tenaga kerja siap pakai menjadi mutlak sehingga dapat mendorong produktivitas industri alas kaki secara optimal.

Beberapa kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah telah ditetapkan untuk meminimalkan berbagai tantangan di atas serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Pemerintah Provinsi telah menyediakan balai latihan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan industri. Penambahan zona kawasan industri juga telah ditetapkan di semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan sehingga memberikan iklim yang kondusif bagi realisasi investasi.

Selain kebijakan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk semakin mendorong percepatan pemulihan ekonomi khususnya kinerja industri alas kaki. Pertama, mendorong pengembangan industri hulu di Jawa Tengah, baik melalui ekspansi industri eksisting maupun menarik investor baru. Pengembangan industri hulu akan meningkatkan efisiensi *value chain* industri alas kaki secara menyeluruh. Ketersediaan bahan baku dalam jumlah dan harga yang terjangkau akan semakin meningkatkan daya saing industri alas kaki di Jawa Tengah, sekaligus mendorong tersedianya lapangan usaha baru. Kedua, mendorong percepatan FTA Indonesia – EU CEPA serta melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor produk alas kaki Jawa Tengah akan semakin meningkatkan kinerja industri alas kaki domestik dan mempercepat pemulihan ekonomi. Ketiga, pengawasan dan fasilitasi untuk mendorong iklim investasi. Dibangunnya berbagai kawasan industri di Jawa Tengah, serta disetujuinya berbagai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan peruntukan industri di Kabupaten/Kota perlu didukung dengan fasilitasi kemudahan investasi, pengawasan implementasi berbagai kebijakan terkait perizinan dan investasi, serta edukasi kepada masyarakat. Yang terakhir, sinergi antara berbagai pihak baik pemerintah, industri, maupun masyarakat merupakan kunci utama mendorong kinerja industri alas kaki di Jawa Tengah yang selanjutnya dapat menopang percepatan pemulihan ekonomi.





BANK INDONESIA



02

KEUANGAN PEMERINTAH

- 2.1. Gambaran Umum APBD 2021
- 2.2. Realisasi APBD Tahun 2021
 - 2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan I Tahun 2021
 - 2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan I Tahun 2021
- 2.3. APBD 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- 2.4. APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 - 2.4.1. Anggaran APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 - 2.4.2. Realisasi APBN di Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2021

2.1. GAMBARAN UMUM APBD 2021

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 mengalami peningkatan pasca adanya kebijakan rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 pada tahun lalu. Secara umum, nominal anggaran pendapatan dan anggaran belanja mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD tahun 2020. Anggaran Pendapatan meningkat 3,32% yang utamanya berasal dari peningkatan anggaran pendapatan asli daerah sebesar 6,93 %. Komponen yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah Retribusi Daerah (meningkat 24,73%) dan PAD lain-lain yang sah (meningkat 23,13%). Peningkatan target anggaran pendapatan tersebut merupakan bentuk optimisme pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi yang akan lebih baik pada tahun 2021. Namun demikian, anggaran penerimaan dari dana perimbangan mengalami penurunan 0,90%, khususnya pada dana bagi hasil pajak/bukan pajak (turun Rp217 miliar atau 22,37%). Kondisi ini merupakan dampak rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat.

Belanja daerah dianggarkan sedikit meningkat 1,51% menjadi sebesar Rp27,2 triliun pada anggaran tahun 2021. Peningkatan anggaran belanja daerah tersebut bersumber dari anggaran belanja modal yang cukup besar sebesar 58,23% atau secara nominal Rp591 miliar. Sejalan dengan itu, peningkatan juga terjadi pada belanja operasi sebesar 9,64% atau secara nominal sebesar Rp1,57 triliun yang utamanya bersumber dari peningkatan komponen belanja barang dan jasa sebesar 51,23% atau secara nominal sebesar Rp1,96 triliun. Peningkatan alokasi belanja

Tabel 2.1 Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Komponen Pendapatan Daerah	Rp Miliar			% Change
	2020	2021	Change	
Pendapatan Asli Daerah	14,004	14,975	971	6.93%
Pajak Daerah	12,007	12,656	649	5.41%
Retribusi Daerah	93	116	23	24.73%
Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	529	510	-19	-3.59%
Lain-Lain PAD Yg Sah	1,375	1,693	318	23.13%
Dana perimbangan	11,881	11,773	-108	-0.90%
Dana Bagi Hsl Pjk/Bukan Pjk	970	753	-217	-22.37%
Dana Alokasi Umum	3,460	3,546	86	2.48%
Dana Alokasi Khusus	7,450	7,474	24	0.32%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	92	92	0	0.00%
Hibah	24	23	-1	-4.17%
Dana Peny. dan Otonomi Khusus				
Dana Insentif Daerah	68	69	1	1.47%
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan	25,977	26,840	864	3.32%

Komponen Belanja Daerah				
BELANJA OPERASI	16,358	17,935	1,577	9.64%
Belanja Pegawai	6,717	6,109	-608	-9.05%
Belanja Barang dan Jasa	3,832	5,795	1,963	51.23%
Belanja Subsidi		55	55	
Belanja Hibah	5,761	5,890	129	2.24%
Belanja Bantuan Sosial	48	86	38	79.17%
BELANJA MODAL	1,015	1,606	591	58.23%
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,988	20	-1,968	-98.99%
Belanja Tidak terduga	1,988	20	-1,968	-98.99%
BELANJA TRANSFER	7,424	7,629	205	2.76%
Belanja Bagi hasil	5,257	5,534	277	5.27%
Belanja Bantuan keuangan	2,167	2,095	-72	-3.32%
JUMLAH BELANJA	26,785	27,190	405	1.51%

SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

modal dan belanja barang dan jasa merupakan upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2021 setelah pada tahun lalu anggaran pada pos belanja ini mengalami rasionalisasi dan *refocussing* ke pos belanja lainnya.

2.2. REALISASI APBD TAHUN 2021

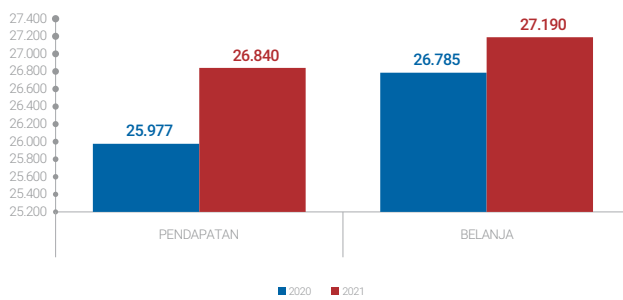
Realisasi anggaran pendapatan di Jawa Tengah sebesar Rp3,9 triliun atau mencapai 14,53% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 15,93%. Berdasarkan komponennya, melambatnya realisasi pendapatan terbesar di Jawa Tengah (55,79%) menjadi penahan realisasi pendapatan pada triwulan laporan. Realisasi PAD tercatat hanya sebesar Rp2,3 triliun, lebih rendah daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp3 triliun. Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2021, realisasi PAD tercatat hanya 15,91%, lebih rendah daripada realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu 21,72%.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah 2020 (Rp Miliar)

URAIAN	Realisasi I-2020	% Realisasi	Realisasi I-2021	% Realisasi
PENDAPATAN	4,138	15.93%	3,901	14.53%
PAD	3,042	21.72%	2,383	15.91%
Dana Perimbangan	1,096	9.23%	1,518	12.89%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	0.00%	-	0.00%
BELANJA	2,714	10.13%	2,571	9.46%
Belanja Operasi	1,913	11.69%	1,960	10.93%
Belanja Modal	151	14.88%	62	3.88%
Belanja Tidak Terduga	-	0.00%	-	0.00%
Belanja Transfer	650	8.76%	549	7.20%

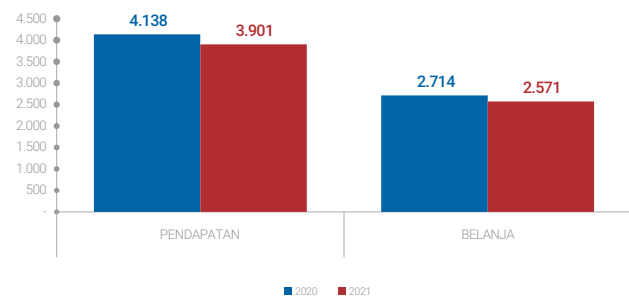
SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2020 dan T.A. 2021



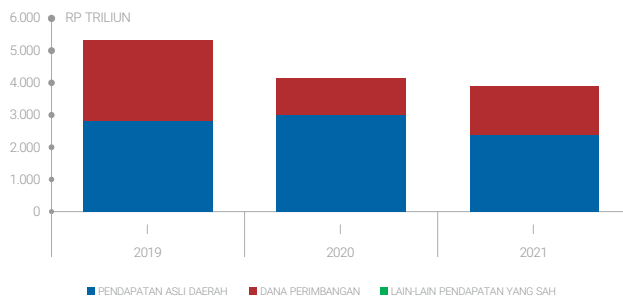
SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2020 dan Triwulan I 2021



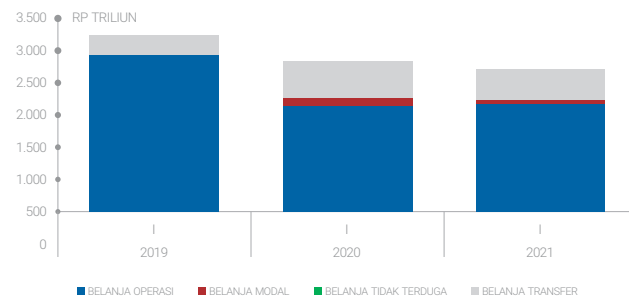
SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I (2019-2021)



SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah Triwulan I (2019-2021)



SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp 2,5 Triliun atau 9,46% dari pagu anggaran belanja daerah tahun 2021. Realisasi belanja tersebut juga lebih rendah daripada tahun 2020 yang mencapai 10,13%. Realisasi belanja paling rendah berasal dari penyerapan anggaran belanja modal sebesar Rp62 miliar atau 3,88% dari pagu anggaran.

2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan I Tahun 2021

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2021 adalah Rp3,90 Triliun atau 14,53% dari pagu. Realisasi tersebut secara nominal maupun rasio terhadap pagu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai Rp4,13 triliun atau 15,93%. Menurunnya realisasi pendapatan utamanya bersumber dari komponen PAD memiliki pangsa terbesar dalam anggaran pendapatan yaitu 55,79%.

Realisasi PAD pada tahun 2021 sebesar Rp2,3 triliun atau 15,91% dari pagu anggarannya. Realisasi tersebut lebih rendah daripada periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp3 triliun atau 21,72% dari pagu. Menurunnya realisasi PAD bersumber dari penurunan realisasi pada hampir seluruh komponen. Penurunan realisasi komponen lain-lain PAD yang sah merupakan yang terbesar (-66,61%;yoy), yang diikuti oleh penurunan pajak daerah (-22,67%;yoy) dan retribusi daerah (-16,67%;yoy). Menurunnya realisasi hampir seluruh komponen

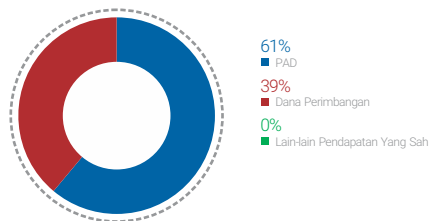
PAD tersebut merupakan indikasi dari aktivitas ekonomi yang belum kembali normal disaat pandemi COVID-19 yang belum usai. Sejalan dengan itu, relaksasi terhadap pembayaran bea balik nama kendaraan dan denda tunggakan pembayaran pajak kendaraan juga menjadi faktor yang menahan menurunnya

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Triwulan I - 2020 dan Triwulan I - 2021

Komponen Pendapatan Daerah	I-2020	I-2021	%, YOY
PENDAPATAN	21.72%	15.91%	-21.66%
Pajak Daerah	20.57%	15.09%	-22.67%
Retribusi Daerah	32.26%	21.55%	-16.67%
Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0.00%	52.35%	
Lain-Lain PAD Yg Sah	39.42%	10.69%	-66.61%
DANA PERIMBANGAN	9.23%	12.89%	38.50%
Dana Bagi Hsl Pjk/Bukan Pjk	14.95%	39.71%	106.21%
Dana Alokasi Umum	27.34%	25.01%	-6.24%
Dana Alokasi Dana Khusus	0.07%	4.44%	6540%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00%	0.00%	
Hibah	0.00%	0.00%	0.00%
Dana Peny. dan Otonomi Khusus			
Dana Insentif Daerah	0.00%	0.00%	0.00%
Pendapatan Lainnya			
TOTAL PENDAPATAN	15.93%	14.53%	-5.73%

SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 2.5 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2021



SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

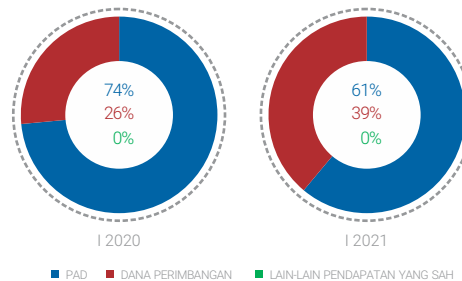
realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan berbagai relaksasi aturan perpajakan di tingkat nasional berupa pengurangan tarif pajak badan, penghapusan sanksi administratif keterlambatan pelaporan SPT, insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor, dan insentif PPN untuk pembelian properti.

Sebaliknya, realisasi Dana Perimbangan justru lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Realisasi dana perimbangan pada triwulan I tahun 2021 sebesar Rp1,51 triliun atau 12,89% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2020 sebesar Rp1,09 triliun atau 9,23% dari pagu. Peningkatan realisasi dana perimbangan utamanya bersumber dari meningkatnya dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Realisasi dana alokasi khusus meningkat sebesar 6.540% (yoy) pada triwulan laporan atau 4,44% dari pagu. Realisasi tersebut lebih baik daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 0,07% dari pagu. Sejalan dengan itu, realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak tumbuh sebesar 106,21% (yoy) pada triwulan laporan atau mencapai 39,71% dari pagu. Realisasi tersebut jauh lebih baik daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 14,95% dari pagu. Meningkatnya realisasi komponen dana perimbangan seiring dengan komitmen pemerintah pusat untuk melakukan percepatan transfer ke daerah agar dapat dimanfaatkan untuk belanja daerah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan I Tahun 2021

Realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2021 sebesar Rp2,5 triliun atau 9,46% dari pagu anggaran belanja tahun 2021. Realisasi ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp2,7 triliun atau 10,13% dari pagu. Postur realisasi belanja didominasi oleh belanja operasi sebesar 76,23% yang diikuti oleh belanja transfer sebesar 21,35%, dan belanja modal sebesar 2,42%. Realisasi belanja operasi secara nominal tumbuh 2,46% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Namun demikian, rasio realisasinya terhadap pagu tidak lebih baik dibandingkan dengan

Grafik 2.6 Perbandingan Pos Pendapatan Daerah Triwulan I 2020 dan Triwulan I 2021



SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

tahun lalu. Pada triwulan laporan realisasi belanja operasi terhadap pagu adalah sebesar 10,93%, sementara rasio realisasinya tahun sebelumnya mencapai 11,69%. Menurunnya rasio realisasi belanja operasi tersebut didorong oleh menurunnya rasio realisasi dua komponen, yaitu belanja pegawai yang baru terealisasi sebesar 16,58% dan belanja barang dan jasa yang baru terealisasi sebesar 16,34%. Penurunan rasio realisasi dua komponen belanja ini ditengarai karena adanya penundaan pelaksanaan program kerja karena masih terbatasnya aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19.

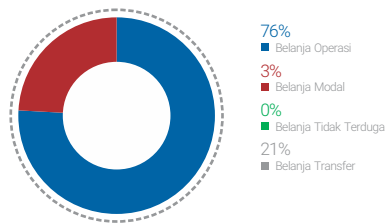
Realisasi belanja modal juga mengalami penurunan pada triwulan laporan. Dari anggaran belanja modal yang sebesar Rp1,6 triliun, saat ini baru terealisasi sebesar Rp62 miliar atau baru 3,88% saja. Padahal pada tahun lalu rasio realisasi belanja modal pada triwulan I bisa mencapai 14,88% dari pagu. Dengan demikian secara nominal pertumbuhan realisasi belanja modal mengalami kontraksi sebesar 58,78% (yoy) pada triwulan laporan. Kondisi ini terjadi karena khawatir adanya rasionalisasi anggaran kembali menjelang triwulan II 2021.

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Triwulan I 2020 dan Triwulan I 2021

Komponen Belanja Daerah	I-2020	I-2021	%, YOY
BELANJA OPERASI	11.69%	10.93%	2.46%
Belanja Pegawai	17.24%	16.58%	-12.52%
Belanja Barang dan Jasa	19.65%	16.34%	25.76%
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah	0.03%	0.00%	-100%
Belanja Bantuan Sosial	0.00%	0.00%	0.00%
BELANJA MODAL	14.88%	3.88%	-58.78%
BELANJA TIDAK TERDUGA	0.00%	0.00%	0.00%
BELANJA TRANSFER	8.76%	7.20%	-15.54%
Belanja Bagi hasil	12.25%	9.92%	-14.75%
Belanja Bantuan keuangan	0.28%	0.00%	-100%
JUMLAH BELANJA	10.13%	9.46%	-5.26%

SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Grafik 2.7 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan I 2021



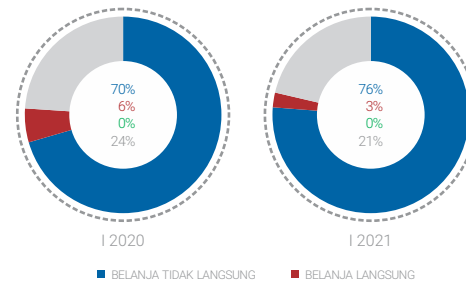
SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Sejalan dengan pos belanja lainnya, realisasi belanja transfer juga tidak lebih baik daripada periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat nominal realisasi belanja transfer mengalami kontraksi pertumbuhan -15,54% (yoy). Kedua komponen pos belanja transfer yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan mengalami kontraksi pertumbuhan, bahkan belanja bantuan keuangan belum ada realisasi sama sekali. Secara historis, rasio realisasi belanja transfer memang selalu rendah pada triwulan I karena proses administrasi yang perlu dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3. KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Realisasi APBD di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih baik pada triwulan laporan. Realisasi anggaran pendapatan secara nominal sebesar Rp17,1 triliun atau tumbuh sebesar 5,87% (yoy). Rasio realisasi terhadap pagu sebesar 21,06% juga tercatat lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 17,43%.

Grafik 2.8 Perbandingan Pos Belanja Daerah Triwulan I 2020 dan Triwulan I 2021



SUMBER: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH

Sejalan dengan itu realisasi belanja yang sebesar Rp14,2 triliun atau tumbuh 30,83% (yoy) dari periode yang sama pada tahun lalu juga mencatatkan rasio realisasi terhadap pagu yang lebih baik, yaitu sebesar 30,83%. Pencapaian ini lebih baik daripada rasio realisasi pada triwulan I 2020 lalu yang hanya sebesar 13,05%.

Realisasi belanja modal juga mengalami penurunan pada triwulan laporan. Realisasi PAD tercatat sebesar Rp4,9 triliun atau tumbuh cukup tinggi sebesar 60,73% (yoy). Rasio Realisasi PAD terhadap pagu yang sebesar 16,69% pada triwulan laporan juga tercatat lebih baik daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 10,92%. Sejalan dengan itu, pos lain-lain pendapatan yang sah juga mencatatkan kinerja yang baik. Secara nominal sudah terealisasi sebesar Rp1,7 triliun atau tumbuh 21,98% (yoy). Begitupun dengan rasio realisasinya terhadap pagu yang tercatat sebesar 17,61%, lebih baik daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 13,54%.

Tabel 2.5 Pagu dan Realisasi Pendapatan 35 kabupaten/kota

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	Pagu 2020	Pagu 2021	Nominal Realisasi I 2020 (Miliar Rp)	Nominal Realisasi I 2021 (Miliar Rp)	% Realisasi I 2020	% Realisasi I 2021	Growth Realisasi % (yoy)
PAD	28,253	29,703	3,084	4,957	10,92%	16,69%	60,73%
- Pajak Daerah	17,448	18,763	1,070	3,074	6,13%	16,38%	187,29%
- Retribusi Daerah	1,114	1,022	193	227	17,32%	22,21%	17,62%
- Hasil Pengelolaan Kekay. Daerah Yg Dipisahkan	1,082	1,140	104	495	9,61%	43,42%	375,96%
- Lain-Lain PAD Yang Sah	8,609	8,778	1,717	1,161	19,94%	13,23%	-32,38%
DANA PERIMBANGAN	53,691	41,461	11,614	10,373	21,63%	25,02%	-10,69%
- Dana Bagi Hsl Pjk/Bukan Pjk	2,443	2,076	239	622	9,78%	29,96%	160,25%
- Dana Alokasi Umum	34,229	25,133	9,779	7,920	28,57%	31,51%	-19,01%
- Dana Alokasi Khusus	17,019	14,252	1,596	1,831	9,38%	12,85%	14,72%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10,583	9,927	1,433	1,748	13,54%	17,61%	21,98%
- Hibah	2,967	1,285	508	303	17,12%	23,58%	-40,35%
- Dana Peny. dan Otonomi Khusus	3,979	5,439	592	1,340	14,88%	24,64%	126,35%
- Dana Insentif Daerah	393	873	18	52	4,58%	5,96%	188,89%
- Pendapatan Lainnya	3,244	2,330	315	53	9,71%	2,27%	-83,17%
JUMLAH PENDAPATAN	92,527	81,091	16,131	17,078	17,43%	21,06%	5,87%

Tabel 2.6 Pagu dan Realisasi Belanja 35 kabupaten/kota

KOMPONEN BELANJA DAERAH	Pagu 2020	Pagu 2021	Nominal Realisasi I 2020 (Miliar Rp)	Nominal Realisasi I 2021 (Miliar Rp)	% Realisasi I 2020	% Realisasi I 2021	Growth Realisasi % (yoy)
BELANJA OPERASI	72,694	75,050	8,640	10,954	11.89%	14.59%	26.78%
- Belanja Pegawai	38,860	40,048	5570	7605	14.33%	18.99%	36.54%
- Belanja Barang dan Jasa	25,168	26,471	2545	3202	10.11%	12.10%	25.82%
- Belanja Subsidi	4	64	0	0.5	0.00%	0.78%	
- Belanja Hibah	7,838	7,951	488	121	6.23%	1.52%	-75.20%
- Belanja Bantuan Sosial	808	497	32	24	3.96%	4.83%	-25.00%
- Belanja Bunga	16	19	5	1	31.25%	5.26%	-80.00%
BELANJA MODAL	11,958	13,393	755	849	6.31%	6.34%	12.45%
BELANJA TIDAK TERDUGA	428	682	56	23	13.08%	3.37%	-58.93%
- Belanja Tidak terduga	428	682	56	23	13.08%	3.37%	-58.93%
BELANJA TRANSFER	16,722	20,223	1,459	2,448	8.73%	12.11%	67.79%
- Belanja Bagi hasil	821	6,962	51	717	6.21%	10.30%	1305.88%
- Belanja Bantuan keuangan	15,901	13,261	1408	1731	8.85%	13.05%	22.94%
JUMLAH BELANJA	101,802	109,348	10,910	14,274	10.72%	13.05%	30.83%

Mencermati kondisi ini melambatnya realisasi anggaran pendapatan di tingkat provinsi tidak terjadi di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dapat diduga aktivitas ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota sudah mulai membaik walaupun belum kembali pada kondisi normalnya.

Selanjutnya Peningkatan realisasi belanja didorong oleh peningkatan realisasi pos belanja transfer dan belanja operasi.

Realisasi belanja transfer tercatat sebesar Rp2,4 triliun atau tumbuh 67,79% (yoy). Rasio realisasi terhadap pagu pos belanja transfer tercatat sebesar 12,11%, lebih baik daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 8,73%. Kemudian realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp10,9 triliun atau tumbuh sebesar 27,78% (yoy). Rasio realisasi belanja operasi tercatat sebesar 14,59%, lebih baik daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 11,89%. Meningkatnya realisasi belanja operasi didorong oleh dua komponen, yaitu belanja pegawai yang meningkat 36,54% (yoy) serta belanja barang dan jasa yang meningkat 25,82% (yoy). Peningkatan belanja barang dan jasa ditengarai karena dimulainya kembali pengerjaan proyek yang sempat tertunda pada tahun 2020.

2.4. APBN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

2.4.1. Anggaran Belanja APBN di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Secara kumulatif tahun 2021, Belanja APBN yang dialokasikan di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp60,26 Triliun, yang dianggarkan untuk 3 (tiga) fungsi utama yaitu pelayanan umum (35,4%), ekonomi (22,9%), dan pendidikan (16,7%). Hal ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2021 yaitu "Percepatan Program

Pemulihan Ekonomi Nasional dan Melanjutkan Reformasi Struktural." dan fokus kebijakan fiskal 2021, yaitu: (1) Percepatan pemulihan ekonomi nasional; (2) Penguatan reformasi struktural; (3) Reformasi Anggaran; dan (4) Prioritas Pembangunan Nasional.

Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat peningkatan anggaran belanja APBN di Jawa Tengah sebesar 1,4%. Peningkatan anggaran tersebut utamanya bersumber dari belanja di bidang ekonomi sebesar Rp1,9 triliun atau 17,8% seiring dengan berlanjutnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu, belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan sebesar Rp853 miliar atau 5,58%.

2.4.2. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2021

Secara keseluruhan realisasi belanja APBN triwulan I 2021 mencapai Rp9,9 triliun (16,56% dari pagu tahun 2021). Ditinjau berdasarkan fungsi, realisasi belanja APBN pada triwulan laporan mengikuti pola historis, yang didominasi oleh belanja pada fungsi pelayanan umum, pendidikan, dan ekonomi. Peningkatan realisasi tertinggi bersumber dari fungsi ekonomi yang tercatat sebesar 15,58%, lebih tinggi daripada periode yang sama di tahun lalu sebesar 6,56%. Meningkatnya realisasi anggaran pada fungsi ekonomi ini sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dari ketiga fungsi utama tersebut hanya anggaran pada fungsi pendidikan yang realisasinya lebih rendah dari periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini ditengarai karena belum sepenuhnya kegiatan belajar mengajar kembali normal di masapandemi COVID-19.

Tabel 2.7 Realisasi APBN Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2021

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2020 TW I					2021 TW I				
	Pagu (Rp M)	Pangsa	Realisasi (Rp M)	Pangsa	% Realisasi	Pagu (Rp M)	Pangsa	Realisasi (Rp M)	Pangsa	% Realisasi
Belanja Barang	15,293	25.8%	1,976	24.1%	12.92%	16,146	26.8%	2,041	20.5%	12.64%
Belanja Pegawai	15,639	26.3%	2,839	34.7%	18.15%	15,537	25.8%	2,843	28.5%	18.30%
Belanja Modal	10,104	17.0%	463	5.7%	4.59%	10,213	16.9%	1,546	15.5%	15.14%
Dana Desa	8,201	13.8%	1,194	14.6%	14.56%	8,157	13.5%	1,868	18.7%	22.90%
Dana Alokasi Khusus Fisik	3,962	6.7%	2	0.0%	0.06%	4,254	7.1%	5	0.1%	0.12%
Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	6,105	10.3%	1,690	20.7%	27.68%	5,885	9.8%	1,655	16.6%	28.12%
Belanja Bantuan Sosial	80	0.1%	18	0.2%	22.82%	70	0.1%	20	0.2%	28.57%
TOTAL	59,385		8,183		13.78%	60,262		9,978		16.56%

BERDASARKAN FUNGSI	2020 TW I					2021 TW I				
	Pagu (Rp M)	Pangsa	Realisasi (Rp M)	Pangsa	% Realisasi	Pagu (Rp M)	Pangsa	Realisasi (Rp M)	Pangsa	% Realisasi
Pelayanan Umum	20,399	36.7%	3,135	5.6%	15.37%	19,675	35.4%	3,748	6.7%	19.05%
Ekonomi	10,778	19.4%	707	1.3%	6.56%	12,698	22.9%	1,978	3.6%	15.58%
Pendidikan	10,971	19.8%	1,638	2.9%	14.93%	9,300	16.7%	1,104	2.0%	11.87%
Ketertiban dan Keamanan	5,767	10.4%	1,131	2.0%	19.61%	5,713	10.3%	1,135	2.0%	19.87%
Pertahanan	4,492	8.1%	857	1.5%	19.08%	4,569	8.2%	808	1.5%	17.68%
Kesehatan	3,056	5.5%	357	0.6%	11.67%	3,340	6.0%	510	0.9%	15.27%
Perumahan dan Fasilitas Umum	1,751	3.2%	51	0.1%	2.93%	2,831	5.1%	392	0.7%	13.85%
Lingkungan Hidup	1,168	2.1%	173	0.3%	14.78%	981	1.8%	160	0.3%	16.31%
Agama	784	1.4%	123	0.2%	15.69%	820	1.5%	129	0.2%	15.73%
Perlindungan Sosial	43	0.1%	8	0.0%	18.27%	234	0.4%	11	0.0%	4.70%
Pariwisata dan Budaya	177	0.3%	4	0.0%	2.00%	101	0.2%	3	0.0%	2.97%
TOTAL	59,385		8,183		13.78%	60,262		9,978		16.56%

Sedangkan berdasarkan jenis belanja, realisasi APBN triwulan I 2021 lebih dominan dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dari ketiga jenis belanja tersebut, realisasi belanja pegawai merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar Rp2,8 triliun atau 18,3% dari pagu. Sementara itu, realisasi belanja modal mengalami akselerasi yang sangat baik pada triwulan laporan. Rasio realisasi belanja modal terhadap pagu adalah sebesar 15,14%, dimana pencapaian tersebut jauh lebih baik daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 4,59%. Meningkatnya realisasi belanja modal ini didorong oleh dimulainya kembali pengerjaan proyek-proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Tengah yang pada tahun 2020 lalu banyak mengalami penundaan.

Seiring dengan masih belum usainya pandemi COVID-19 pemerintah terus berkomitmen untuk menjadikan konsumsi pemerintah sebagai stimulus ekonomi dalam menahan penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Tercermin dari pertumbuhan nominal APBN yang masih positif dibandingkan tahun 2020 dan peningkatan realisasi belanja pada komponen yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satu diantaranya adalah alokasi dana bansos berupa BLT yang masih berlanjut.





03

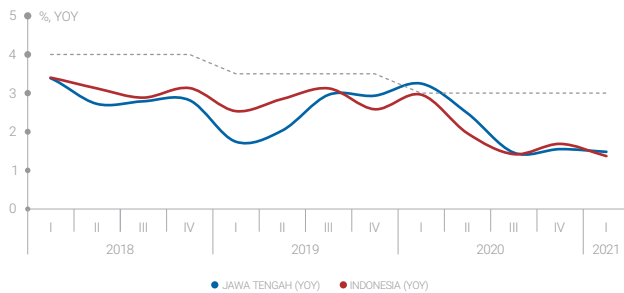
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

- 3.1. Inflasi Secara Umum
- 3.2. Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2021
 - 3.2.1. Inflasi Berdasarkan Kelompok
- 3.3. Inflasi Kota - Kota di Provinsi Jawa Tengah
 - 3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang
 - 3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Tegal
 - 3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta
- 3.4. Tracking dan Proyeksi Inflasi
 - 3.4.1. Inflasi April 2021
 - 3.4.2. Tracking Inflasi Triwulan II 2021
- 3.5. Program Pengendalian Inflasi Daerah

3.1. INFLASI SECARA UMUM

Provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,48% (yoy) pada triwulan I 2021, melanjutkan tren penurunan yang telah berlangsung sejak triwulan I 2020 (3,25%; yoy). Rendahnya inflasi Jawa Tengah sejalan dengan tren penurunan tekanan inflasi di tingkat nasional maupun kawasan Jawa yang masing-masing sebesar 1,37% (yoy) dan 1,28% (yoy) pada triwulan IV 2020. Penurunan inflasi di kawasan Jawa tersebut mencerminkan masih terbatasnya permintaan masyarakat di tengah penurunan kinerja ekonomi akibat fenomena pandemi COVID-19.

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional

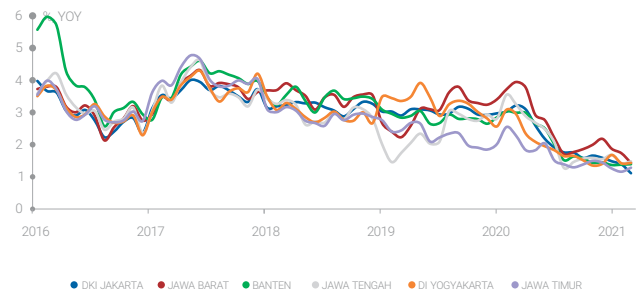


SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

3.2. PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI JAWA TENGAH TENGAH TRIWULAN I 2021

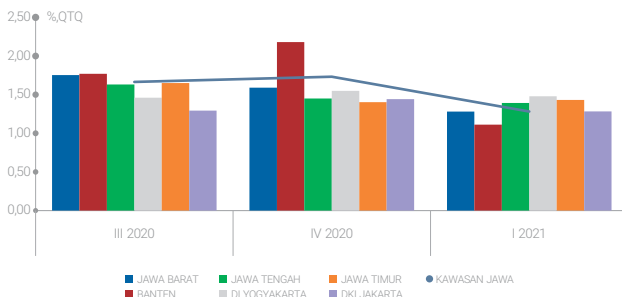
Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah menurun dibandingkan triwulan IV 2020, dari sebesar 1,55% (yoy) menjadi 1,48% (yoy). Penurunan tekanan inflasi pada triwulan I 2021 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya. Tekanan harga pada komoditas bahan pangan utama yang sempat mengalami kelangkaan pada akhir tahun 2020, akhirnya mereda pada triwulan I 2021 seiring dengan masa panen raya yang berlangsung sejak Februari-Maret 2021.

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa



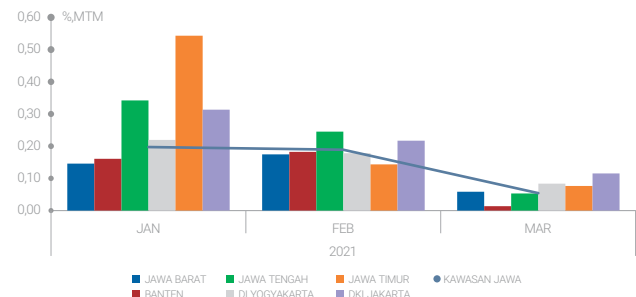
SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

JANUARI 2021		FEBRUARI 2021		MARET 2021	
KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
Angkutan Udara	0.082%	Cabai Merah	0.057%	Bawang Merah	0.047%
Cabai Rawit	0.076%	Cabai Rawit	0.031%	Nasi Dengan Lauk	0.040%
Mobil	0.032%	Bawang Merah	0.028%	Cabai Rawit	0.030%
Tarif Rumah Sakit	0.019%	Mobil	0.011%	Upah Asisten RT	0.013%
Tempe	0.019%	Rumah Sakit	0.010%	Minyak Goreng	0.011%

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

JANUARI 2021		FEBRUARI 2021		MARET 2021	
KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
Telur Ayam Ras	-0.106%	Daging Ayam Ras	-0.034%	Mobil	-0.072%
Cabai Merah	-0.080%	Emas Perhiasan	-0.033%	Cabai Merah	-0.038%
Bawang Merah	-0.016%	Jeruk	-0.024%	Emas Perhiasan	-0.019%
Bioskop	-0.016%	Minyak Goreng	-0.006%	Beras	-0.018%
Emas Perhiasan	-0.005%	Tomat	-0.006%	Cumi-cumi	-0.010%

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Tabel 3.3 Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah

KOTA	INFLASI III-2020 (% YOY)	INFLASI IV-2020 (% YOY)	INFLASI I-2021 (% YOY)
CILACAP	1.75	1.71	1.62
PURWOKERTO	1.80	1.90	1.51
KUDUS	1.14	1.23	1.36
SURAKARTA	1.46	1.36	1.92
SEMARANG	1.38	1.50	1.37
TEGAL	2.00	2.36	1.69

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Sebagian besar kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 mengalami penurunan inflasi tahunan dibandingkan triwulan lalu. Penurunan tekanan inflasi tahunan yang paling dalam berlangsung di kota Tegal, sedangkan realisasi inflasi yang paling rendah berlangsung di kota Kudus, mempertahankan tren inflasi rendah sejak awal tahun 2020.

3.2.1. Inflasi Berdasarkan Kelompok

Penurunan inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan I 2021 terutama disebabkan oleh meredanya tekanan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Tekanan harga komoditas pangan dan hortikultura utama mereda pada triwulan I 2021,

seiring dengan pulihnya pasokan produksi pertanian, baik di Jawa Tengah maupun pusat produksi lainnya di kawasan Jawa maupun Sulawesi. Selanjutnya penurunan tekanan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya terutama disumbangkan oleh meredanya inflasi emas perhiasan setelah mengalami lonjakan tinggi pada tahun 2020.

Penurunan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh Kelompok Transportasi serta Kelompok Pendidikan yang mengalami peningkatan tekanan inflasi moderat. Peningkatan tekanan harga pada kelompok Transportasi disebabkan oleh kebijakan Pemerintah yang menyesuaikan tarif di beberapa ruas tol pada awal tahun 2021. Beberapa peningkatan harga komoditas jasa transportasi juga didorong oleh permintaan masyarakat, namun dengan intensitas yang rendah.

3.2.1.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Dibandingkan triwulan sebelumnya, tekanan inflasi Jawa Tengah pada triwulan I 2021 lebih rendah, tertahan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok ini memiliki pangsa $\pm 25\%$ dari total Nilai Konsumsi Jawa Tengah, sehingga penurunan inflasinya dapat menahan inflasi Jawa

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (% YOY)	2019				2020				2021
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Umum	1.74	2.03	2.96	2.93	3.25	2.48	1.46	1.55	1.48
Makanan, Minuman dan Tembakau	0.88	2.10	3.20	3.98	6.82	4.13	2.80	4.17	2.05
Pakaian Dan Alas Kaki	2.31	2.02	2.16	1.93	1.83	1.36	1.11	0.98	1.17
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1.03	0.90	3.47	3.24	3.09	3.26	0.47	0.63	0.86
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4.53	4.35	4.07	4.00	2.22	2.19	1.50	1.26	2.09
Kesehatan	1.66	2.51	2.54	2.67	2.61	2.19	2.25	2.32	2.82
Transportasi	3.00	2.51	2.27	1.45	1.00	0.47	0.64	-0.93	0.63
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.29	0.61	0.44	0.24	0.07	-0.20	-0.57	-0.64	-0.59
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.66	1.70	1.71	1.90	1.50	1.29	1.79	1.73	1.57
Pendidikan	1.78	1.72	3.22	3.33	-0.71	-0.68	-2.96	-3.16	0.61
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.98	2.47	2.46	2.40	2.70	1.68	1.65	1.74	2.20
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2.98	3.23	4.77	4.02	5.15	6.26	7.44	6.37	3.52

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

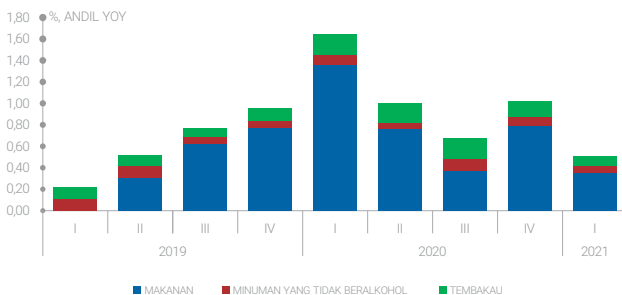
Tengah. Meredanya tekanan harga kelompok ini berlangsung pada bulan Februari-Maret 2021, didorong oleh pulihnya pasokan produk pertanian di kawasan Jawa maupun Sulawesi.

Penurunan tekanan inflasi kelompok ini, terutama berlangsung pada Subkelompok Makanan, khususnya pada komoditas Beras, Bawang Merah, Cabai Merah, dan Cabai Rawit. Komoditas beras sebagai salah satu komoditas pangan strategis mengalami deflasi sejak Februari 2021 sejalan dengan masa panen yang berlangsung di sentra-sentra pertanian seperti Kabupaten Grobogan, Demak, dan Blora. Produksi beras pada masa tanam I 2021 (Oktober 2020 – Maret 2021) relatif baik, dengan fenomena gangguan iklim La Nina berdampak minimal terhadap produktivitas. Data perkiraan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan luas panen komoditas padi sebesar 81,10% (yoy) pada triwulan I 2021.

Gangguan La Nina diperkirakan berdampak pada keterlambatan masa panen di beberapa sentra produksi hortikultura di kawasan Jawa Tengah bagian tengah dan selatan, utamanya pada komoditas hortikultura Cabai Merah dan Cabai Rawit. Curah hujan yang tinggi sebagai dampak gangguan iklim La Nina menyebabkan produktivitas hortikultura relatif menurun di daerah produksi, khususnya Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang. Meskipun demikian, tekanan inflasi pada komoditas hortikultura berangsur-angsur berkurang setelah masa panen berlangsung pada sentra produksi di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Banjarnegara sejak pertengahan Februari 2021.

Berkurangnya tekanan inflasi pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras juga disebabkan oleh stabilnya pasokan. Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada September 2020 lalu, ditujukan untuk mengatur volume bibit ayam (*day old chicken*), sehingga diharapkan tingkat budidaya komoditas peternakan akan relatif stabil dalam jangka menengah. Secara jangka panjang, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi gejolak harga komoditas ayam ras yang berlangsung tinggi secara musiman setiap rentang waktu 3-4 (tiga hingga empat) bulan.

Grafik 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Komoditas Utama – Kelompok Makanan, Minuan, dan Tembakau

INFLASI (%; YOY)	2020				2021
	I	II	III	IV	I
Beras	0.30	3.81	1.96	0.92	-1.38
Telur Ayam Ras	15.18	4.41	5.94	7.61	-7.14
Daging Ayam Ras	5.79	13.16	-0.16	2.26	-0.62
Bawang Merah	21.14	42.54	50.53	-8.82	7.18
Bawang Putih	26.04	-31.50	-15.59	-9.03	-36.91
Cabai Merah	128.29	-27.52	-34.80	101.94	41.33
Cabai Rawit	69.58	-5.49	-57.57	0.08	78.20

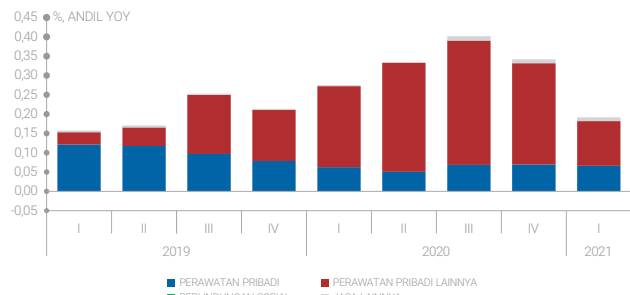
SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

3.2.1.2. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga menjadi kontributor penurunan inflasi di Jawa Tengah. Inflasi tahunan kelompok ini sebesar 3,52% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,37% (yoy). Walaupun pangsa Nilai Konsumsinya relatif kecil terhadap total konsumsi masyarakat Jawa Tengah ($\pm 5,7\%$), namun tren penurunan indeks harga yang telah berlangsung sejak triwulan IV 2020 berdampak terhadap inflasi Jawa Tengah.

Penurunan tekanan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan yang mengalami penurunan inflasi dari 26,47% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 9,97% (yoy) pada periode laporan. Penurunan ini sejalan dengan perkembangan emas di pasar perdagangan dunia yang juga terus mencatatkan penurunan dari puncak harga pada Agustus 2020. Pada awal krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, investor di seluruh dunia berusaha mengalihkan aset kekayaan kepada instrumen berbasis komoditas emas yang diyakini berisiko rendah. Seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi di sebagian negara maju, para investor kembali mendiversifikasi aset keuangannya, sehingga mengurangi permintaan emas dunia.

Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Tahunan Komoditas Utama – Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI (%; YOY)	2020				2021
	I	II	III	IV	I
Bedak	4.62	4.08	4.42	2.73	2.07
Parfum	1.15	1.62	2.52	3.33	2.50
Pasta Gigi	2.81	2.43	2.44	3.15	2.17
Shampo	2.87	2.63	1.95	2.23	1.79
Emas Perhiasan	23.66	31.61	32.48	26.47	9.97

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Tahunan Komoditas Utama – Kelompok Transportasi

INFLASI (%; YOY)	2020				2021
	I	II	III	IV	I
Mobil	2.10	4.08	2.27	2.25	-0.61
Sepeda Motor	2.66	1.62	2.60	1.53	1.41
Pemeliharaan/Service	4.57	2.43	4.53	5.91	2.71
Angkutan Udara	-10.16	2.63	-0.49	-16.25	-4.34
Tarif Kereta Api	6.05	31.61	1.12	-7.90	1.62

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

3.2.1.3. Kelompok Transportasi

Kelompok Transportasi kembali mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan I 2021, setelah sebelumnya mengalami tren penurunan harga di sepanjang tahun 2020. Peningkatan inflasi terjadi pada Subkelompok Jasa Angkutan Penumpang yaitu sebesar 2,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2020 (-5,69%; yoy). Kontributor inflasi terbesar berasal dari komoditas jasa Angkutan Udara dan Tarif Kereta Api yang mencatatkan inflasi masing-masing sebesar -4,34% (yoy) dan 1,62% (yoy); atau meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar -16,25% (yoy) dan -7,90% (yoy). Periode hari raya Natal dan tahun baru menyebabkan peningkatan mobilisasi masyarakat meskipun lebih rendah dibandingkan historisnya, sebagai dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah dalam penanganan pandemi. Hal ini juga tercermin dari nihilnya perkembangan tekanan harga pada komoditas jasa angkutan lainnya seperti angkutan antar kota, angkutan laut, dan kendaraan travel.

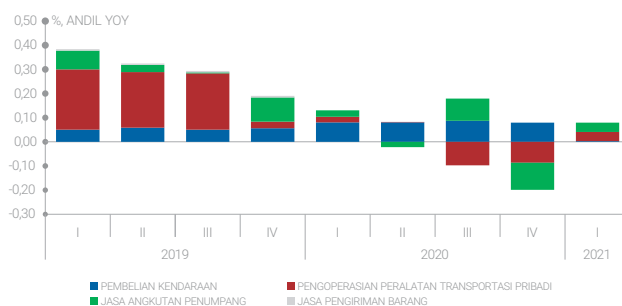
Subkelompok Pembelian Kendaraan serta subkelompok Pengoperasian Transportasi Pribadi juga mengalami peningkatan inflasi. Hal ini sejalan dengan pola historisnya, dimana para pelaku produsen barang dan jasa melakukan penyesuaian harga pada awal tahun, sebagai langkah bisnis dengan mempertimbangkan ekspektasi inflasi pada biaya produksi. Inflasi komoditas Mobil serta jasa Pemeliharaan (Service) pada Januari 2021 juga mencerminkan tren historis yang berlangsung setiap awal tahun. Namun demikian,

peningkatan tekanan inflasi ini berkurang setelah Pemerintah memberlakukan insentif dengan menurunkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan jenis tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021. Komoditas lain yang mendorong peningkatan inflasi pada kelompok Transportasi adalah komoditas jasa Jalan Tol yang mencatatkan peningkatan indeks harga sebesar 6,13% (yoy) pada triwulan I 2021. Namun demikian kenaikan tarif jalan tol relatif terbatas, dan hanya berdampak signifikan terhadap inflasi kota Semarang dan kota Surakarta.

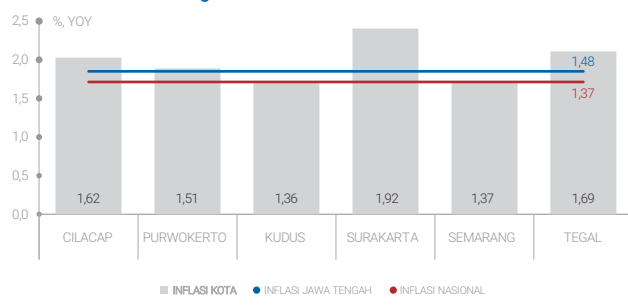
3.3. INFLASI KOTA – KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Penurunan inflasi tahunan pada keseluruhan tahun 2020 berlangsung di hampir seluruh kota pantauan inflasi Jawa Tengah, dengan pengecualian kota Surakarta dan kota Kudus yang justru mengalami peningkatan tekanan inflasi.

Berdasarkan kelompoknya, penurunan inflasi kota-kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mayoritas disebabkan oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Sumber penurunan laju inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tersebut terutama berlangsung pada bahan pangan utama, khususnya komoditas hortikultura beras dan cabai merah yang sumber pasokannya berasal dari daerah produksi intra Jawa Tengah, maupun daerah lain yaitu Provinsi Jawa Timur.

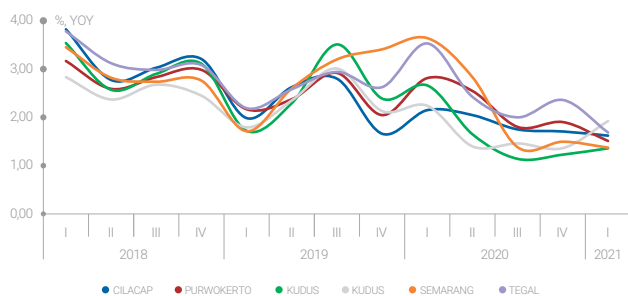
Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Transportasi

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Grafik 3.8 Inflasi Tahunan Triwulan III 2020 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang

Sejalan dengan perkembangan di tingkat Provinsi, Kota Semarang mencatatkan penurunan inflasi dari 1,50% (yoy) pada triwulan IV 2020, menjadi 1,37% (yoy) pada periode laporan. Kota Semarang dengan pangsa terbesar ($\pm 61\%$) terhadap pembentukan inflasi Jawa tengah, mengalami penurunan tekanan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sehingga kelompok tersebut juga menjadi penahan utama laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan I 2021.

Sejalan dengan perkembangan di tingkat provinsi maupun nasional, penurunan tekanan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya disebabkan oleh membaiknya pasokan produksi pertanian di dalam negeri. Peran kota Semarang sebagai pusat konsumsi di Jawa Tengah sekaligus sebagai kota pusat (*hub*) perdagangan untuk komoditas pertanian dari sentra produksi Jawa Tengah bagian selatan, menyebabkan perkembangan harga komoditas bahan makanan berlangsung lebih awal dan lebih kuat dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya. Hal ini tercermin pada komoditas beras dan cabai merah yang mencatatkan deflasi triwulanan

masing-masing sebesar -0,12% (qtq) dan -12,33% (qtq); lebih dalam dibandingkan rerata kota pantauan lainnya sebesar -0,08% (qtq). dan -4,98% (qtq).

Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi di Kota Semarang juga berlangsung lebih kuat dibandingkan kota pantauan lainnya. Hal ini terutama didorong oleh kenaikan tarif pada beberapa ruas tol yang melalui kota Semarang, seperti Tol Semarang-Batang, Tol Semarang-Ungaran, serta Tol Intra kota Semarang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tol Trans Jawa.

3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Tegal

Kota Tegal juga mencatatkan penurunan laju inflasi tahunan pada triwulan I 2021, sejalan dengan tren perkembangan inflasi Jawa Tengah maupun kawasan Jawa. Perkembangan indeks harga komoditas di Tegal secara umum selaras dengan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari penurunan indeks harga pada Kelompok Barang Dan Jasa Makanan, Minuman, dan Tembakau. Lebih lanjut lagi, penurunan tekanan inflasi pada Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki.

Penurunan tekanan inflasi juga terjadi pada Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, terutama disumbangkan oleh Subkelompok Koran, Buku, Dan Perlengkapan Sekolah. Tren yang berlangsung di kota Tegal tersebut sedikit berbeda dengan yang berlangsung di kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah, dengan komoditas Buku Pelajaran mengalami penurunan indeks harga yang signifikan pada masa periode tahun ajaran baru, baik pada semester genap (triwulan I 2021) dan berlangsung di seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi).

Tabel 3.8 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Semarang Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH		SEMARANG	
	IV-2020	I-2021	IV-2020	I-2021
Umum	1.55	1.48	1.50	1.37
Makanan, Minuman dan Tembakau	4.17	2.05	5.05	2.41
Pakaian Dan Alas Kaki	0.98	1.17	0.29	0.66
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0.63	0.86	0.59	0.85
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.26	2.09	1.18	2.15
Kesehatan	2.32	2.82	1.71	1.28
Transportasi	-0.93	0.63	-1.77	0.10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.64	-0.59	-0.83	-0.71
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.73	1.57	0.66	-0.23
Pendidikan	-3.16	0.61	-2.80	0.47
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.74	2.20	1.03	2.18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6.37	3.52	8.02	4.23

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Tabel 3.9 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Tegal Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH		TEGAL	
	IV-2020	I-2021	IV-2020	I-2021
Umum	1.55	1.48	2.36	1.69
Makanan, Minuman dan Tembakau	4.17	2.05	4.41	2.06
Pakaian Dan Alas Kaki	0.98	1.17	4.02	3.17
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0.63	0.86	0.33	0.59
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.26	2.09	2.70	2.50
Kesehatan	2.32	2.82	2.89	2.09
Transportasi	-0.93	0.63	1.34	2.38
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.64	-0.59	1.20	0.63
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.73	1.57	6.27	3.00
Pendidikan	-3.16	0.61	-2.70	0.08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.74	2.20	1.76	1.44
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6.37	3.52	4.20	2.59

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga mengalami penurunan inflasi, berlawanan arah dengan tren yang berlangsung di tingkat Provinsi. Komoditas utama yang mengalami tekanan harga merupakan barang kebutuhan sandang bagi kalangan pelajar dan anak-anak, seperti Seragam Sekolah Wanita, Seragam Sekolah Pria, dan Seragam Sekolah Anak. Hal ini diperkirakan sebagai dampak lanjutan dari penurunan biaya pendidikan yang berlangsung di Kota Tegal pada triwulan III 2020, bersamaan dengan awal periode semester ganjil pendidikan.

3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta

Kota Surakarta justru mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan I 2021. Inflasi kota Surakarta sebesar 1,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,36% (yoy). Hal utama yang menjadi pendorong inflasi di Kota Surakarta

menjadi lebih tinggi dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah adalah Kelompok Kesehatan serta Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.

Sementara itu, Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya di Kota Surakarta juga mencatatkan peningkatan inflasi, berlawanan dengan perkembangan yang berlangsung di Jawa Tengah. Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 3,77% (yoy) pada triwulan I 2021, meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,06% (yoy). Berlawanan dengan yang berlangsung di Kota Tegal, Subkelompok Koran, Buku, Dan Perlengkapan Sekolah justru mencatatkan inflasi yang tinggi. Beberapa komoditas yang mencatatkan inflasi yang tinggi adalah Buku Tulis Bergaris, Kertas HVS, serta Pensil Hitam pada bulan Januari-Februari 2021 bersamaan dengan awal periode semester ganjil pendidikan.

Tabel 3.10 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Surakarta Berdasarkan Kelompok

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	JAWA TENGAH		SURAKARTA	
	IV-2020	I-2021	IV-2020	I-2021
Umum	1.55	1.48	1.36	1.92
Makanan, Minuman dan Tembakau	4.17	2.05	1.51	0.63
Pakaian Dan Alas Kaki	0.98	1.17	2.60	2.99
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0.63	0.86	1.08	1.10
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.26	2.09	0.38	0.64
Kesehatan	2.32	2.82	3.76	11.92
Transportasi	-0.93	0.63	-0.52	2.31
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.64	-0.59	-0.08	0.34
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.73	1.57	1.06	3.77
Pendidikan	-3.16	0.61	-2.16	1.90
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.74	2.20	5.37	3.52
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6.37	3.52	2.22	2.24

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Tabel 3.11 Perkembangan Inflasi Tahunan Komoditas Utama – Kelompok Kesehatan di Kota Surakarta

INFLASI (%; YOY)	2020				2021
	I	II	III	IV	I
Tarif Dokter Gigi	3.09	0.00	0.00	0.00	22.47
Tarif Dokter Spesialis	2.41	2.41	2.41	2.41	14.41
Tarif Dokter Umum	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
Tarif Rumah Sakit	8.75	8.75	8.75	8.75	21.76
Tarif Check Up	0.67	0.67	0.67	0.67	7.41

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH

Kelompok Kesehatan juga mencatatkan peningkatan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah, sebesar 11,92% (yoy) pada triwulan I 2021; atau meningkat signifikan dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 3,76% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi ini terutama bersumber dari Subkelompok Jasa Perawatan, seperti komoditas jasa Dokter Gigi, Dokter Umum, Dokter Spesialis, Tarif Rumah Sakit, serta Biaya Check Up. Fenomena ini diperkirakan sebagai langkah strategi pelaku penyelenggara jasa kesehatan dalam mengompensasi peningkatan biaya produksi yang meningkat tinggi sepanjang tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19.

3.4. TRACKING DAN PROYEKSI INFLASI

3.4.1. Inflasi April 2021

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2021 sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,08% (mtm). Realisasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan rerata lima tahun terakhir yang sebesar 0,12% (mtm). Walaupun demikian, inflasi Jawa Tengah secara tahunan masih lebih tinggi (1,52%; yoy) dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 1,42% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan inflasi Jawa Tengah pada April 2021 terutama disebabkan oleh meredanya tekanan harga Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Sementara itu, walaupun masih menjadi kontributor deflasi bagi Provinsi Jawa Tengah, Kelompok Transportasi mulai mencatatkan peningkatan tekanan harga dibandingkan bulan lalu.

Penurunan tekanan harga yang signifikan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama disebabkan oleh meredanya tekanan harga komoditas hortikultura, diantaranya cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Inflasi cabai merah dan cabai rawit yang berlangsung sejak November 2020, telah berbalik arah menjadi deflasi seiring dengan pulihnya pasokan produksi di Kabupaten Temanggung, Magelang, Banjarnegara, serta Brebes. Selanjutnya, harga komoditas beras juga terus mengalami penurunan seiring dengan masa panen raya yang

masih berlangsung hingga bulan April 2021 diantaranya di Kabupaten Grobogan, Demak, dan Blora. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (Kementan, Kemendag, Bulog) untuk melaksanakan program Serap Gabah (SERGAB) dalam rangka memitigasi risiko rendahnya harga gabah di tingkat petani, mengingat kualitas gabah yang relatif memburuk akibat tingginya curah hujan pada masa fenomena La Nina. Penurunan indeks harga bahan makanan tersebut selanjutnya menahan inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, lebih rendah dari tren historis hari raya keagamaan.

Deflasi pada Kelompok Transportasi juga masih berlangsung pada April 2021, walaupun intensitasnya lebih kecil dibandingkan bulan Maret 2021. Insentif Pemerintah berupa penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil masih menahan laju inflasi di Jawa Tengah. Selanjutnya, kebijakan Pemerintah dalam memberlakukan pembatasan mobilisasi masyarakat antar daerah juga turut menahan inflasi pada komoditas jasa transportasi seperti angkutan udara, kereta api, dan angkutan antar kota, yang secara historisnya meningkat tinggi pada periode perayaan hari besar keagamaan.

Walaupun tekanan inflasi masih rendah, terdapat potensi risiko peningkatan inflasi khususnya dari faktor eksternal. Harga komoditas di pasar internasional mulai mengalami peningkatan diantaranya komoditas jagung, kedelai dan *crude palm oil* (CPO). Komoditas jagung dan kedelai yang menjadi komponen utama pakan ternak masih terus melanjutkan tren inflasi yang tinggi sejak Mei 2020, akibat gangguan produksi di Amerika Serikat dan Brazil. Peningkatan juga terjadi pada harga komoditas minyak goreng di domestik akibat penurunan produksi CPO di Malaysia.

3.4.2. Tracking Inflasi Triwulan II 2021

Inflasi Jawa Tengah pada triwulan II diperkirakan masih akan meningkat secara terbatas. Peningkatan laju inflasi tersebut diperkirakan bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya pada beberapa komoditas utama yang sangat bergantung pada perkembangan harga di pasar perdagangan internasional. Peningkatan harga *crude palm oil* (CPO), jagung, dan kedelai di pasar internasional masih terus berlanjut akibat gangguan produksi di negara produsennya seperti Malaysia, Amerika Serikat, dan Brazil. Hal ini meningkatkan risiko inflasi pada komoditas minyak goreng, tempe dan tahu, serta komoditas peternakan (daging dan telur ayam ras) yang sangat bergantung pada pasokan impor pakan ternak.

Risiko peningkatan yang moderat juga diperkirakan akan berlangsung pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya. Permintaan masyarakat terhadap

komoditas-komoditas sewa maupun pemeliharaan tempat tinggal di awal tahun 2021 diperkirakan masih belum setinggi tren historisnya, mempertimbangkan lesunya kondisi perekonomian sepanjang tahun 2020. Sementara itu, dari sisi penawaran, terdapat risiko terbatas dimana beberapa komoditas utama bahan bangunan juga mulai menunjukkan peningkatan harga yang minimal. Penurunan produksi bahan material dalam negeri sepanjang tahun 2020 menyebabkan kelangkaan pasokan bahan material secara temporal. Pemerintah juga diperkirakan akan menahan kebijakan reformasi tarif pada komoditas-komoditas utilitas publik seperti tarif Air Minum PAM maupun tarif Listrik, untuk menjaga ketahanan daya beli masyarakat.

Rekonsiliasi data pada aplikasi Sistem Informasi Logistik Daerah (Sislogda) dan pemantauan secara berkala terkait pengembangan kelembagaan petani dan penerapan sistem resi gudang terhadap Badan Usaha Milik Petani PT. Pengayom Tani Sejagad.

3.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Dalam rangka pengendalian harga barang dan jasa, Bank Indonesia selalu berkoordinasi secara aktif dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan beberapa program kegiatan yang telah dijalankan selama triwulan laporan, diantaranya:

1. Menyiapkan data stok ditingkat petani, pedagang, distributor dan importir bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
2. Pemanfaatan gudang-gudang pemerintah daerah oleh para pelaku usaha, khususnya Badan Usaha Milik Desa serta Badan Usaha Milik Petani untuk melakukan penyimpanan pasokan produk pertanian.
3. Melakukan koordinasi langkah-langkah antisipasi kenaikan harga bahan pokok melalui antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi dengan distributor utama untuk memastikan penerapan harga jual yang wajar sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi, sekaligus memantau ketersediaan dan kelancaran distribusi produk-produk impor utama seperti bawang putih dan gula pasir, ke berbagai daerah di Jawa Tengah.
 - b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pasar *online* yang dikembangkan kabupaten/kota kemudian mempublikasikan informasi tersebut ke seluruh masyarakat Jawa Tengah.
 - c. Melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pedagang untuk belanja bijak dan tidak menimbun bahan pokok dalam jumlah besar.
 - d. Berkoordinasi dengan forum petani champion cabai dan bawang merah se-Jawa Tengah agar memaksimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 - e. Koordinasi dengan pusat terkait Ketepatan waktu realisasi ijin impor khususnya untuk bawang putih dan gula pasir.





04

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN UMKM

- 4.1. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah
 - 4.1.1. Perkembangan Bank Umum
 - 4.1.2. Perkembangan Kinerja Perbankan secara Spasial
- 4.2. Ketahanan Sistem Keuangan Daerah di Jawa Tengah
 - 4.2.1. Risiko Kredit Perbankan di Jawa Tengah
 - 4.2.2. Risiko Likuiditas Perbankan di Jawa Tengah
 - 4.2.3. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

4.1. KONDISI UMUM PERBANKAN JAWA TENGAH

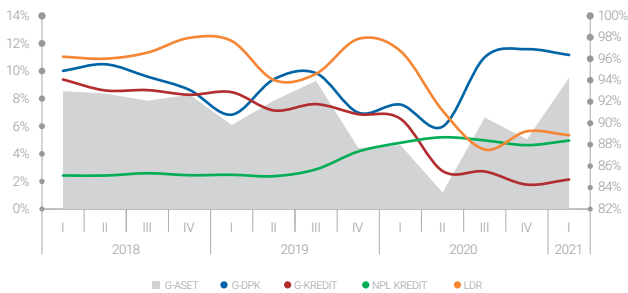
Stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan I 2021 relatif membaik dibandingkan triwulan IV tahun 2020. Beberapa indikator perbankan di Jawa Tengah yaitu kredit dan aset mengalami perbaikan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sedikit melambat walaupun secara nominal lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit masih didominasi oleh sektor ekonomi utama Jawa Tengah, sehingga dapat menopang kinerja perekonomian.

Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah mencapai Rp307,02 triliun pada triwulan I 2021, tumbuh 2,14% (yoy) dibandingkan triwulan lalu (1,77%; yoy). Perbaikan kinerja kredit juga terjadi pada provinsi lainnya di kawasan Jawa, kecuali provinsi DKI Jakarta yang mengalami perlambatan penyaluran kredit sejak triwulan II 2020. Sebagian besar capaian penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah maupun provinsi lainnya di kawasan Jawa pada triwulan laporan berada pada target penyaluran kredit yaitu sebesar 2-3%. Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit sektor utama Jawa Tengah yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian seluruhnya mengalami pertumbuhan positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2020. Hal ini mengindikasikan mulai bergeraknya aktivitas perekonomian, sehingga kebutuhan pendanaan dari perbankan juga meningkat.

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), pada triwulan ini DPK perbankan di Jawa Tengah mencapai Rp345,44 triliun, atau tumbuh 11,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2020 yang mencapai 11,59% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK ini sejalan dengan mulai membaiknya konsumsi masyarakat pada triwulan I 2021. Berdasarkan komponennya, perlambatan DPK di Jawa Tengah terjadi pada komponen tabungan dan deposito.

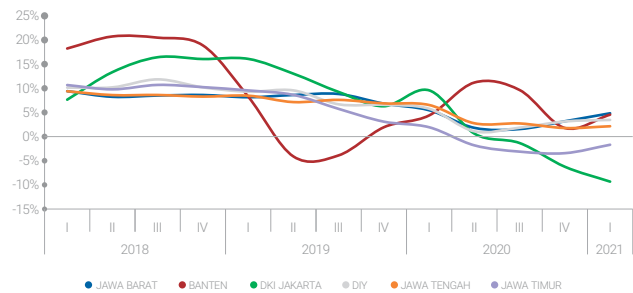
Meskipun penyaluran kredit mulai membaik, namun peningkatan nominal DPK (1,29%; qdq) yang lebih tinggi dibandingkan nominal kredit (0,88%; qdq) menyebabkan rasio intermediasi yaitu *loan to deposit ratio* (LDR) di Jawa Tengah menurun dari 89,24% menjadi 88,88%. Disisi lain, kualitas kredit mengalami penurunan yang tercermin dari meningkatnya rasio *non performing loan* (NPL). NPL perbankan di Jawa Tengah sebesar 4,96% pada triwulan ini, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,63%) terutama disebabkan peningkatan NPL kredit modal kerja pada sektor industri pengolahan dan perdagangan seiring dengan belum selesainya proses restrukturisasi kredit.

Grafik 4.1 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah



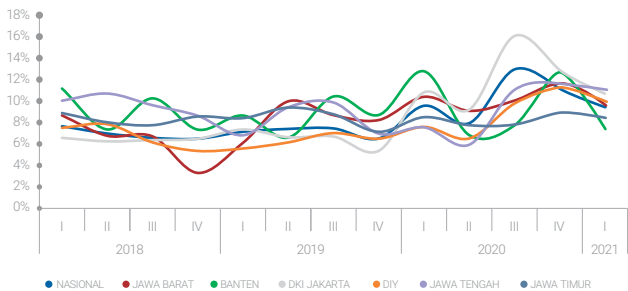
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa



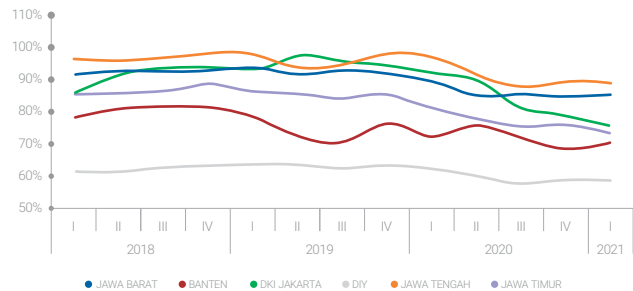
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.4 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah

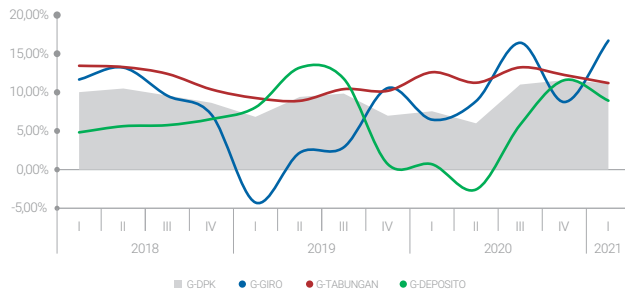


SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

4.1.1. Perkembangan Bank Umum

4.1.1.1. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Grafik 4.5 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah

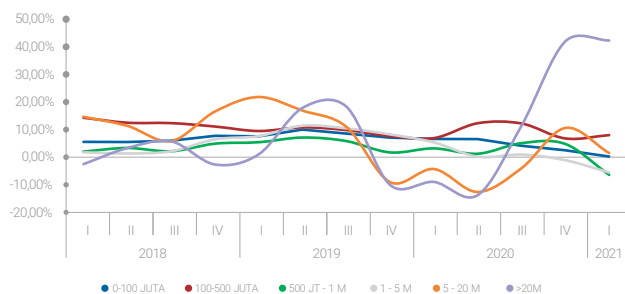


SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Pertumbuhan DPK pada triwulan I 2021 mencapai 11,16% (yoy) sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (11,59%; yoy). Perlambatan DPK tersebut, utamanya disebabkan oleh komponen tabungan dan deposito.

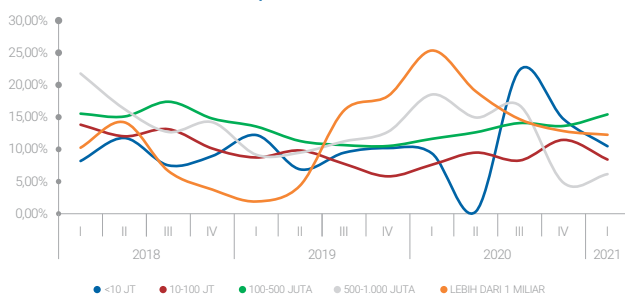
Komponen deposito didominasi oleh deposan dengan nilai lebih dari Rp20 miliar (pangsa 27,71%), serta Rp100-500 juta (pangsa 20,67%). Perlambatan deposito terjadi pada kelompok deposito <Rp100 juta dan Rp500 juta s.d. Rp5 miliar. Perlambatan deposito dengan nominal kecil mengindikasikan adanya pencairan dana untuk kebutuhan konsumsi.

Grafik 4.6 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

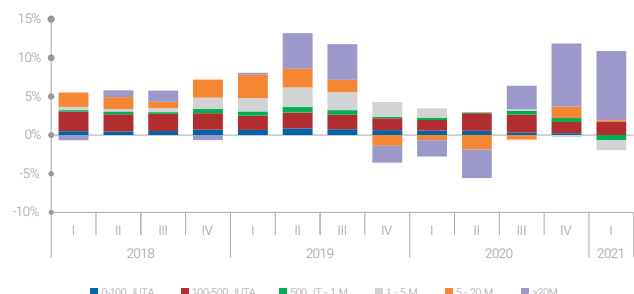
11. Secara tahunan, pada triwulan I 2021 giro tumbuh 16,69% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2020 (8,75%; yoy). Sebaliknya perlambatan perlambatan terjadi pada tabungan (dari 12,25%; yoy menjadi 11,20%; yoy) dan deposito (dari 11,28%; yoy menjadi 8,92%; yoy).

Sementara itu, peningkatan pertumbuhan deposito dengan nominal diatas Rp20 miliar mengindikasikan pergeseran nominal deposito ke kelompok yang lebih besar. Hal ini tercermin pada peningkatan pangsa deposito dengan nominal lebih dari Rp20 miliar dari 24,77% pada triwulan IV 2020 menjadi 27,71% pada triwulan I 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat kelompok menengah atas masih menahan konsumsi dan memilih untuk menyimpan dananya, salah satunya dalam bentuk deposito.

Komponen tabungan mengalami perlambatan dari 12,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 11,20% (yoy)¹². Berdasarkan nominal tabungan, perlambatan terjadi pada nasabah dengan rentang nilai simpanan Rp10-100 juta (dari 11,47%; yoy menjadi 8,41%; yoy). Hal ini mengindikasikan adanya pengeluaran konsumsi masyarakat namun pada tingkat yang terbatas, utamanya pada pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini juga tercermin pada membaiknya komponen konsumsi RT pada PDRB triwulan I 2021 sebesar -1,89% (yoy) dibanding triwulan IV 2020 sebesar -2,38% (yoy).

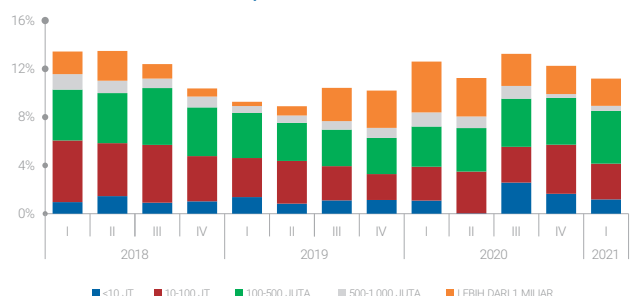
Sementara itu, pertumbuhan giro perbankan di Jawa Tengah meningkat signifikan sebesar 16,69% (yoy) dari 8,75% (yoy) pada triwulan IV 2020. Komponen giro didominasi oleh kelompok nilai lebih dari Rp20 miliar (pangsa 44,29%), serta kelompok nilai Rp1-5 miliar (pangsa 20,02%). Peningkatan pertumbuhan giro terjadi pada sektor swasta baik lembaga keuangan non bank, korporasi,

Grafik 4.7 Andil Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



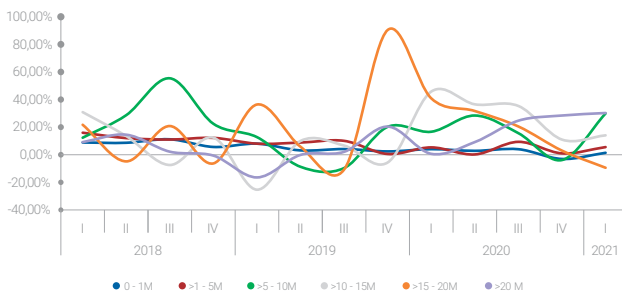
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.9 Andil Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

12. Komponen tabungan perbankan Jawa Tengah didominasi oleh nasabah dengan rentang nilai simpanan Rp10-100 juta (pangsa 35,40%) dan Rp100-500 juta (pangsa 29,50%).

Grafik 4.10 Perkembangan Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

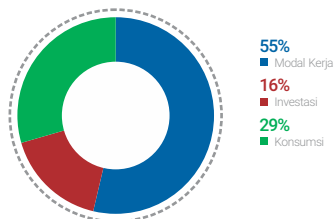
swasta lainnya dan perseorangan. Peningkatan giro yang tertinggi terjadi pada giro lembaga keuangan non bank (naik 19,06%; qtd). Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang signifikan seiring dengan kebijakan relaksasi fiskal pemerintah untuk kendaraan bermotor.

4.1.1.2. Penyaluran Kredit

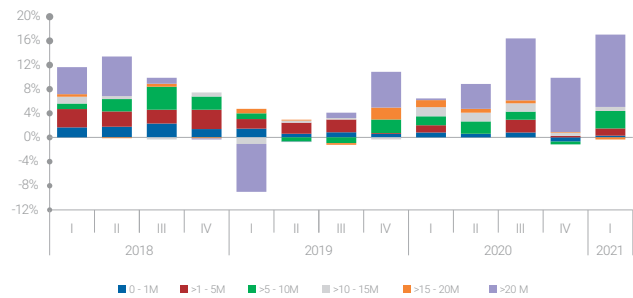
Kinerja penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan I 2021 membaik. Penyaluran kredit di Jawa Tengah pada triwulan ini sebesar Rp307,02 triliun, atau tumbuh 2,14% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu (1,77%; yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit masih didominasi oleh kredit produktif¹³.

Peningkatan penyaluran kredit di Jawa Tengah terjadi pada Kredit Modal Kerja sebesar 4,57% (yoy) dibandingkan 3,18% (yoy) pada triwulan IV 2020. Peningkatan KMK disebabkan oleh sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran. Aktivitas ekonomi yang mulai membaik pada triwulan I 2021 terutama dipicu oleh industri rokok dan industri berorientasi ekspor seperti industri tekstil serta penjualan motor.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah masih berfokus pada sektor utama, antara lain sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 31,73% dari total

Grafik 4.12 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Penggunaan

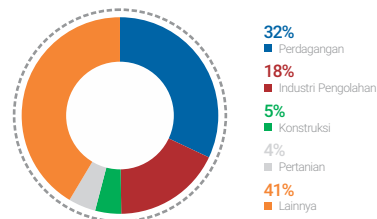
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.11 Andil Pertumbuhan Giro Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai

SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

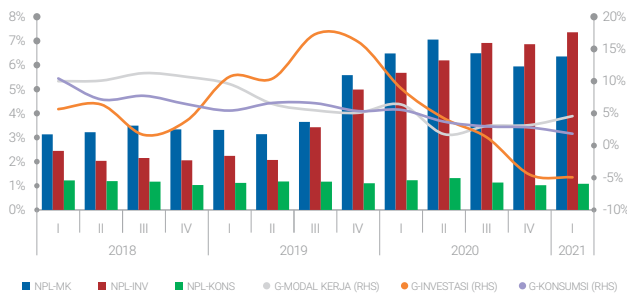
kredit), industri pengolahan (pangsa 17,86%) dan sektor konstruksi (pangsa 4,51%). Dari ketiga sektor utama tersebut, kredit sektor konstruksi masih mengalami kontraksi, namun lebih baik dari triwulan sebelumnya (dari -10,71%; yoy menjadi -8,02%; yoy) didorong oleh subsektor bangunan jalan tol, sejalan dengan masih tingginya proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Masih tingginya prospek penyaluran kredit sektor konstruksi juga tercermin dari perbaikan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi pada PDRB Jawa Tengah, yaitu dari -4,40% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 0,79% (yoy) pada triwulan I 2021.

Penyaluran kredit kepada sektor perdagangan meningkat (dari 0,97%; yoy menjadi 1,61%; yoy). Peningkatan kredit yang cukup besar terjadi pada subsektor penjualan sepeda motor (dari -19,13%; yoy menjadi -10,82%; yoy) walaupun masih mengalami kontraksi. Peningkatan kredit penjualan sepeda motor tersebut diindikasikan sebagai salah satu respon pelaku usaha untuk memanfaatkan momentum relaksasi kebijakan fiskal pemerintah khususnya terkait otomotif. Penambahan kredit akan digunakan oleh pelaku usaha sebagai modal kerja untuk mendorong peningkatan penjualan otomotif selama masa relaksasi kredit. Selain itu, perdagangan eceran makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami peningkatan (dari 2,50%; yoy menjadi 5,25%; yoy).

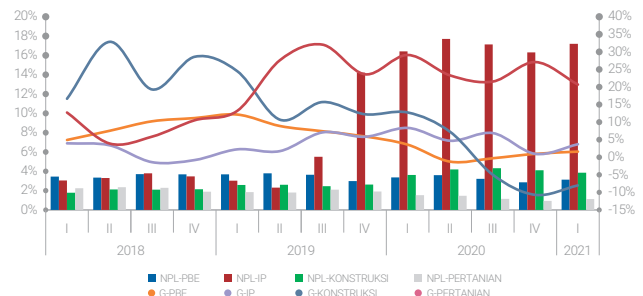
Grafik 4.13 Pangsa Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha

SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

13. Penyaluran kredit terbesar adalah Kredit Modal Kerja (pangsa 54,77%), diikuti oleh Kredit Konsumsi (pangsa 29,37%) dan Kredit Investasi (pangsa 15,86%)

Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengunaan

SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.15 Perkembangan Rasio NPL Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Tabel 4.1 Pengelompokkan Kredit Berdasarkan Nilai

KREDIT	NOMINAL (RP MILIAR)	JUMLAH REKENING	PERSENTASE NOMINAL	PERSENTASE REKENING
0-100 juta	73.798	3.485.247	24,04%	85,46%
100-500 juta	91.712	540.712	29,87%	13,26%
500 juta - 1 Miliar	14.823	25.574	4,83%	0,63%
>1 - 5 M	37.226	21.518	12,12%	0,53%
>5 - 20 M	27.207	3.946	8,86%	0,10%
>20 M	62.252	1.192	20,28%	0,03%
TOTAL	307.019	4.078.189	100%	100,00%

SUMBER: LAPORAN BANK UMUM, DIOLAH

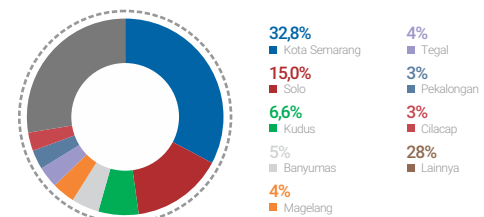
Kredit kepada sektor Industri Pengolahan juga mengalami peningkatan (dari 0,96%; yoy menjadi 3,71%; yoy). Hal ini terutama didorong oleh peningkatan kredit pada subsektor industri rokok dan industri pakaian jadi. Peningkatan permintaan kredit pada industri pengolahan juga sejalan dengan kinerja lapangan usaha tersebut pada PDRB Jawa Tengah yang mengalami perbaikan dari -6,10% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi -3,94% (yoy) pada triwulan I 2021. Hal ini mengindikasikan mulai membaiknya kinerja dan aktivitas produksi industri, yang didorong oleh kenaikan permintaan baik domestik maupun global.

Berdasarkan kelompok nilai, mayoritas penyaluran kredit di Jawa Tengah didominasi oleh kredit dengan nominal kurang dari Rp500 juta (pangsa 53,91% terhadap total kredit). Sementara berdasarkan jumlah debitur, mayoritas debitur (85,46%) memiliki kredit dengan nominal kurang dari Rp100 juta. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penyaluran kredit di Jawa Tengah tidak terkonsentrasi pada nominal kredit besar dan relatif merata pada nominal kecil sehingga dapat meminimalkan risiko sistemik. Meskipun demikian, perlu diperhatikan pangsa kredit dengan nominal di atas Rp20 miliar yang mencapai 20,28% dari total kredit namun hanya dimiliki oleh 0,03% debitur. Mayoritas kredit dengan nominal di atas Rp20 miliar tersebut adalah debitur sektor swasta Bukan Lembaga Keuangan, sehingga memiliki mitigasi risiko yang cukup baik untuk meminimalkan terjadinya berbagai risiko keuangan.

4.1.2. Perkembangan Kinerja Perbankan secara Spasial

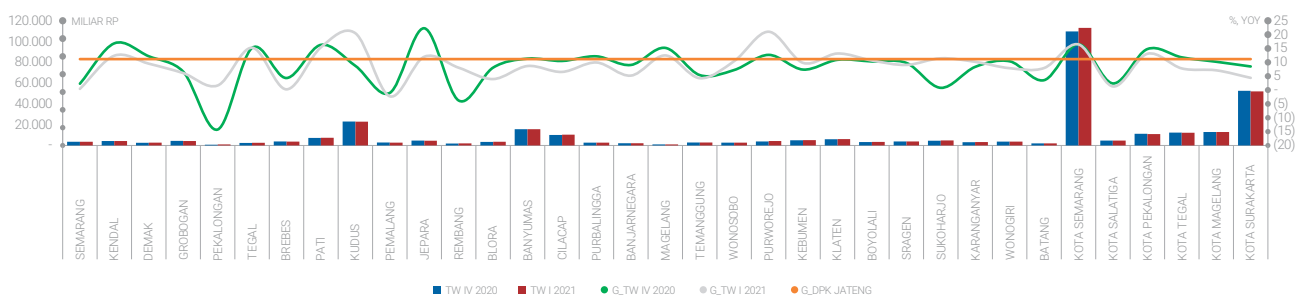
4.1.2.1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Secara spasial, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, penghimpunan DPK pada triwulan I 2021 terpusat di Kota Semarang (pangsa 32,8%), Kota Surakarta (pangsa 15,0%) dan Kudus (pangsa 6,6%). Sementara sisanya tersebar merata. Tingginya pangsa 3 (tiga) kabupaten/kota tersebut sejalan dengan tingginya aktivitas ekonomi.

Grafik 4.16 Pangsa Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.17 Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



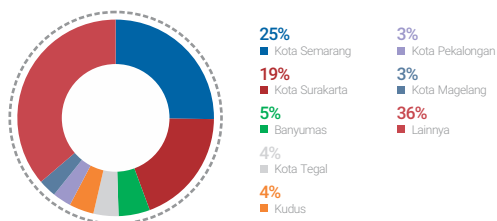
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Berdasarkan pertumbuhannya, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kudus dan Kota Semarang mengalami pertumbuhan DPK yang tertinggi selama triwulan I 2021, masing-masing sebesar 21,05%; 20,50%; dan 16,46% (yoy). Tingginya pertumbuhan DPK di daerah yang memiliki aktivitas dan pangsa ekonomi cukup besar terhadap perekonomian Jawa Tengah mengindikasikan masyarakat masih cenderung menahan konsumsi.

4.1.2.2. Penyaluran Kredit

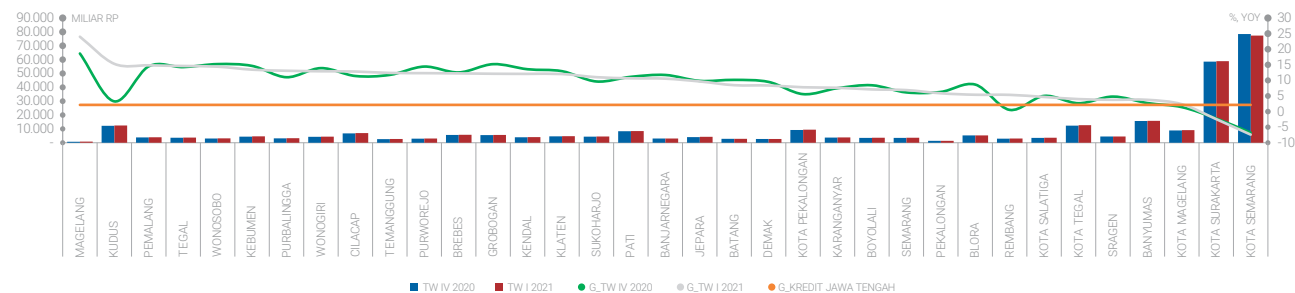
Penyaluran kredit di Jawa Tengah didominasi oleh Kota Semarang, Kota Surakarta dan Banyumas. Mayoritas penyaluran kredit terpusat pada kabupaten/kota yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah, khususnya lapangan usaha industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran.

Grafik 4.18 Pangsa Penyaluran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.19 Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Mayoritas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan cenderung lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021. Tingginya pertumbuhan tersebut terjadi di daerah-daerah yang pangsa penyaluran kredit tidak terlalu besar dan memiliki sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan usaha pertanian masih menjadi penopang perekonomian Jawa Tengah seiring dengan masih tingginya permintaan untuk sektor primer. Peningkatan kredit pada sektor tersebut utamanya didorong karena adanya kebutuhan modal kerja untuk musim tanam (di awal triwulan I 2021) dan panen raya (di akhir triwulan I 2021).

4.2. KETAHANAN SISTEM KEUANGAN DAERAH DI JAWA TENGAH

4.2.1. Risiko Kredit Perbankan di Jawa Tengah

Kinerja kredit produktif di Jawa Tengah pada triwulan I 2020 meningkat dibandingkan triwulan lalu, namun belum diimbangi dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini tercermin dari peningkatan rasio *non-performing loan* (NPL) dari 4,63% pada triwulan sebelumnya menjadi 4,96% pada triwulan ini. Peningkatan NPL tersebut utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah terus berkomitmen melanjutkan kebijakan

restrukturisasi kredit untuk menjaga risiko kredit yang cenderung meningkat sejak tahun 2019. Restrukturisasi kredit pada industri pengolahan di Jawa Tengah telah mencapai nilai Rp9,9 triliun pada Maret 2021, dimana Rp7,1 triliun terkonsentrasi pada pelaku usaha UMKM. Secara umum, berbagai upaya restrukturisasi tersebut mampu menahan peningkatan risiko kredit, serta memberikan debitur peluang untuk mendorong aktivitas ekonominya.

Industri Pengolahan

Risiko kredit industri pengolahan masih relatif tinggi pada triwulan I 2021, khususnya pada jenis kredit investasi. Subsektor Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya mengalami peningkatan NPL pada periode ini, walaupun permintaan untuk pakaian jadi mulai meningkat (tercermin pada peningkatan kredit sektor tersebut). Sementara itu, NPL kredit modal kerja industri pengolahan mengalami perbaikan meskipun masih tinggi. Perbaikan NPL tersebut didorong membaiknya risiko kredit pada subsektor Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil. Meningkatnya permintaan produk tekstil mendorong perbaikan *cash flow* industri sehingga memperbaiki *repayment capacity* subsektor ini.

Ke depan, penyaluran kredit investasi untuk industri pengolahan diperkirakan akan meningkat namun masih dalam level yang terbatas. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Liaison yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa

terdapat kenaikan kegiatan usaha yang tercermin pada permintaan ekspor akibat penundaan order tahun 2020. Hal ini dapat berkontribusi terhadap perbaikan kinerja kredit investasi walaupun masih dalam level yang terbatas.

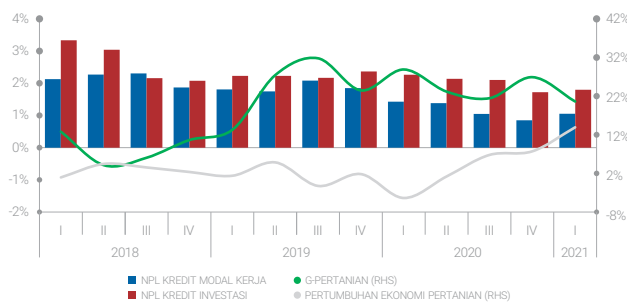
Pertanian, perburuan dan kehutanan

Risiko kredit pertanian, perburuan dan kehutanan meningkat pada triwulan I 2021, dan terjadi baik pada kredit modal kerja maupun kredit investasi. Peningkatan NPL kredit modal kerja disebabkan oleh menurunnya *repayment capacity* kredit pada subsektor hortikultura dan tembakau. Sementara peningkatan NPL kredit investasi disebabkan oleh menurunnya kualitas kredit subsektor Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya. Secara umum, risiko kredit pada sektor ini masih terjaga di bawah *threshold* seiring dengan masih baiknya permintaan untuk sektor primer.

Konstruksi

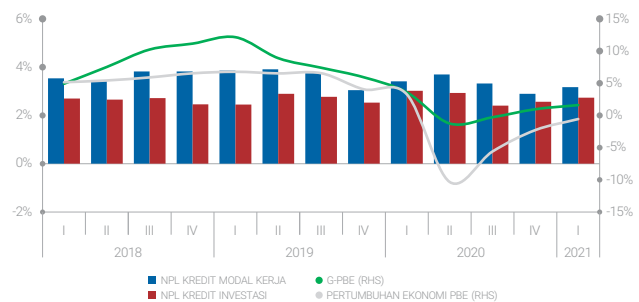
Kualitas kredit LU konstruksi membaik pada triwulan I 2021, terutama pada jenis kredit modal kerja. Turunnya NPL kredit modal kerja konstruksi disebabkan oleh perbaikan yang signifikan oleh subsektor bangunan elektrikal dan komunikasi lainnya. Perbaikan ini diperkirakan bersumber dari kinerja sektor informasi dan komunikasi yang tetap tumbuh positif selama pandemi sehingga berdampak pada perbaikan *repayment capacity* debitur. Selain itu, dimulainya kembali berbagai pembangunan infrastruktur juga menjadi pemicu membaiknya risiko kredit sektor ini.

Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



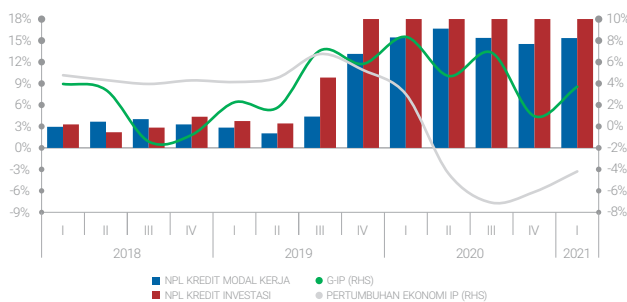
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH DAN BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Perdagangan Besar & Eceran



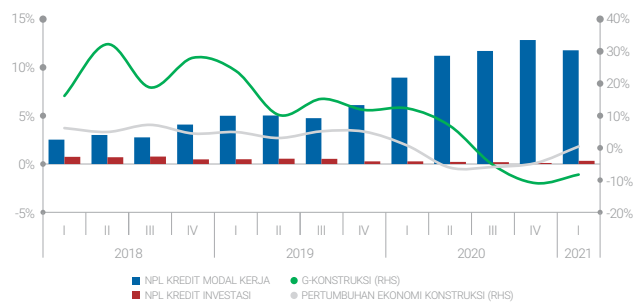
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH DAN BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Subsektor Industri Pengolahan



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH DAN BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.23 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Subsektor Konstruksi



SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH DAN BANK INDONESIA, DIOLAH

Perdagangan Besar dan Eceran

Kualitas kredit sektor perdagangan sedikit menurun, khususnya pada jenis kredit modal kerja dan kredit investasi. Peningkatan NPL kredit modal kerja LU perdagangan disebabkan oleh subsektor perdagangan besar keperluan rumah tangga lainnya. Sementara itu, penurunan kualitas kredit investasi pada triwulan laporan utamanya pada subsektor perdagangan makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini masih mencerminkan konsumsi rumah tangga yang masih tertahan sehingga berdampak pada belum pulihnya *cashflow* perusahaan/pelaku usaha.

4.2.2. Risiko Likuiditas Perbankan di Jawa Tengah

Likuiditas perbankan di Jawa Tengah relatif terjaga selama triwulan I 2021. Belum optimalnya LDR seiring dengan masih rendahnya penyaluran kredit, menyebabkan perbankan menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk Kas, Antar Bank Aktiva, Penempatan BI dan Surat-Surat Berharga. Pertumbuhan likuiditas tersebut masih cukup tinggi pada awal tahun 2021, namun mulai menurun pada akhir triwulan I 2021 seiring dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit rumah tangga.

Berdasarkan jangka waktu, mayoritas penghimpunan DPK di Jawa Tengah didominasi oleh likuiditas jangka pendek (< 6 bulan),

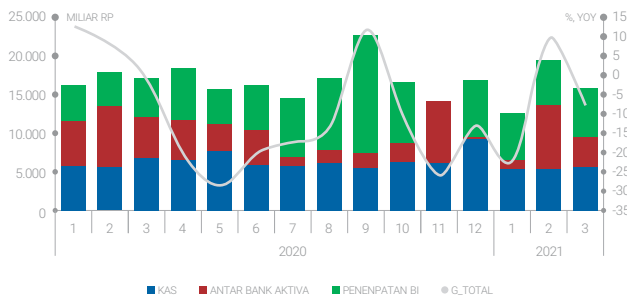
yang mencapai 82% dari total dana. Terdapat penurunan pangsa DPK dengan jangka waktu penempatan 1-6 bulan, yang mengindikasikan adanya kebutuhan likuiditas masyarakat dalam jangka pendek seiring dengan mulai meningkatnya konsumsi masyarakat.

4.2.3. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

4.1.2.2. Penyaluran Kredit

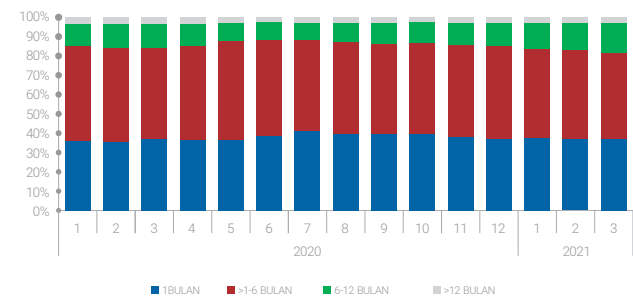
Rumah tangga (RT) memegang peranan besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan Jawa Tengah. Konsumsi RT menyumbang sekitar 61,08% dari total PDRB di Jawa Tengah. Dari sektor keuangan, RT juga menjadi kontributor terbesar penghimpunan dana pihak ketiga. Faktor utama yang dapat memberikan tekanan dan menjadi sumber kerentanan sektor rumah tangga adalah tingkat pendapatan. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat pesimisme sektor RT di Jawa Tengah terhadap tingkat penghasilan. Walaupun demikian, masyarakat menilai tingkat penghasilan dalam 6 bulan berikutnya akan lebih baik. Optimisme ini terjadi seiring berlangsungnya vaksinasi pada triwulan I 2021 yang diyakini dapat mendorong aktivitas perekonomian.

Grafik 4.24 Likuiditas Perbankan di Jawa Tengah



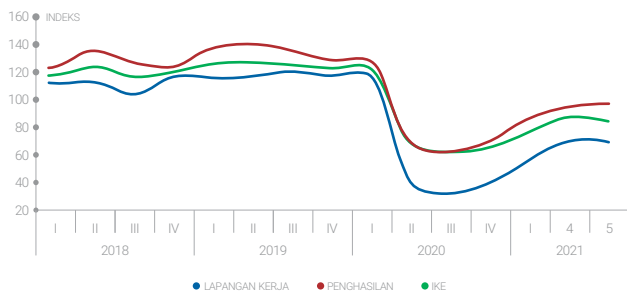
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.25 Dana Pihak Ketiga di Perbankan Berdasarkan Jangka Waktu



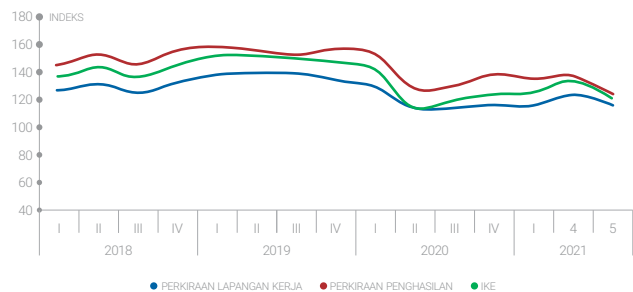
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.26 Indeks Penghasilan & Ketersediaan Tenaga Kerja Saat Ini



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.27 Ekspektasi Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan y.a.d.



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

4.2.3.2. Eksposur Sektor Rumah Tangga pada Perbankan di Jawa Tengah

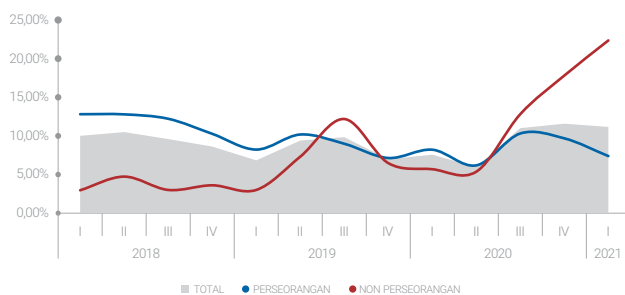
Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan di Perbankan

Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga menyumbang 72,25% dari total DPK yang dihimpun oleh perbankan di Jawa Tengah pada triwulan I 2021. DPK sektor rumah tangga di perbankan Jawa Tengah sebesar Rp249,59 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 7,39% (yoy) pada triwulan ini, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2020 (9,69%; yoy).

Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan I 2021 masih didominasi oleh tabungan (68,70%), deposito (28,34%), dan giro (2,96%). Tabungan rumah tangga melambat menjadi 10,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (12,58%; yoy). Demikian pula dengan deposito (dari 3,76%; yoy pada triwulan IV 2020 menjadi -0,23%; yoy pada triwulan laporan). Sebaliknya, giro rumah tangga tumbuh signifikan sebesar 11,64% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan 4,88% (yoy) pada triwulan lalu. Masih cukup tingginya pertumbuhan DPK mengindikasikan bahwa masyarakat berpenghasilan menengah ke atas masih menahan konsumsi.

Sejalan dengan pola historis, berdasarkan kelompok nilai, ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap nasabah perseorangan dengan kelompok nilai besar masih cukup tinggi. Tercatat pada triwulan I 2020, sebanyak 0,09% dari total depositan perseorangan dengan nilai tabungan di atas Rp500 juta menyumbang 32,21% dari nilai keseluruhan tabungan perseorangan di Jawa Tengah.

Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

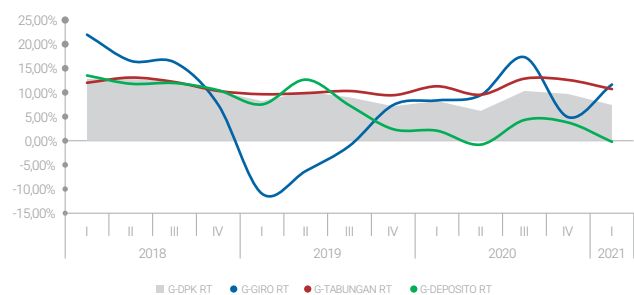
Kredit Rumah Tangga/Perseorangan di Perbankan

Kredit konsumsi RT menyumbang 29,37% dari total kredit perbankan di Jawa Tengah. Kinerja kredit konsumsi RT di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 melanjutkan tren perlambatan sejak triwulan II 2020, yaitu hanya tumbuh 1,83% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (2,80%; yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja konsumsi RT pada PDRB Jawa Tengah yang masih mencatatkan kontraksi sebesar -1,89% (yoy), walaupun sudah membaik dibandingkan triwulan IV 2020 sebesar -2,38% (yoy).

Sejalan dengan historisnya, struktur kredit rumah tangga sebagian besar masih disalurkan dalam bentuk kredit multiguna, kredit kepemilikan rumah (KPR), dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Berdasarkan andilnya, perlambatan realisasi kredit RT pada triwulan I 2021 utamanya bersumber dari kredit kendaraan bermotor. Walaupun kinerja kredit melambat, kualitas kredit rumah tangga cenderung stabil, dengan rasio NPL sebesar 1,08% pada triwulan laporan.

Pada triwulan laporan, kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami kontraksi 38,04% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan lalu (-32,98%; yoy). Mayoritas penyaluran KKB ditujukan untuk pembiayaan kepemilikan mobil roda empat (68,67%) dan sepeda bermotor (28,29%). Penurunan kinerja penyaluran KKB disebabkan oleh kelompok pembiayaan kendaraan mobil roda empat yang mengalami kontraksi -35,63% (yoy); melanjutkan tren

Grafik 4.29 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Jawa Tengah Berdasarkan Komponennya



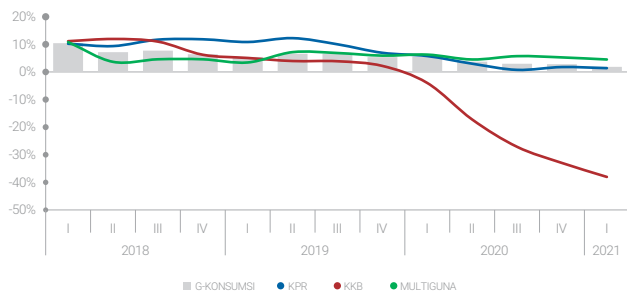
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Tabel 4.2 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya

DPK PERSEORANGAN	NOMINAL (RP MILIAR)	JUMLAH REKENING	PERSENTASE NOMINAL	PERSENTASE REKENING
0 - 100	93.228.446.934.790	48.444.315	37,39%	99,18%
>100JT - 500JT	75.808.778.333.107	354.707	30,40%	0,73%
>500JT - 1 M	18.911.851.189.434	25.633	7,58%	0,05%
Diatas 1 M	61.408.941.786.389	19.790	24,63%	0,04%
TOTAL	249.358.018.243.720	48.844.445	100,00%	100,00%

SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

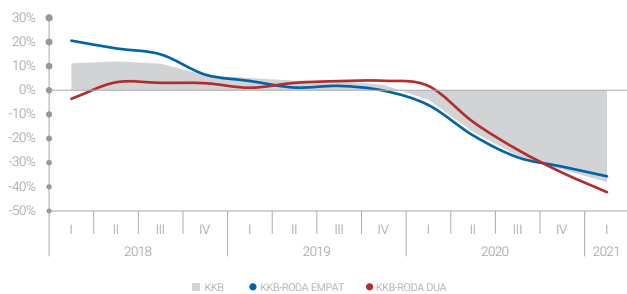


SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

kontraksi sejak triwulan II 2020. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia mengidentifikasi bahwa penurunan penghasilan masyarakat akibat perekonomian yang belum membaik, menyebabkan masyarakat memilih menahan konsumsi barang tahan lama. Secara agregat, kualitas kredit kendaraan bermotor (KKB) juga menurun pada triwulan ini.

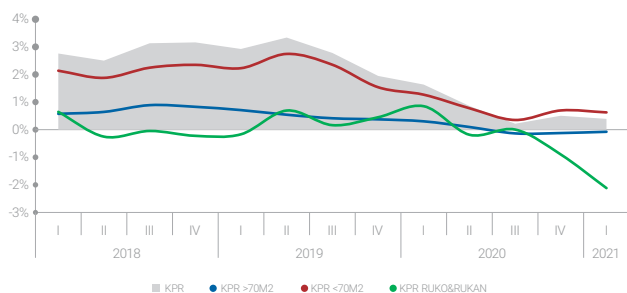
Pertumbuhan KPR pada triwulan I 2021 sebesar 0,39% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,51% (yoy). Dengan pangsa nilainya terhadap keseluruhan kredit konsumsi di Jawa Tengah sebesar 28,27%, perlambatan kinerja KPR menjadi salah satu kontributor perlambatan kredit RT yang lebih dalam. Perlambatan penyaluran KPR di Jawa Tengah berlangsung pada hampir seluruh kelompok pembiayaan pembelian rumah kecuali tipe rumah tinggal > 70m². KPR untuk kepemilikan tipe rumah tinggal > 70 m² mencatatkan perbaikan

Grafik 4.32 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah



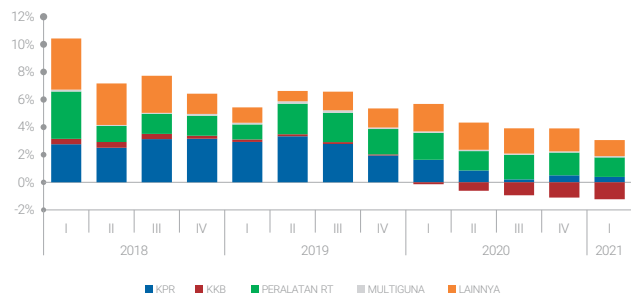
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.31 Perkembangan Andil Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

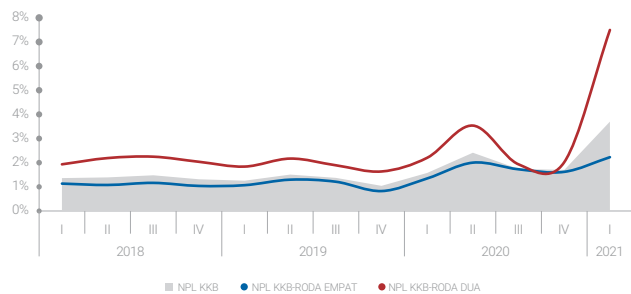


SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

walaupun masih kontraksi dari -1,59% (yoy) triwulan lalu menjadi sebesar -1,01% (yoy) pada triwulan I 2021. Penyaluran kredit pada rumah tinggal > 70 m² masih mengalami perbaikan akibat pelonggaran kebijakan pemberian kredit terhadap nasabah diluar pekerja BUMN, ASN, TNI, dan Polri seiring dengan membaiknya ekspektasi pertumbuhan ekonomi.

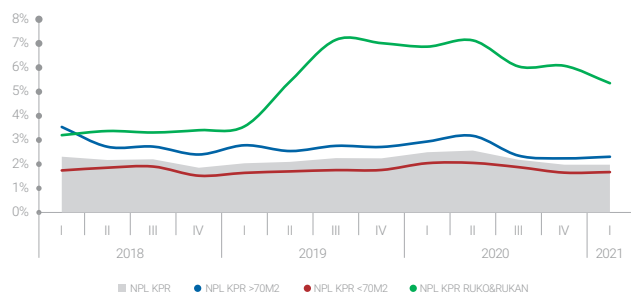
Secara umum kualitas KPR di Jawa Tengah masih terjaga, dengan rasio NPL yang stabil di tingkat 1,98% pada triwulan I 2021. Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan jenis kredit, hanya NPL pada penyaluran KPR > 70 m² yang mengalami peningkatan risiko. Stabilitasnya kualitas KPR juga disebabkan oleh paket kebijakan stimulus Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

Grafik 4.33 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 4.35 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Ke depan, kredit konsumsi RT diperkirakan meningkat seiring dengan mulai membaiknya perekonomian dan adanya rencana kebijakan relaksasi fiskal oleh Pemerintah yang akan memberi insentif bagi sektor otomotif dan properti.



05

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- 5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Tengah
 - 5.1.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
 - 5.1.2. Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
 - 5.1.3. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)
 - 5.1.4. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah
- 5.2. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
 - 5.2.1. Penyediaan Uang Rupiah
 - 5.2.2. Penanganan Uang Palsu
- 5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing
- 5.4. Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI JAWA TENGAH

5.1.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transaksi ritel di Jawa Tengah yang diproses melalui SKNBI pada triwulan I 2021 mengalami penurunan. Nominal transaksi kliring pada triwulan I 2021 sebesar Rp37 triliun, menurun 7,47% (yoy) dan lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (4,98%; yoy)¹⁴. Penurunan transaksi SKNBI sejalan dengan masih rendahnya konsumsi masyarakat di Jawa Tengah yang mengalami kontraksi 1,89% (yoy) pada triwulan ini.

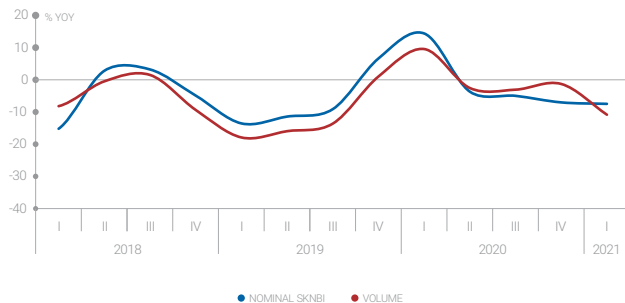
Dari sisi volume, perputaran kliring pada triwulan I 2021 juga mengalami kontraksi -10,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (-1,29%; yoy)¹⁵. Penurunan ini mengindikasikan masih terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, seiring dengan berakhirnya perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru sehingga menahan transaksi pembayaran ritel. Kondisi tersebut menyebabkan pangsa volume transaksi kliring Jawa Tengah terhadap nasional mencapai 2,22% dan pangsa nominal transaksi kliring mencapai 3,31%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya¹⁶.

Perkembangan rata-rata harian transaksi kliring secara triwulanan mengalami penurunan baik dari sisi nominal maupun

volume. Perputaran kliring di Jawa Tengah memproses rata-rata 14.602 DKE per hari, atau menurun 14,68% (qtq) dibandingkan rata-rata harian pada triwulan sebelumnya yang memproses 17.114 DKE. Dari sisi nominal, nilai rata-rata harian perputaran kliring sebesar Rp638,85 miliar, turun 6,50% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang memproses transaksi senilai Rp683,85 miliar/hari. Selain karena masih rendahnya aktivitas ekonomi, penurunan pertumbuhan rata-rata transaksi harian kliring juga disebabkan jumlah hari libur yang rendah selama triwulan I 2021, sehingga jumlah transaksi yang diproses setiap hari dapat lebih tersebar dan merata.

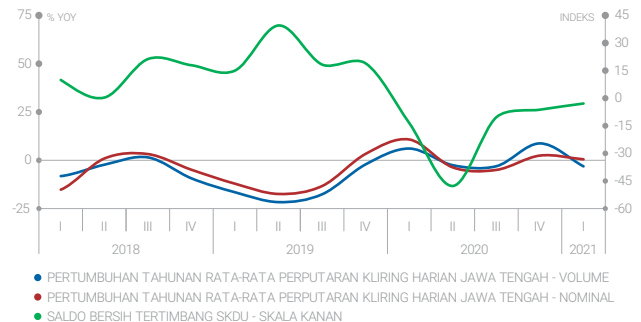
Terdapat 10 Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) di Jawa Tengah, yaitu KPWD BI (Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal) serta KPWD selain BI (Kudus, Magelang, Salatiga, Purworejo, Pekalongan, dan Cilacap). Pangsa volume transaksi KPWD selain BI pada periode Triwulan I 2021 adalah sebesar 14,77% dari jumlah seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah atau memproses 121.222 DKE. Dari sisi nominal, pangsa nilai transaksi yang diproses oleh KPWD selain BI sebesar 18,49% dari seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah atau mencapai nilai 6,15 triliun.

Grafik 5.1 Perkembangan Kliring di Jawa Tengah



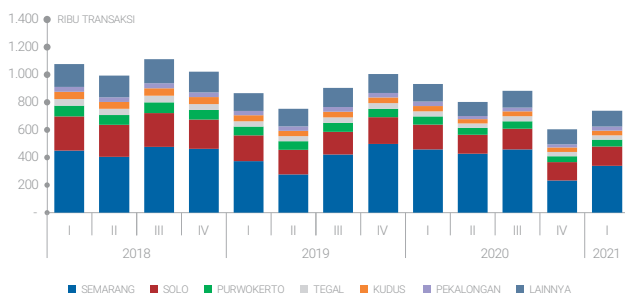
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan SBT SKDU



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

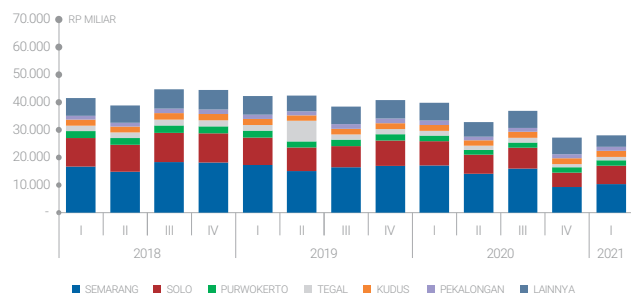
Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman



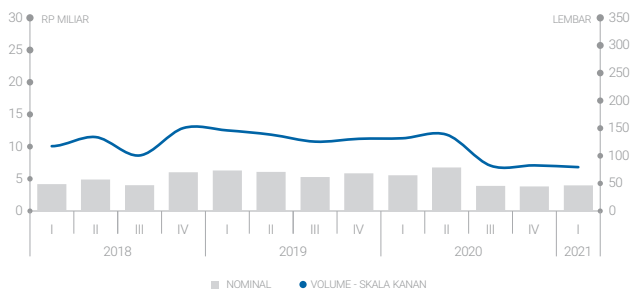
14. Transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 sebesar Rp37,05 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang mencapai Rp40,3 triliun

15. Volume kliring di Jawa Tengah mencapai 846.916 pada triwulan ini, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1.009.724.

Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman



16. Dibandingkan nasional, pangsa volume transaksi kliring Jawa Tengah triwulan ini sebesar 2,22% sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 (2,15%). Sementara pangsa nominal volume kliring mencapai 3,31%, turun dibandingkan triwulan IV 2020 yang mencapai 3,51%.

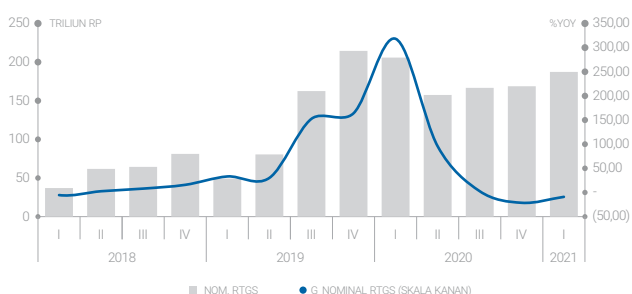
Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah

KPWD Kota Semarang mencatatkan transaksi kliring terbesar di Jawa Tengah dengan pangsa volume dan nominal kliring sebesar masing-masing 50,4% dan 39,36%. Kota selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perputaran kliring Jawa Tengah adalah Kota Solo dengan pangsa volume dan nominal masing-masing sebesar 20,9% dan 25,53%, sedangkan kota-kota lain hanya memberikan kontribusi di bawah 10%.

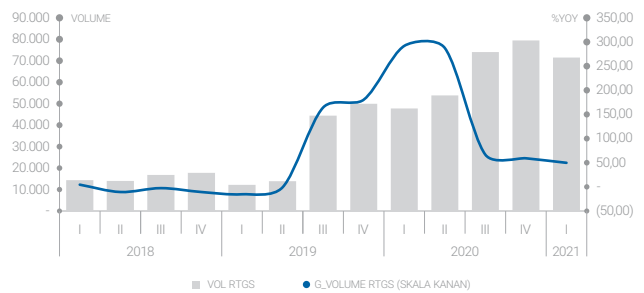
Transaksi kliring debit pengembalian dengan instrumen pembayaran berupa cek dan bilyet giro (BG) kosong mengalami penurunan baik dari sisi volume dan nominal. Rata-rata volume cek dan BG kosong yang dikliringkan per hari pada triwulan laporan menurun dari 82 lembar/hari menjadi 79 lembar/hari. Demikian pula dengan rata-rata nilai penarikan cek dan BG kosong turun 34,08% pada triwulan ini, melanjutkan penurunan triwulan lalu (-41,12%; yoy). Perbaikan tersebut diindikasikan karena peningkatan kecukupan dana masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan positif dana pihak ketiga di perbankan pada triwulan I 2021 (11,16%; yoy) dan peningkatan penghasilan konsumen hasil Survei Konsumen Bank Indonesia.

5.1.2. Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Transaksi sistem pembayaran menggunakan BI-RTGS masih terbatas pada triwulan I 2021. Nominal transaksi BI-RTGS di wilayah Jawa Tengah mencapai Rp187 triliun pada triwulan ini,

Grafik 5.6 Perkembangan Nominal RTGS di Jawa Tengah

17. Pertumbuhan kinerja industri pengolahan pada PDRB Jawa Tengah meningkat dari -6,10% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi -3,94% (yoy) pada triwulan ini

Grafik 5.7 Perkembangan Volume RTGS di Jawa Tengah

atau turun 9,05% (yoy). Meskipun masih berkontraksi, namun nominal transaksi BI-RTGS telah tumbuh 10,96% (qtq). Perbaikan tersebut, diindikasikan didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi pada lapangan usaha industri pengolahan karena peningkatan permintaan global.

Sementara itu, volume RTGS di Jawa Tengah pada triwulan ini tumbuh 49,75% (yoy) atau mencapai 71.507 transaksi.

Pertumbuhan tersebut seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga menunjukkan perbaikan aktivitas usaha dari -6,24 SBT (triwulan IV 2020) menjadi -2,89 SBT (triwulan ini).

5.1.3. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

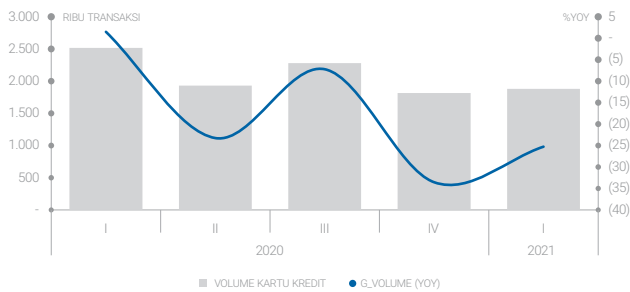
Pertumbuhan transaksi pembayaran dengan APMK di Jawa Tengah stabil untuk transaksi kartu kredit, sedangkan kartu debit melambat. Transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit pada triwulan I 2021 berdasarkan volume dan nominal masing-masing turun -25,27% (yoy) dan -28,29% (yoy), sedikit membaik dibandingkan triwulan IV 2020¹⁸. Masih minimnya kegiatan masyarakat di luar rumah menjadi penyebab utama belum positifnya kinerja transaksi kartu kredit. Hal ini karena mayoritas penggunaan kartu kredit adalah untuk pembayaran transaksi langsung melalui *electronic data capture* (EDC), sehingga pembatasan aktivitas fisik masyarakat berdampak terhadap penggunaan kartu kredit.

Sementara itu, transaksi dengan kartu debit melambat.

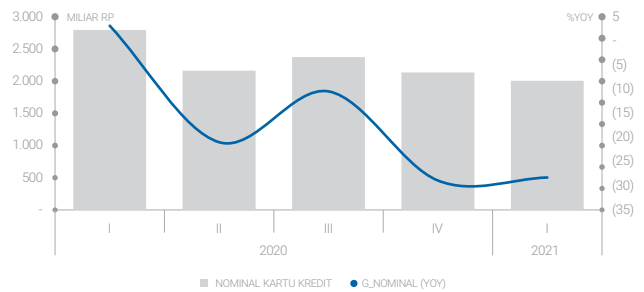
Transaksi kartu debit berdasarkan volume dan nominal transaksi tumbuh 0,88% (yoy) dan 1,76% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2020 yang tumbuh 1,92% (yoy) dan 3,48% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan karena berakhirnya perayaan Natal dan tahun baru serta masih belum kuatnya konsumsi domestik, sehingga mengurangi mobilitas dan transaksi ritel. Berdasarkan jenis transaksi, mayoritas penggunaan kartu debit masih digunakan untuk Tarik tunai (pangsa 52,2%) dan transfer (45,7%).

18. Volume transaksi kartu kredit pada triwulan I 2021 mencapai 1.880.106, sedikit meningkat dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar 1.816.441. Nominal transaksi dengan menggunakan kartu kredit mencapai Rp2.004 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar Rp2.135 miliar. Sementara itu secara triwulanan, pertumbuhan volume dan nominal kartu kredit masing-masing sebesar 3,50% (qtq) dan -6,13% (qtq).

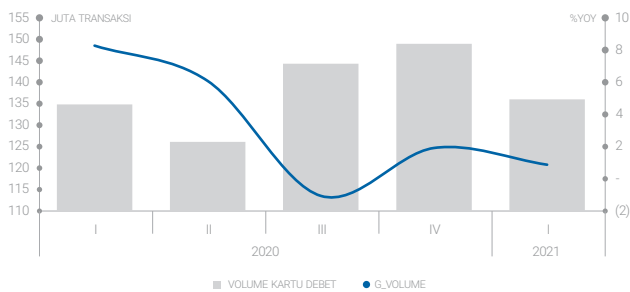
Grafik 5.8 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Jawa Tengah



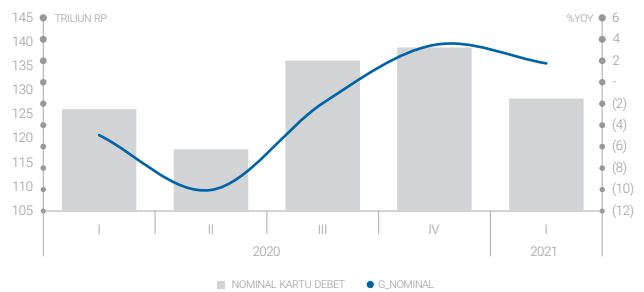
Grafik 5.9 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Jawa Tengah



Grafik 5.10 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Debet di Jawa Tengah



Grafik 5.11 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debet di Jawa Tengah

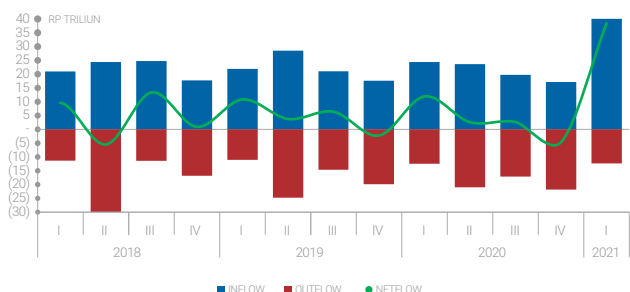


5.1.4. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

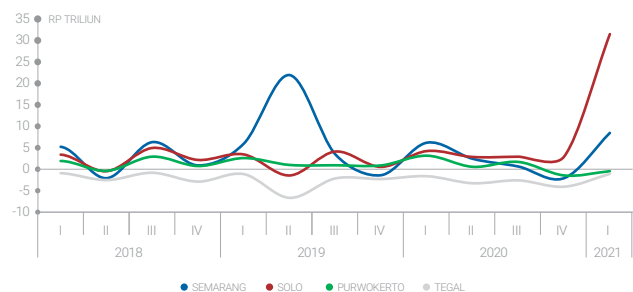
Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 mencatat posisi *net inflow* sebesar Rp38,4 triliun¹⁹. *Net inflow* tersebut terjadi karena pertumbuhan *inflow* yang signifikan (196%; qtt), sedangkan *outflow* justru turun (-43,4%; qtt). Meskipun sesuai dengan pola historis, namun peningkatan *inflow* pada triwulan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019 yang hanya sebesar Rp11,93 triliun. Secara tahunan, *inflow* juga tumbuh 108,08% (yoy), sedangkan *outflow* terkontraksi 0,89% (yoy). Tingginya aliran *inflow* di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 ini, diindikasikan karena berakhirnya perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru. Akibatnya, aliran uang kartal yang sempat meningkat di masyarakat pada triwulan IV 2020, kembali masuk ke perbankan.

Secara spasial, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang dan Solo mencatat *net inflow*, sedangkan Bank Indonesia Tegal dan Purwokerto mencatat *net outflow*. Wilayah Solo mengalami pertumbuhan *net inflow* terbesar yaitu 644% (yoy) disusul oleh Semarang (37%; yoy). Peningkatan *net inflow* yang signifikan di wilayah Solo disebabkan oleh terbatasnya berbagai aktivitas ekonomi, dimana Solo Raya merupakan salah satu daerah yang masuk dalam PSBB Jawa-Bali tanggal 11-25 Januari 2021 dan PPKM setelahnya. Selain itu, peningkatan aktivitas *inflow* di wilayah Solo tersebut, sebagian diantaranya juga merupakan aliran uang kartal dari perbankan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Grafik 5.12 Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah



Grafik 5.13 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah



19. Pada triwulan I 2021, posisi aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) mencapai Rp50,73 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu

(Rp17,13 triliun). Sementara itu, aliran uang kartal dari Bank Indonesia (*outflow*) sebesar Rp12,33 triliun turun dibandingkan Rp21,79 triliun pada triwulan IV 2020.

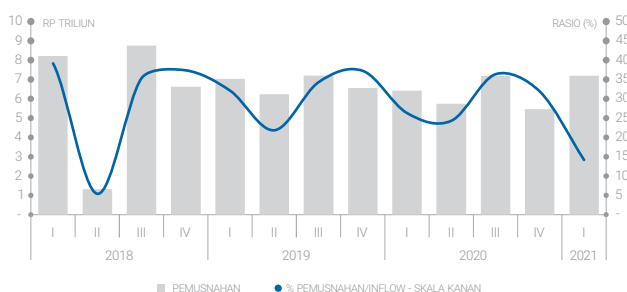
5.2. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

5.2.1. Penyediaan Uang Rupiah

Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar dari peredaran, pengolahan uang Rupiah, serta penggantian dengan uang rupiah layak edar, sebagai bentuk penerapan *clean money policy*. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa Tengah pada triwulan ini mencapai 14,18% dari *inflow*. Berdasarkan nominal, nilai pemusnahan uang Rupiah pada triwulan I 2021 meningkat 31,68% (qtq), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -23,96% (qtq)²⁰. Peningkatan pemusnahan uang Rupiah tersebut sejalan dengan tingginya *inflow*, sehingga jumlah Uang Tidak Layak Edar yang terserap dari masyarakat juga meningkat.

Untuk mendorong *clean money policy*, Bank Indonesia juga melakukan layanan kas yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor. Layanan kas bagi masyarakat di kantor Bank Indonesia dibuka untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran. Sementara layanan kas di luar kantor diwujudkan dengan program kas keliling. Kegiatan kas keliling tersebut secara rutin dilaksanakan di dalam kota kedudukan BI hingga menjangkau daerah terpencil. Namun demikian, sehubungan dengan pandemi COVID-19 di Indonesia sejak akhir Maret 2020, maka untuk sementara kegiatan kas keliling diberhentikan sejak bulan April 2020 hingga waktu yang belum ditentukan. Untuk tetap menjaga ketersediaan Uang Layak Edar, Bank Indonesia telah bekerjasama dengan perbankan, sehingga masyarakat dapat melakukan penukaran di berbagai jaringan kantor Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang tersebar di Jawa Tengah.

Grafik 5.14 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar



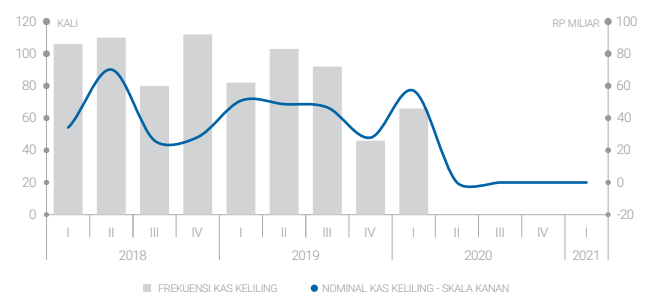
5.2.2. Penanganan Uang Palsu

Jumlah uang palsu yang ditemukan di Jawa Tengah pada triwulan I 2021 menurun. Penemuan uang palsu di wilayah Jawa Tengah pada periode ini sebanyak 2.379 lembar, turun 75,95% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 9.890 lembar. Berdasarkan pecahannya, nominal yang paling banyak dipalsukan adalah Rp100.000 sebanyak 1.752 lembar (73,64%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak 588 lembar (24,72%) dan Rp10.000 sebanyak 25 lembar (1,05%).

Berdasarkan wilayah operasional Bank Indonesia, uang palsu paling banyak ditemukan di wilayah kerja Bank Indonesia di Semarang sebanyak 1.072 lembar (pangsa 45,1%), diikuti oleh wilayah kerja Bank Indonesia Solo sebanyak 713 lembar (pangsa 29,7%), Tegal sebanyak 408 lembar (pangsa 17,2%), dan Purwokerto sebanyak 186 lembar (pangsa 7,82%). Penemuan uang palsu tersebut antara lain berasal dari klarifikasi perbankan (70,02%), setoran masyarakat melalui loket penukaran (0,93%), serta hasil setoran bank (1,68%).

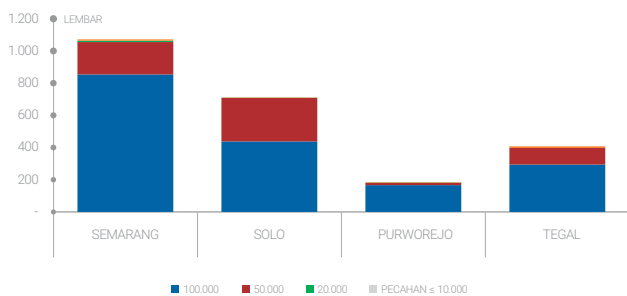
Penurunan uang palsu tersebut sejalan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan uang. Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan untuk meminimalkan persebaran uang palsu di masyarakat antara lain meningkatkan fitur keamanan uang, mendorong keterjangkauan dan ketersediaan Uang Layak Edar secara luas di masyarakat, mendorong penggunaan pembayaran non tunai sehingga dapat meminimalkan peluang pemalsuan uang, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang.

Grafik 5.15 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling

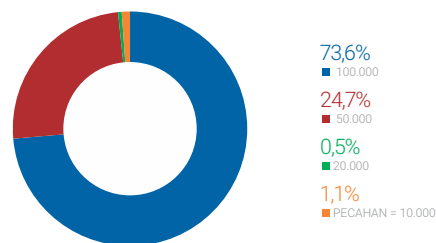


20. Nominal uang Rupiah yang dimusnahkan pada triwulan I 2021 mencapai Rp7,19 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar Rp5,46 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun 2020, terdapat peningkatan nominal pemusnahan uang Rupiah sebesar 12,16% (yoy).

Grafik 5.16 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah



Grafik 5.17 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

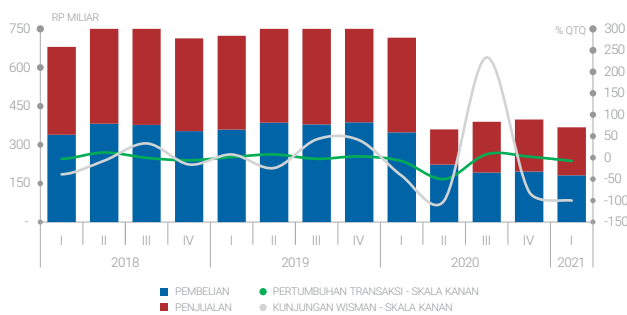


5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING

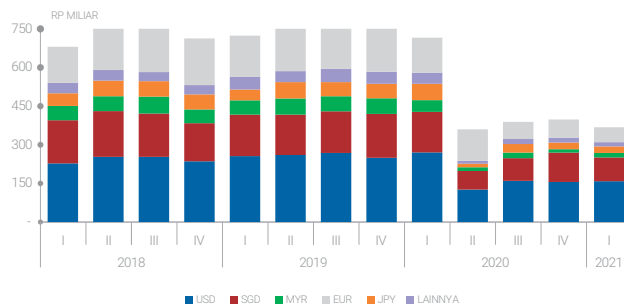
Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengalami penurunan baik secara triwulanan maupun tahunan. Nilai transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB berizin di Jawa Tengah pada triwulan I 2020 mencapai Rp367,62 miliar, atau berkontraksi -48,65% (yoy) dan -7,83% (qtq). Berdasarkan jenis transaksi, penjualan valuta asing sedikit mendominasi dengan pangsa mencapai 50,62% dari total transaksi²¹.

Transaksi penjualan valuta asing turun 8,03% (qtq) pada triwulan ini, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya (-7,42%; qtq). Sementara itu, secara tahunan transaksi penjualan maupun pembelian masing-masing turun sebesar -49,41% (yoy) dan -47,85% (yoy). Penurunan transaksi valuta asing seiring dengan masih minimnya wisatawan asing ke Jawa Tengah dan aktivitas penerbangan ke luar negeri. Hal ini juga tercermin dari kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, serta lapangan usaha transportasi yang masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar -4,57% (yoy) dan -31,04% (yoy). Kondisi tersebut mengindikasikan belum pulihnya kinerja sektor pariwisata yang merupakan konsumen utama penukaran valuta asing.

Grafik 5.18 Transaksi Penukaran Valuta Asing



Grafik 5.19 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA BB di Jateng



21. Pada triwulan I 2021, transaksi penjualan valuta asing mencapai Rp186,1 miliar, sedangkan transaksi pembelian valuta asing mencapai Rp181,52 miliar.

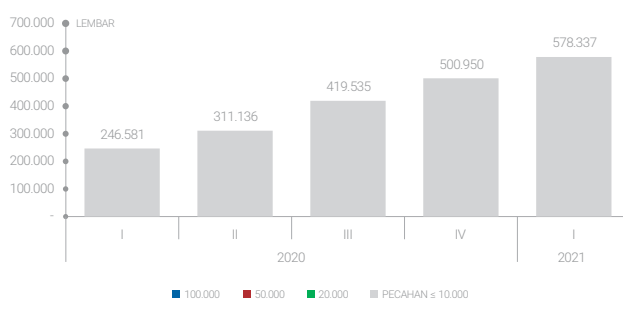
5.4. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran terus mendorong penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penggunaan instrumen nontunai (elektronifikasi), antara lain pada sektor Pemda dan penyaluran bantuan sosial. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia menerbitkan QR Code Indonesia Standard atau disingkat QRIS. QRIS adalah standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Ciri QR Code yang telah berstandar QRIS adalah terdapat logo QRIS di sisi kiri atas dan logo GPN (burung Garuda Merah) di sisi kanan atas. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, per tanggal 1 Januari 2020 pedagang di seluruh Indonesia wajib menggunakan QR Code dengan standar QRIS.

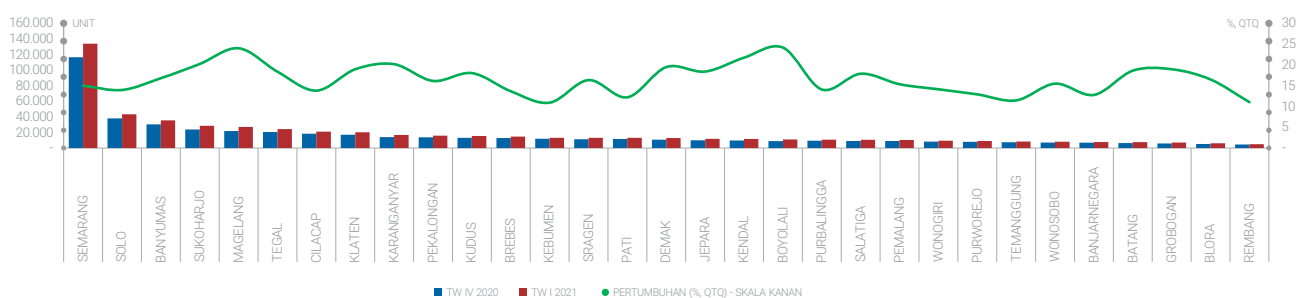
Pada akhir triwulan I 2021, jumlah *merchant* di Jawa Tengah yang telah memiliki QRIS meningkat. Terdapat 578.337 *merchant* di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki QRIS atau tumbuh 134,54% (yoy) dan 15,45% (qtq). Pertumbuhan yang signifikan tersebut, sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mendorong elektronifikasi di masyarakat.

Secara spasial, jumlah *merchant* terbesar QRIS pada triwulan I 2021 terdapat di Semarang, Solo dan Banyumas. Tingginya aktivitas ekonomi di Semarang dan Solo mendorong pula peningkatan penggunaan QRIS oleh *merchant* sehingga

Grafik 5.20 Perkembangan QRIS di Jawa Tengah



Grafik 5.21 Perkembangan QRIS di Jawa Tengah Secara Spasial



SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH

mempermudah pembayaran transaksi ritel. Sementara itu, pertumbuhan terbesar terjadi di Boyolali (24,17%; qtq), disusul oleh Magelang (24,00%; qtq) dan Kendal (21,73%; qtq). Bank Indonesia senantiasa mendorong penggunaan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait penggunaan QRIS dalam perolehan pendapatan daerah, koordinasi dan kerjasama dengan sektor pariwisata untuk transaksi pembayaran tiket masuk, penggunaan QRIS sebagai media sedekah di berbagai rumah ibadah, serta implementasi QRIS di sektor perdagangan, khususnya di pasar modern maupun pasar tradisional.

Pada elektronifikasi bantuan sosial, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial, baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (sebelumnya bernama Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)). Penyaluran PKH tahap Maret 2021 dilakukan kepada 1,53 juta KPM dengan persentase penyerapan jumlah KPM sebesar 95,13%, sementara itu penyaluran Program Sembako pada bulan Maret 2021 dilakukan kepada 2,86 juta KPM dengan persentase penyerapan jumlah KPM sebesar 91,3%. Penyaluran bansos nontunai bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi) serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.

Sementara itu, ketersediaan layanan keuangan di Jawa Tengah masih belum sepenuhnya merata. Apabila ditinjau dari luas wilayah, rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 1.000 km² luas wilayah di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang memiliki ketersediaan layanan keuangan tertinggi dibandingkan luas wilayah adalah Kota Magelang. Sementara daerah yang memiliki nilai rasio terendah adalah

Kabupaten Grobogan. Aspek ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan dan industri keuangan agar dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.







06

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

- 6.1. Ketenagakerjaan
- 6.2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan
 - 6.2.1. Nilai Tukar Petani
 - 6.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah
- 6.3. Tingkat Kemiskinan
- 6.4. Pemerataan Kesejahteraan Penduduk

6.1. KETENAGAKERJAAN

Ketersediaan tenaga kerja di Jawa Tengah pada Februari 2021 meningkat. Merujuk rilis Badan Pusat Statistik yang memotret kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2021, jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Februari 2021 sebesar 27,13 juta orang, atau meningkat 1,42% (yoy). Kondisi ini mencerminkan ketersediaan tenaga kerja usia produktif di Jawa Tengah yang besar. Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja juga mengalami peningkatan, dari 18,78 juta orang menjadi 18,82 juta orang atau tumbuh 0,21% (yoy). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah memiliki porsi 13,46% dari total angkatan kerja di nasional yaitu sebanyak 139,81 juta orang.

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap kinerja ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan mengalami penurunan dibandingkan Februari 2020²², yaitu dari 70,22% menjadi 69,38%. Namun demikian, kondisi TPAK Jawa Tengah masih lebih tinggi dari nasional yang sebesar 68,08%. Penurunan TPAK tersebut menyebabkan tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,96%. Meskipun lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran nasional

(6,26%), namun peningkatan pengangguran Jawa Tengah dibandingkan Februari 2020 (4,25%) mengindikasikan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja ditengah wabah COVID-19.

Struktur tenaga kerja pada lapangan usaha di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Pada Februari 2021, sektor Pertanian menyerap 4,91 juta orang tenaga kerja atau 27,74% dari total penduduk yang bekerja. Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2020 yang sebanyak 4,69 juta orang atau 26,08% dari total penduduk bekerja. Peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian diperkirakan bersumber dari peralihan tenaga kerja dari sektor lainnya yang terdampak pandemi COVID-19.

Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dengan menyerap 3,5 juta orang atau 19,77% dari penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Jumlah pekerja di sektor industri pengolahan ini mengalami kontraksi 10,26% (yoy). Penurunan produksi membuat pelaku usaha industri melakukan efisiensi diantaranya

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)

INDIKATOR	JAWA TENGAH						
	FEB-2018	AGS-2018	FEB-2019	AGS-2019	FEB-2020	AGS-2020	FEB-2021
Angkatan Kerja	18.23	18.06	18.59	18.26	18.78	18.75	18.82
Bekerja	17.46	17.25	17.81	17.44	17.98	17.54	17.7
Pengangguran	0.77	0.81	0.78	0.82	0.8	1.21	1.12
Bukan Angkatan Kerja	7.97	8.28	7.89	8.35	7.97	8.26	8.31
Penduduk Usia Kerja	26.2	26.34	26.48	26.61	26.75	27.01	27.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	69.58	68.56	70.21	68.62	70.22	69.43	69.38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)%	4.23	4.51	4.22	4.49	4.25	6.48	5.96
Pekerja Tidak Penuh	4.90	4.67	5.03	4.65	4.93	5.83	6.17
Setengah Penganggur	1.06	0.90	1.06	0.94	0.87	1.51	1.34
Paruh Waktu	3.84	3.77	3.97	3.72	4.06	4.32	4.83

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

SEKTOR EKONOMI	2018		2019		2020		2021
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
Pertanian	4.76	4.2	4.67	4.09	4.69	4.61	4.91
Industri	3.75	3.76	3.95	3.89	3.9	3.62	3.50
Konstruksi	1.23	1.51	1.28	1.52	1.32	1.4	1.32
Perdagangan	3.26	3.22	3.35	3.31	3.33	3.34	3.32
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	0.53	0.57	0.53	0.57	0.56	0.52	0.51
Keuangan	0.22	0.24	0.21	0.23	0.24	0.2	0.20
Lainnya*	3.71	3.75	3.82	3.83	3.94	3.85	3.94
Total	17.46	17.25	17.81	17.44	17.98	17.54	17.7

* Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jas pendidikan, Jasa Kesehatan dan Jasa dan Kategori lainnya

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi

Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2016 – Februari 2021 (juta orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2018		2019		2020		2021
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
Berusaha sendiri	3.21	3.21	3.35	3.31	3.28	3.22	3.39
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	3.00	2.96	3.16	2.79	3.15	3.07	3.12
Berusaha dibantu buruh tetap	0.63	0.62	0.60	0.60	0.59	0.55	0.60
Buruh/karyawan/pegawai	6.36	6.12	6.48	6.69	6.87	5.98	6.16
Pekerja bebas di pertanian	0.72	0.73	0.69	0.74	0.80	0.81	0.74
Pekerja bebas di non pertanian	1.23	1.51	1.15	1.37	1.13	1.44	1.16
Pekerja tak dibayar	2.31	2.11	2.38	1.94	2.17	2.46	2.53
Total	17.46	17.25	17.81	17.44	17.98	17.54	17.70

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

melalui pengurangan pegawai dalam upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Selanjutnya, sektor perdagangan menempati posisi ketiga sebesar 3,3 juta orang atau menyerap 18,76% penduduk yang bekerja. Tenaga kerja lapangan usaha perdagangan juga mengalami kontraksi 0,30% (yoy). Kondisi ini ditengarai juga merupakan dampak pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi COVID-19, sehingga berpengaruh negatif pada beberapa sub-sektor usaha perdagangan yang mendorong pelaku usaha mengurangi pegawai untuk meringankan beban keuangan perusahaan.

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada Februari 2021 tenaga kerja dominan di Jawa Tengah bergerak di sektor informal. Pekerja informal sebanyak 10,94 juta orang atau 61,81% dari jumlah penduduk bekerja. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 10,52 juta orang (meningkat 58,51%). Peningkatan jumlah tenaga kerja informal tersebut ditengarai karena *shifting* dari tenaga kerja formal seiring dengan pengurangan tenaga kerja oleh pelaku usaha di sektor formal karena menurunnya kapasitas usaha disaat pandemi COVID-19. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di sektor formal pada Februari 2021 menurun²³.

Berdasarkan jumlah jam kerja, terdapat penurunan kondisi ketenagakerjaan pada pekerja waktu penuh di Jawa Tengah.

Jumlah kelompok pekerja waktu penuh sebanyak 11,53 juta orang atau turun 11,72% (yoy)²⁴. Meskipun mengalami penurunan, kelompok pekerja waktu penuh masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah yaitu sebesar 65,14% terhadap total pekerja. Penurunan pekerja waktu penuh disebabkan oleh pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor seiring dengan penurunan kapasitas usaha sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Sebaliknya, jumlah pekerja paruh waktu meningkat dari 4,06 juta orang pada periode Februari 2020 menjadi 4,83 juta orang pada Februari 2021. Hal ini mengindikasikan kondisi ketersediaan lapangan kerja waktu penuh yang terbatas sehingga pencari kerja berupaya mendapat penghasilan melalui pekerjaan paruh waktu.

Kualitas tenaga kerja di Jawa Tengah selama pandemi COVID-19 relatif stabil. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk usia diatas 15 tahun adalah 8,8 tahun bersekolah atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian, penetapan standar indikator kualitas tenaga kerja mengacu pada target Pembangunan Pendidikan tersebut, yaitu tingkat pendidikan SMP.

Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)

PENDUDUK YANG BEKERJA	2018		2019		2020		2021
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
Pekerja tidak penuh	4.90	4.67	5.03	4.65	4.93	5.83	6.17
Setengah penganggur	1.07	0.90	1.06	0.94	0.87	1.51	1.34
Pekerja paruh waktu	3.84	3.77	3.97	3.72	4.06	4.32	4.83
Pekerja penuh	12.56	12.57	12.77	12.79	13.06	11.71	11.53
Total	17.46	17.25	17.81	17.44	17.98	17.54	17.70

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

23. Sektor formal terdiri dari orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan kelompok berusaha dibantu buruh tetap. Jumlah pekerja sektor formal turun dari 7,46 juta orang (Februari 2020) menjadi 6,76 juta orang (Februari 2021).

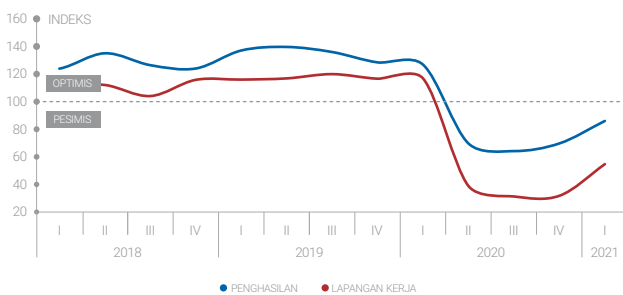
24. Pekerja berwaktu penuh (*full time worker*) yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu.

Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)

PENDIDIKAN	2018		2019		2020		2021
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
SD ke Bawah	8.49	8.25	8.50	8.03	8.04	7.89	7.81
SMP	3.59	3.38	3.46	3.47	3.54	3.54	3.61
SMA UMUM	1.95	2.17	2.15	2.23	2.4	2.25	2.25
SMA KEJURUAN	2.03	1.93	2.08	2.15	2.3	2.28	2.27
DI/II/III dan Universitas	0.34	0.39	0.38	0.39	0.46	0.4	0.45
Universitas	1.06	1.12	1.24	1.17	1.24	1.19	1.33
Total	17.46	17.25	17.81	17.44	17.98	17.54	17.7

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Grafik 6.1 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat ini



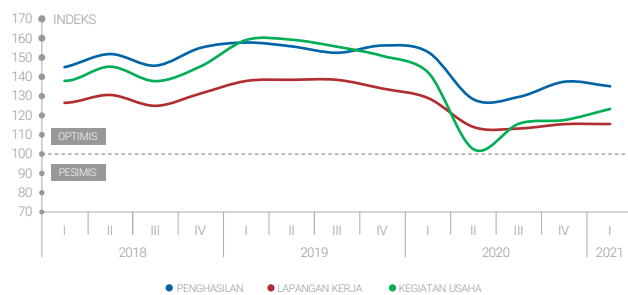
SUMBER: BANK INDONESIA

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada Februari 2021 relatif stabil. Jumlah tenaga kerja dengan pendidikan SMP, diploma dan universitas meningkat dibandingkan Februari 2020. Namun, perlu diperhatikan penurunan tenaga kerja terampil dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) baik umum maupun kejuruan yang turun 6,25% (yoy) dibandingkan Februari 2020. Penurunan tenaga kerja berpendidikan menengah ini berpotensi menjadi tantangan percepatan pemulihan ekonomi terutama untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan. Hal ini mengingat mulai tahun 2021 ini sudah mulai terdapat realisasi investasi asing menuju Jawa Tengah, yang tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah relatif menurun baik secara nominal maupun pangsa. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan rendah di Jawa Tengah semakin menurun seiring dengan penurunan angka partisipasi kerja penduduk usia non produktif (>65 tahun).

Meskipun masih lemah, namun kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah sudah lebih baik dibandingkan tahun 2020. Pada triwulan I 2021, indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks

Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha 6 bulan yang Akan Datang



SUMBER: BANK INDONESIA

penghasilan masih berada pada posisi pesimis, yaitu 54,68 dan 85,99²⁷. Namun demikian, indeks kedua indikator tersebut sudah membaik dibandingkan tahun lalu yang sebesar 31,77 dan 69,71. Sejalan dengan kondisi tersebut hasil liaison mengkonfirmasi pengurangan penggunaan tenaga kerja relatif minimal sepanjang triwulan I 2021. Pelaku usaha khususnya industri berskala menengah-besar telah berupaya mengoptimalkan kondisi tenaga kerja yang ada untuk berusaha memenuhi permintaan penjualan yang perlahan membaik yang didorong oleh permintaan luar negeri.

Pelonggaran pembatasan sosial sejak Juni 2020 dan dimulainya vaksinasi sejak awal tahun 2021, turut membantu perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Aktivitas perekonomian dan pergerakan masyarakat yang meningkat diharapkan mampu meningkatkan permintaan domestik. Ke depan, konsumen pun optimis kondisi ketenagakerjaan membaik di masa yang akan datang. Indeks perkiraan kegiatan usaha meningkat ke level 123,35; terus meningkat sejak titik terendahnya pada triwulan II 2020. Hal yang sama juga ditunjukkan pada indikator lainnya, perkiraan ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan juga meningkat dengan nilai indeks masing-masing sebesar 115,53 dan 135,09 pada triwulan I 2021.

27. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Penghasilan yang berada pada level <100 menunjukkan masyarakat masih dalam kondisi pesimis dan kinerja belum kembali kepada pola normal.

28. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

6.2. TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

6.2.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP)²⁹ pada Maret 2021 mengalami penurunan dibandingkan Desember 2020. NTP pada Maret 2021 sebesar 99,30, menurun dari Desember 2020 sebesar 101,49. Penurunan NTP disebabkan oleh akselerasi biaya yang harus dibayar petani lebih tinggi daripada penghasilan yang diterima petani. Peningkatan biaya tercermin dari inflasi pedesaan yang meningkat, khususnya pada Kelompok Penyediaan Makanan, dan Minuman serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki.

Secara umum, penerimaan petani pada Maret 2021 mengalami penurunan dibandingkan Desember 2020, sedangkan pengeluaran petani justru meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang mengalami peningkatan sebesar 0,89% (*point-to-point*), sedangkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menurun 1,27% (ptp).

6.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah

Tingkat pengangguran di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada Februari 2021. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran pada Februari 2021 sebanyak 1,12 juta orang, atau bertambah 40% (yoy). Provinsi Jawa Tengah menyumbang 12,8% dari total angka pengangguran nasional yang berjumlah 8,75 juta orang. Peningkatan jumlah pengangguran yang cukup tinggi disebabkan terbatasnya lapangan kerja pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil liaison, mayoritas pelaku usaha mengambil kebijakan untuk merumahkan sebagian besar karyawannya, seiring dengan menurunnya aktivitas ekonomi.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)²⁸ Jawa Tengah mengalami peningkatan, dari 4,25% pada Februari 2020 menjadi 5,96% pada Februari 2021. Angka TPT Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka TPT nasional yang sebesar 6,26%. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, TPT pada Februari 2021 untuk wilayah perkotaan (6,93%) cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di wilayah perdesaan (4,98%).

Lebih lanjut, rendahnya NTP tersebut telah berlangsung sejak awal tahun 2020, sehingga secara umum margin penghasilan petani dibandingkan biaya hidup maupun biaya produksinya terhitung rendah. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah laju peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) justru mencatatkan pertumbuhan yang rendah pada subsektor tanaman pangan, berlawanan dengan kinerja produktivitas tanaman pangan yang secara umum sangat baik, khususnya pada komoditas strategis beras.

Pada triwulan I tahun 2021, subsektor tanaman pangan sebagai kontributor utama lapangan usaha pertanian di Jawa Tengah, mengalami penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). Masa panen periode ke-1 2021 yang berlangsung pada bulan triwulan I belum optimal meningkatkan laju penerimaan petani. Risiko bagi petani semakin bertambah seiring dengan meningkatnya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada triwulan I 2021. Peningkatan risiko biaya dari petani ini tidak hanya bersumber dari biaya modal dan produksinya, namun juga dari biaya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang cenderung meningkat pada triwulan I 2021. Hal ini tercermin inflasi

Tabel 6.6. NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

NILAI TUKAR PETANI	2019*				2020				2021
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES	MAR
INDEKS YANG DITERIMA PETANI (It)	138.29	140.79	145.23	108.92	108.53	107.47	107.87	108.94	107.55
INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib)	134.49	136.50	137.04	104.61	106.28	106.30	105.94	107.34	108.30
NILAI TUKAR PETANI	102.83	103.15	105.98	104.11	102.12	101.10	101.82	101.49	99.30

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 6.7. NTP Jawa Tengah per Subsektor

NILAI TUKAR PETANI	2019*				2020				2021
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES	MAR
TOTAL	102.83	103.15	105.98	104.11	102.12	101.10	101.82	101.49	99.30
TANAMAN PANGAN	106.77	104.22	108.39	107.54	104.61	102.65	104.24	102.72	97.51
HOLTIKULTURA	98.42	102.17	103.81	106.04	108.18	108.80	104.69	107.06	113.59
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	106.62	106.63	113.10	92.68	89.78	89.35	94.65	95.40	95.45
PETERNAKAN	99.05	100.15	100.25	96.17	93.97	94.52	93.71	94.17	93.03
PERIKANAN	104.72	104.97	104.97	107.10	105.42	103.07	107.64	108.74	107.91

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

28. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

29. Nilai Tukar Petani (NTP) periode data tahun Desember 2019 dan seterusnya menggunakan NTP Tahun Dasar 2018 sedangkan NTP periode data sebelum periode Desember 2019 menggunakan data NTP Tahun Dasar 2012

Tabel 6.8. Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor

INDEKS YANG DITERIMA PETANI	2019*				2020				2021
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES	MAR
TOTAL	138.29	140.79	145.23	108.92	108.53	107.47	107.87	108.94	107.55
TANAMAN PANGAN	147.27	146.25	152.61	112.38	111.07	109.01	110.17	110.18	105.66
HORTIKULTURA	133.14	140.68	143.36	110.57	114.73	115.80	111.14	114.81	122.37
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	144.39	146.66	155.99	96.91	96.19	95.88	101.65	103.49	104.34
PETERNAKAN	127.88	130.36	131.28	101.36	100.11	100.27	99.26	100.99	100.60
PERIKANAN	138.41	141.01	142.17	111.83	111.05	108.70	113.42	115.67	115.38

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 6.9. Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

INDEKS YANG DITERIMA PETANI	2019*				2020				2021
	MAR	JUN	SEP	DES	MAR	JUN	SEP	DES	MAR
TOTAL	134.49	136.50	137.04	104.61	106.28	106.30	105.94	107.34	108.30
TANAMAN PANGAN	137.93	140.33	140.80	104.50	106.18	106.20	105.68	107.26	108.36
HORTIKULTURA	135.27	137.69	138.09	104.27	106.05	106.44	106.16	107.24	107.93
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	135.43	137.54	137.93	104.57	107.14	107.31	107.39	108.48	109.31
PETERNAKAN	129.10	130.16	130.95	105.40	106.52	106.09	105.92	107.25	108.14
PERIKANAN	132.17	134.34	135.44	104.42	105.34	105.47	105.38	106.38	106.93

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

pedesaan, khususnya Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman serta kelompok pakaian dan alas kaki.

Peningkatan risiko biaya bagi petani berlangsung relatif merata di seluruh subsektor pertanian di Jawa Tengah. Namun demikian, risiko tersebut berdampak terbatas pada petani subsektor hortikultura yang mengalami peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani cukup signifikan sebesar 6,58% (ptp). Peningkatan penerimaan petani tersebut relatif sejalan dengan inflasi produk hortikultura, khususnya komoditas aneka cabai dan bawang.

6.3. TINGKAT KEMISKINAN

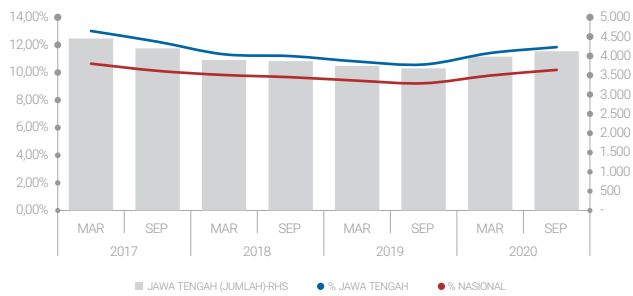
Tingkat kemiskinan Jawa Tengah mengalami peningkatan, baik dari jumlah maupun rasio penduduk miskin. Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2020 sebesar 4,12 juta jiwa atau meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3,68 juta jiwa. Dengan perkembangan tersebut, rasio penduduk miskin di Jawa Tengah meningkat menjadi sebesar 11,84% dari total penduduk Jawa Tengah, lebih tinggi dibandingkan September 2019 yang sebesar 10,58%.

Peningkatan tingkat kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat dari 1,60 juta jiwa pada September 2019, menjadi sebesar 1,89 juta jiwa pada September 2020. Demikian pula dengan jumlah penduduk miskin di pedesaan juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,23 juta jiwa pada periode September 2020, meningkat dari 2,08 juta jiwa pada periode yang sama di 2019.

Peningkatan kemiskinan yang terjadi pada September 2020 terutama disebabkan oleh kelesuan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dampak pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak triwulan I 2020 tidak hanya terbatas pada kelesuan kegiatan perdagangan dan pariwisata yang disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun juga penurunan permintaan barang dan jasa, baik untuk ekspor maupun domestik. Dampak lanjutan dari penurunan permintaan produksi tersebut adalah penurunan penghasilan masyarakat baik dari tingkat nominalnya maupun peningkatan tingkat pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Salah satu lapangan usaha yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yang relatif resilien terhadap guncangan permintaan. Lapangan usaha pertanian di Jawa Tengah tumbuh 13,89% (yoy) pada triwulan I 2021, didorong oleh masuknya musim panen beberapa komoditas utama. Hal ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi karena lapangan usaha pertanian merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi di Jawa Tengah.

Angka kemiskinan di tingkat nasional juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penduduk miskin nasional pada September 2020 sebesar 27,55 juta jiwa, meningkat signifikan dibandingkan Septeber 2019 yang sebesar 24,79 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tingkat nasional ini mengalami peningkatan sebesar 11,13% (yoy). Walaupun jumlahnya relatif lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, peningkatan penduduk miskin di Jawa Tengah turut memberikan andil yang signifikan terhadap penambahan penduduk miskin di tingkat Nasional.

Grafik 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dibandingkan nasional

Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan³⁰, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan nilai garis kemiskinan di Jawa Tengah terutama didorong oleh peningkatan garis kemiskinan di perkotaan. Berdasarkan pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan, garis kemiskinan perkotaan di Jawa Tengah meningkat 4,34% (yoy) menjadi Rp404.451 per kapita/bulan pada periode laporan, dari sebelumnya sebesar Rp387.646 per kapita/bulan pada September 2019. Sementara itu garis kemiskinan di pedesaan juga meningkat 4,29% (yoy), dari sebesar Rp388.796 per kapita/bulan pada September 2019 menjadi Rp392.216 per kapita/bulan pada September 2020. Peningkatan penduduk miskin di perkotaan tidak hanya didorong oleh peningkatan garis kemiskinan, namun juga disebabkan oleh tingginya penambahan angka pengangguran seiring dengan menurunnya aktivitas produksi, khususnya pada lapangan usaha industri pengolahan.

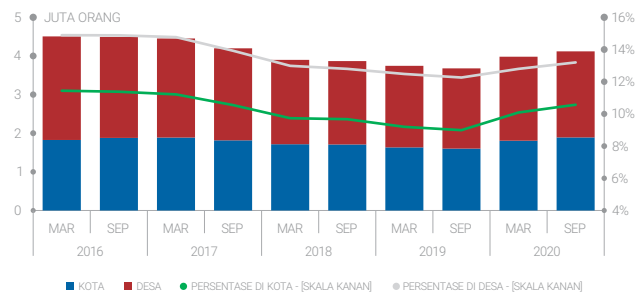
Laju peningkatan nilai garis kemiskinan Jawa Tengah baik untuk daerah perkotaan dan pedesaan, terhitung lebih tinggi dibandingkan laju inflasi umum di Jawa Tengah. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laju inflasi komoditas-komoditas utama pembentuk nilai garis kemiskinan, khususnya komoditas primer bahan makanan. Peningkatan laju garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laju inflasi umum menunjukkan bahwa nilai barang-barang konsumsi masyarakat pra sejahtera meningkat lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan nilai barang-barang konsumsi masyarakat menengah sejahtera, disebabkan oleh tingginya laju inflasi kelompok kebutuhan primer, khususnya pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

Tabel 6.10 Garis Kemiskinan Jawa Tengah

GARIS KEMISKINAN	SEP-2018	SEP-2019	MAR-2020	SEP-2020
Kota	Rp. 359,526	Rp. 387,646	Rp. 401,771	Rp. 404,451
Desa	Rp. 355,306	Rp. 376,099	Rp. 388,796	Rp. 392,216
Kota & Desa	Rp. 357,600	Rp. 381,992	Rp. 395,407	Rp. 398,477

SUMBER: BPS, DIOLAH

30. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang. Sesuai definisi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk miskin

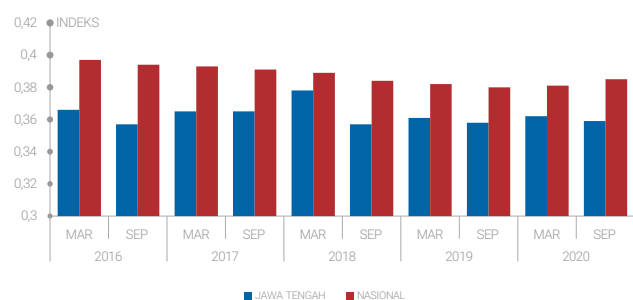
Grafik 6.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Untuk menahan laju tingkat kemiskinan menjadi lebih tinggi (khususnya selama masa pandemi), berbagai kebijakan telah dilakukan. Dari pemerintah pusat telah menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara itu, kebijakan pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial tunai dan bantuan sosial beras kepada keluarga penerima manfaat program PKH menggunakan anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah.

6.4. PEMERATAAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada September 2020 yang diukur melalui koefisien Gini relatif stabil. Pada September 2020, koefisien Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,359; atau relatif stabil dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,358³¹. Apabila dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah tersebut masih lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 0,385. Dengan demikian, tingkat pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional.

Grafik 6.5 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

SUMBER: BPS, DIOLAH

31. Koefisien Gini mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna

Tabel 6.11 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers

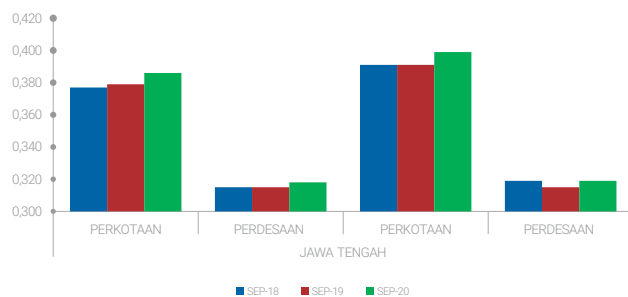
PROVINSI	KOEFSISIEN GINI							
	MAR-17	SEP-17	MAR-18	SEP-18	MAR-19	SEP-19	MAR-20	SEP-20
Jawa Tengah	0.365	0.365	0.378	0.357	0.361	0.358	0.362	0.359
Banten	0.382	0.379	0.385	0.367	0.365	0.361	0.363	0.365
Jawa Timur	0.396	0.415	0.379	0.371	0.370	0.364	0.366	0.364
Jawa Barat	0.403	0.393	0.407	0.405	0.402	0.398	0.403	0.398
DKI Jakarta	0.413	0.409	0.394	0.390	0.394	0.391	0.399	0.400
DI Yogyakarta	0.432	0.440	0.441	0.422	0.423	0.428	0.434	0.437
Indonesia	0.393	0.391	0.389	0.384	0.382	0.380	0.381	0.385

SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah masih yang terendah, diikuti oleh Banten dan Jawa Timur. Sementara itu, tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta. Peningkatan ketimpangan tercepat yang berlangsung dalam rentang September 2019 – September 2020 terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

Ditinjau berdasar wilayah, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di Jawa Tengah berada di kawasan perkotaan. Pada September 2020, koefisien Gini perkotaan Jawa Tengah sebesar 0,386; lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang sebesar 0,318. Fenomena peningkatan ketimpangan yang tinggi pada kawasan perkotaan tersebut juga berlangsung di tingkat nasional, mencerminkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah lebih terpapar dampak pelemahan ekonomi dibandingkan kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini dapat terutama disebabkan oleh rendahnya kapasitas tabungan/dana darurat serta menurunnya penghasilan di tengah penurunan aktivitas produksi.

Grafik 6.6 Perbandingan Ketimpangan Jawa Tengah dan Nasional berdasarkan daerah



SUMBER: BPS, DIOLAH







07

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

- 7.1. Kondisi Perekonomian Global
- 7.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021
 - 7.2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran
 - 7.2.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha
- 7.3. Prospek Inflasi Tahun 2021

7.1. KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

Perekonomian global membaik didorong oleh perbaikan negara-negara maju lebih cepat seperti Amerika Serikat (AS), Kawasan Eropa, dan Tiongkok sehingga mendorong volume perdagangan dunia secara keseluruhan. Sementara, perbaikan ekonomi negara emerging tertahan terutama akibat keterbatasan kebijakan fiskal dan teknologivaksin. Ketersediaan vaksin dapat mendorong peningkatan mobilitas ke level normal sebelum pandemi sehingga dapat mendorong konsumsi, kegiatan produksi, dan perdagangan global, tentunya dengan bantuan stimulus kebijakan untuk menjaga lintasan pemulihan. Perkembangan sejumlah indikator pada bulan Maret 2021 menunjukkan perbaikan ekonomi. Perekonomian AS tumbuh positif 0,4% (yoy) melanjutkan perbaikan triwulan sebelumnya (-2,5%; yoy). Pertumbuhan ekonomi Jepang kembali menurun dari -1,2% (yoy) pada triwulan IV 2020 menjadi -5,1% (yoy) pada triwulan I 2021. Pelemahan tersebut disebabkan implementasi vaksin yang lambat dan penyebaran COVID-19 yang menurunkan konsumsi. Sementara itu, ekonomi Tiongkok tumbuh pesat mencapai 18,3% (yoy) pada triwulan I 2021 didorong oleh kemajuan vaksinasi global, ekspor produk manufaktur, dan kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok semakin membaik dibanding triwulan IV 2020 yang sebesar 6,5% (yoy).

Volume perdagangan dunia meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian global. Pada 2020, volume perdagangan dunia lebih baik dari prakiraan sebelumnya sejalan dengan update realisasi triwulan III yang lebih baik dari rilis sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, perbaikan pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan berlanjut pada 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global. Sejalan dengan perbaikan volume perdagangan, harga komoditas meningkat didorong oleh ekspektasi pemulihan ekonomi global. Harga komoditas fiber yang mengindikasikan aktivitas ekspor TPT Jawa Tengah, meningkat 3,71% (yoy) didorong kenaikan permintaan. Selain itu, harga perdagangan dunia lainnya juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada tahun 2021,

Tabel 7.1 Indikator Perekonomian Global

INDIKATOR (%YOY)	2019	PROYEKSI		
		ESTIMASI 2020*	2021*	2022*
PDB Global	2.8	-3.5	5.5	4.2
PDB Advanced Economies	1.6	-4.9	4.3	3.1
PDB Amerika Serikat	2.2	-3.4	5.1	2.5
PDB Uni Eropa	1.3	-7.2	4.2	3.6
PDB Jepang	0.3	-5.1	3.1	2.4
PDB Emerging Market and Developing Countries	3.6	-2.4	6.3	5.0
PDB Tiongkok	6.0	2.3	8.1	5.6
Volume Perdagangan Dunia	1.0	-9.6	8.1	6.3

SUMBER: WORLD ECONOMIC OUTLOOK, JANUARI 2021

Tabel 7.2 Harga Perdagangan Dunia dalam US Dollars Tabel

KOMODITAS UTAMA (%YOY)	2018	2019	2020	PROYEKSI
				2021*
Manufaktur	2.0	0.4	-3.1	2.0
Minyak	29.4	-10.2	-32.7	41.7
Makanan	-1.2	-3.1	1.7	13.9
Minuman	-8.2	-3.8	3.3	4.4
Pertanian	2.0	-5.4	-3.4	12.9
Logam	6.6	3.7	3.5	32.1

SUMBER: WORLD ECONOMIC OUTLOOK, APRIL 2021

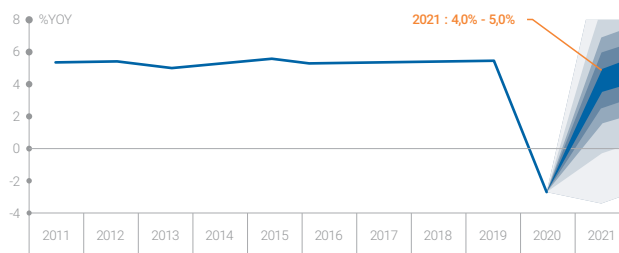
seperti manufaktur, minyak, makanan, minuman, pertanian, dan logam.

Ke depan, perbaikan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut didukung oleh stimulus ekonomi dan vaksinasi yang mendorong meningkatnya mobilitas. Sejumlah indikator dini pada Mei 2021 mengindikasikan perbaikan ekonomi global yang berlanjut seperti ekspansi PMI manufaktur di AS, Eropa, Jepang, dan Tiongkok, serta keyakinan konsumen dan bisnis yang membaik dengan adanya vaksinasi. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian dunia diperkirakan membaik pada tahun 2021. IMF memperkirakan perekonomian global membaik pada tahun 2021, yakni tumbuh 5,5% (yoy).

7.2. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020 dengan range pertumbuhan sebesar 4%-5%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan akan berlanjut secara gradual. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah mengalami peningkatan saat pelonggaran pembatasan sosial dilakukan.

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



Tabel 7.3 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

PENGELUARAN	2019*				TOTAL	2020*				TOTAL	2021	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I**	TOTALP
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4.79	5.16	4.18	4.36	4.62	3.46	-4.75	-1.89	-2.38	-1.42	-1.89	↑
KONSUMSI LNPRT	13.85	13.64	8.23	8.15	10.90	-1.88	-5.41	-1.63	-2.88	-2.98	0.13	↑
KONSUMSI PEMERINTAH	5.08	6.51	7.01	0.39	4.04	2.89	-7.14	-0.23	-8.41	-4.30	0.01	↑
INVESTASI	6.92	4.17	5.54	2.98	4.85	0.16	-11.94	-10.06	-5.64	-6.98	-0.77	↑
EKSPOR LUAR NEGERI	3.74	-2.08	17.87	-0.04	5.10	5.02	-9.13	-16.68	-8.89	-7.90	8.07	↑
IMPOR LUAR NEGERI	6.62	-10.16	-16.60	-4.24	-6.70	1.16	-28.96	-16.61	-25.61	-17.65	-2.18	↑
NET EKSPOR ANTARDAERAH	6.82	-4.14	-33.70	13.82	-6.59	-0.93	-34.89	-15.00	-45.42	-23.13	7.38	↑
PDRB	5.12	5.52	5.63	5.33	5.40	2.65	-5.91	-3.79	-3.34	-2.65	-0.87	↑

KET : *) ANGKA SEMENTARA, **) ANGKA SANGAT SEMENTARA, P) PROYEKSI BANK INDONESIA
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH, PROYEKSI OLEH BANK INDONESIA

7.2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan terus berlanjut pada 2021 terutama didorong oleh meningkatnya indikator ekspor kayu olahan, konsumsi listrik industri, dan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi. Konsumsi diprakirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan keyakinan masyarakat. Perkiraan konsumsi rumah tangga yang membaik didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang antara lain bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial pada 2021 yang menopang daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga kembali meluncurkan kebijakan relaksasi fiskal melalui PMK No.20/PMK.010/2021 yang memberikan diskon PPNBM untuk pembelian kendaraan Roda 4 dan berlaku pada 1 Maret 2021 untuk mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan property. Daya beli juga ditopang oleh kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021 bervariasi mulai 0,75% hingga 3,68%, yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah pada November 2020. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan yang tercermin antara lain dari peningkatan indeks ekspektasi konsumen sebesar 132,5 pada Mei 2021. Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme vaksinasi yang meluas di tahun 2021.

Pemulihan investasi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut pada 2021. Investasi pada 2021 berpotensi meningkat seiring membaiknya indeks ekspektasi kegiatan usaha di Mei 2021

menjadi 133,6, termasuk pembangunan infrastruktur lainnya. Daya saing investasi Jawa Tengah yang cukup baik bersumber dari tenaga kerja yang kompetitif dan kawasan industri di berbagai daerah. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menargetkan pembangunan investasi baru di kawasan industri di Jawa Tengah terjadi di triwulan II 2021. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan keyakinan berusaha sehingga mendorong investasi yang juga berperan penting dalam penyerapan lapangan kerja dan perekonomian Jawa Tengah. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 turut ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur setelah sempat tertunda pada 2020. Pembangunan proyek infrastruktur 2021 akan difokuskan pada infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar seperti pembangunan bendungan, jalan tol, pembangkit listrik, dan pengembangan pariwisata Borobudur.

Perbaikan kinerja ekspor turut mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Perkiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang lebih baik, mengindikasikan prospek permintaan global yang meningkat. Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Jawa Tengah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, furnitur, hingga makanan. Sebagai contoh, ekspor komoditas alas kaki yang saat ini sedang dalam tren meningkat didorong permintaan

Tabel 7.4 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

PENGELUARAN	2020*				TOTAL	2021P	
	I	II	III	IV		I**	TOTALP
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	-4.73	0.94	6.61	7.56	2.48	13.89	↑
INDUSTRI PENGOLAHAN	3.01	-4.41	-7.10	-6.10	-3.74	-3.94	↑
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3.28	-10.33	-5.59	-2.27	-3.80	-0.56	↑
PDRB	2.65	-5.91	-3.79	-3.34	-2.65	-0.87	↑

KET : *) ANGKA SEMENTARA, **) ANGKA SANGAT SEMENTARA, P) PROYEKSI BANK INDONESIA
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH, PROYEKSI OLEH BANK INDONESIA

32. Indeks ekspektasi kegiatan usaha membaik dari 123,4 di triwulan I 2021 menjadi 133,6 di Mei 2021

negara tujuan ekspor seiring dengan membaiknya konsumsi domestik, kualitas produk alas kaki Jawa Tengah yang semakin membaik, harga jual serta FOB lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, finalisasi perjanjian Indonesia – EU CEPA, serta pemulihan aktivitas masyarakat pasca vaksinasi.

7.2.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Lapangan usaha terdampak COVID-19 diperkirakan akan membaik di 2021. Lapangan usaha industri pengolahan menjadi motor utama perbaikan ekonomi selama 2021. Permintaan global dan domestik yang membaik akan berdampak positif pada sisi produksi industri utama Jawa Tengah. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, makanan dan minuman, dan farmasi, dan alas kaki diperkirakan akan tumbuh lebih baik di 2021. Permintaan domestik atas produk TPT secara umum dan untuk kebutuhan penanganan COVID-19 akan berlanjut. Selain itu, bertambahnya operasional pabrik terutama pabrik relokasi alas kaki di Jawa Tengah akan semakin menambah peningkatan produksi industri pengolahan Jawa Tengah.

Perbaikan industri dan pergerakan masyarakat, mendorong perbaikan sektor perdagangan. Perdagangan kendaraan bermotor dan properti akan kembali menggeliat setelah mengalami penurunan selama 2020. Penjualan kebutuhan tersier tersebut didukung kebijakan pemerintah berupa diskon PPnBM untuk pembelian kendaraan jenis tertentu dan PPN 0% untuk mendorong peningkatan penjualan properti. Sektor ritel akan membaik tidak hanya dari komoditas makanan dan minuman, tetapi juga komoditas sandang dan peralatan rumah tangga. Perdagangan alat kesehatan disertai obat-obatan, diperkirakan masih akan meningkat di 2021.

Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga membaik di 2021. Meningkatnya aktivitas konstruksi terutama bersumber dari pembangunan proyek infrastruktur. Pembangunan yang tertunda di 2020 akan dilaksanakan di 2021. Selain dari sektor pemerintah, pihak swasta juga diperkirakan meningkatkan aktivitas investasi bangunan. Pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, akan banyak dilakukan pada industri unggulan Jawa Tengah. Selain itu, beberapa perusahaan baru di Jawa Tengah sudah melakukan *groundbreaking* di Kawasan Industri Terpadu Batang dan Batang Industrial Park.

Lebih lanjut, kehadiran vaksin COVID-19 menjadi penting di 2021 sehingga dapat meminimalkan tingkat kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas. Stimulus yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan menjadi faktor pendukung dan berpengaruh positif pada perekonomian 2021. Namun demikian beberapa risiko yang perlu diwaspadai berpotensi mengganggu stabilitas

perekonomian antara lain: (i) efektifitas vaksin dalam membangun *herd immunity* di bawah perkiraan sehingga berdampak pada mobilitas dan produktivitas rumah tangga; (ii) kebijakan pembatasan sosial di global dan domestik, berlangsung lebih lama dari perkiraan; (iii) terbatasnya konsumsi barang tahan lama dan rekreasi pada masyarakat golongan menengah atas; serta (iv) dampak sosial yang meluas akibat penurunan pendapatan sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat.

7.3. PROSPEK INFLASI TAHUN 2021

Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dari inflasi tahun 2020. Faktor utama yang mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Transportasi, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya

Peningkatan inflasi Kelompok Transportasi diperkirakan didorong oleh pulihnya permintaan mobilisasi masyarakat setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar direlaksasi oleh Pemerintah. Pada sisi penawaran, para pelaku usaha jasa transportasi akan menerapkan langkah bisnis meningkatkan tarif untuk memperoleh margin keuntungan yang sempit menurun pada tahun 2020. Kebijakan Pemerintah dalam penyesuaian tarif tol diperkirakan juga akan meningkatkan risiko inflasi jasa angkutan penumpang, yang diperkirakan akan berlangsung pada semester II 2021.

Biaya produksi jasa transportasi juga berisiko meningkat seiring dengan pulihnya permintaan global terhadap komoditas minyak dunia. Beberapa negara manufaktur utama seperti Tiongkok telah meningkatkan permintaan impornya terhadap komoditas-komoditas bahan mentah manufaktur, khususnya mineral logam dan minyak bumi. Ruang fiskal Pemerintah yang terbatas dalam mengakomodasi subsidi diperkirakan akan meningkatkan risiko terhadap inflasi komoditas energi, khususnya bahan bakar kendaraan. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan industri domestik, dengan memberlakukan insentif dengan menurunkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021.

Risiko peningkatan inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya pada tahun 2021, diperkirakan berlangsung sebagai dampak pulihnya aktivitas produksi dan investasi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pada komponen pembangunan fisik. Pada sisi penawaran, peningkatan upah jasa informal bagi penyelenggaraan rumah tangga telah berlangsung tinggi sejak awal tahun 2021, seperti Upah Pembantu RT, Tukang Bukan Mandor, Keamanan, dan lain-lain. Kelesuan ekonomi di sepanjang tahun 2020 diperkirakan akan mendorong para pelaku jasa informal untuk meningkatkan

Tabel 7.5 Proyeksi Inflasi

DISAGREGASI INFLASI (%; YOY)	2019				2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	IP	IIIP	IIIP	IVP
TOTAL	1.74	2.03	2.96	2.93	3.25	2.48	1.46	1.55	1.48	▲	▲	▲

KET : P) PROYEKSI BANK INDONESIA, TANDA PANAH MENUNJUKKAN ARAH DIBANDINGKAN TRIWULAN SEBELUMNYA.
SUMBER: BPS PROVINSI JAWA TENGAH, DIOLAH, PROYEKSI OLEH BANK INDONESIA

tarif dalam rangka mengompensasi kerugian potensial tersebut, lebih awal dibandingkan pelaku industri berskala menengah dan besar (korporasi).

Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2020, yaitu $3\% \pm 1\%$ (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait gangguan pasokan dan distribusi domestik. Selanjutnya, dalam rangka

menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2020. Diseminasi dan Sosialisasi penggunaan *Sislogda* untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2020 pada level yang terkendali.



Tim Penyusun

PENGARAH

Pribadi Santoso

PENANGGUNG JAWAB

M. Firdauz Muttaqin

KOORDINATOR PENYUSUN

Berry A. Harahap

EDITOR

Wulan Agustina Rahayu

TIM PENULIS

**Anton Kisworo, Christian Octavian, Deded T. Prima,
Muh. Fahrurrizki Aulia, Umi Tri Ruhana**

KONTRIBUTOR

**Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah,
dan Manajemen Intern**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Imam Bardjo SH No. 4 Semarang 50241

Telp. +62 24 8310246

Fax. +62 24 8310339

e-mail : KPwJateng-KPKP@bi.go.id